



INOVASI UNTUK NEGERI info indonesia

EDISI # 65 MARET 2026

<https://www.infoindonesia.id>



PRABOWO - TRUMP **MAKIN** MESRA

• DAGING SAPI DAN
TINGGI BADAN ALA MBG

• SUMSEL JADI SIMPUL
KONEKTIVITAS
TRANSPORTASI
SUMATERA

• JAKARTA MENUJU
KOTA SINEMA 2027



info indonesia

INOVASI UNTUK NEGERI

Network

www.infoindonesia.id



INFO PASANG
NUR AISAH
+ 62 815-1157-6312
IKLAN



Lautan informasi di dunia maya melalui jaringan internet memberikan banyak referensi **INFO** kepada masyarakat

Koran Cetak Info Indonesia



www.infoindonesia.id
 [facebook](https://www.facebook.com/infoindonesia) @infoindonesia.id [twitter](https://twitter.com/_infoindonesia) : @_infoindonesia
 [Instagram](https://www.instagram.com/info_indonesia.id) @info_indonesia.id [YouTube](https://www.youtube.com/infoindonesiatv) : infoindonesiatv

JAKARTA
JL. Raya Kalibata No. 8
Jakarta Selatan (12750)

Telp : 021-79196781
Email : redaksi@infoindonesia.id

**PEMIMPIN UMUM :**

Usman Rizal

PEMIMPIN PERUSAHAAN

Nur Aisah

PEMIMPIN REDAKSI

Gunawan Effendi

WAKIL PEMIMPIN REDAKSI

Rahmad Romli

Redaktur Pelaksana

Irmayani

REDAKTUR

Nina Erlina, Ega Tri Gustina,
Nur Khamida, Sukma Mawarni

REPORTER

Ari Irpan, Siti Nieke, Agung Prasetya,
Rizwan Suandi, Hari Priyadi,
Putri Aridhani

DESAIN MEDSOS

Al Amin, M. Fikri, Adam Aulia.

TATA LETAK

Sujatmiko

KEUANGAN

Atika

SEKRETARIS REDAKSI

Nur Aisah

PENGEMBANGAN BISNIS

Ega Tri Gustina, Ellisa Mawarni

DISTRIBUSI

Abdul Muchtar

BANK ACCOUNT

a/n PT. WAHANA MULTIMEDIA, BCA
No. Rek 553-041-4321,
KCP Otista Jakarta Timur

KETIDAKPASTIAN

Apapun situasi dan kondisinya, Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1447 hijriyah menjadi momentum utama pada Maret 2026. Dampaknya akan mencakup ruang dan waktu kita mulai dari tingkat perorangan, keluarga, sanak-saudara, lingkungan terdekat, hingga ranah publik di tingkat negara hingga kawasan global.

Namun, yang pertama, tradisi Idul Fitri di Indonesia adalah saling bermaaf-maafan. Bersama ini pula segenap keluarga besar Info Indonesia mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 hijriyah. Minal aidin al faizin, mohon maaf lahir dan batin. Untuk minal aidin al faizin, padankan saja ke dalam bahasa: ringkasnya adalah doa semoga kita semua berada kembali dalam keadaan fitrah, suci, dan menjadi pemenang (dari berbagai godaan dan ujian) selama Ramadan.

Nah, godaan dan ujian pada Ramadan kali ini mungkin lebih berat dari yang sudah-sudah. Kita di Indonesia pernah mengalami pandemi Covid-19 pada 2020-2021 yang juga menjadi ujian pada Idul Fitri kala itu. Toh ketidakpastian kali ini, di tingkat perorangan hingga geopolitik global yang mewarnai tiga bulan, kuartal pertama, atau kita bulatkan saja 100 hari awal 2026 memang berbeda. Masing-masing kita boleh mencatat untuk tingkat pribadi. Namun di ranah publik, cukup banyak yang dapat kita simak dan alami bersama dalam skala nasional.

Yang relevan adalah mudik lebaran 2026. Proyeksi Kementerian Perhubungan, total pergerakan masyarakat selama masa Angkutan Lebaran 2026 mencapai 50,60 persen penduduk Indonesia atau sekitar 143,91 juta orang. Begitu yang dikemukakan langsung oleh Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan Penyelenggaraan Angkutan Lebaran 2026, di kantornya pada Selasa malam, 24 Februari 2026.

Tentu saja Rakor itu melibatkan begitu banyak pihak yang terkait. Tercatat yang hadir dalam Rakor ini antara lain Wakil Menteri Perhubungan Suntana, jajaran Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratma di lingkungan Kemenhub, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani, Kepala BIN Muhammad Herindra, Kepala BPJT Wilan Oktavian, Kepala BNPB Suharyanto, Ketua KNKT Soerjanto Tjahjono, perwakilan Kemepar, Komdigi, Kemenag, Kemenaker, Kemendikdasmen, KemenESDM, Kemendag, Kemendagri, Kemenperin, Kemenkes, KemenPANRB, KemenPPPA, TNI, Basarnas, Korlantas Polri, pimpinan lembaga non-kementerian dan ketua asosiasi, serta para direktur utama BUMN, pengelola jalan tol, juga operator bidang transportasi darat, laut, maupun udara.

Satu hal yang perlu kita catat, Pak Menhub mengemukakan, "Always expect uncertainty and irregularities. Cuaca ekstrem, bencana alam yang dapat terjadi kapan saja, berpotensi menimbulkan gangguan pada transportasi."

Simpulan kita, ketidakpastian sudah menjadi rutinitas sehari-hari dalam kehidupan kita. Cara terbaik menghadapinya adalah tingkat penyesuaian, adaptasi, yang lebih tinggi lagi. ●

ALAMAT REDAKSI/IKLAN/PEMASARAN:

Jl. Raya Kalibata No.8, Rawajati,
Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12750
●TELP 021-791 96781 ●FAX 021-791 96786
Email : redaksi21pro@gmail.com
Instagram : info_indonesia.id
Tiktok : infoindonesia.tv
Facebook : infoindonesia. id

MANAGEMENT CETAK DI BAWAH
PT Wahana Multimedia
MANAGEMENT REDAKSI DI BAWAH
PT Dua Satu Pro

DAFTAR ISI

EDISI BULAN MARET 2026



6 INFO UTAMA

Agenda bisnis dan politik luar negeri saling beriringan dalam kunjungan Presiden Prabowo ke Amerika Serikat. Kian jelas dalam acara buka bersama dengan kalangan pengusaha di Washington DC.

38 INFO PRIORITAS SUMSEL

Menhub Dudy Purwagandhi menyebut Provinsi Sumatera Selatan memiliki posisi vital sebagai simpul konektivitas di wilayah barat Indonesia khususnya Pulau Sumatera, yang didukung jaringan angkutan jalan, perkeretaapian, penyeberangan, hingga udara.

56 INFO BANDUNG BARAT

Satu tahun kepemimpinan Jeje Ritchie Ismail dan Wakil Bupati Asep Ismail di Kabupaten Bandung Barat (KBB), sejumlah indikator makro menunjukkan perbaikan.

76 IN MEMORIAM

Rabu siang itu, Palembang seperti kehilangan denyutnya. Langit menggantung kelabu, angin berembus pelan seakan turut menahan tangis. Provinsi yang pernah ia pimpin selama dua periode itu menjadi saksi perpisahan terakhir dengan putra terbaiknya, Alex Noerdin.



80

INFO EKONOMI

Swasembada pangan saja belum cukup. Urusan penyimpanan cadangan (stok) pangan dan distribusi yang efisien menjadi konsekuensinya. Itu sebab peta jalan ketahanan pangan menjadi penting.



84

INFO NASIONAL

Penunjukan Mayjen TNI (Purn) Dr. dr. Prihati Pujowaskito sebagai Direktur Utama BPJS Kesehatan periode 2026-2031 melalui Keputusan Presiden Nomor 17/P Tahun 2026 sempat memicu tanda tanya di sebagian kalangan masyarakat.



96

INFO KHUSUS

Integritas dan loyalitas dalam menjalankan amanah merupakan hal yang harus dipegang teguh oleh setiap pelaksana Program MBG. Dua poin penting ini menjadi pegangan bagi seluruh pegawai di Badan Gizi Nasional.

- 3 DARI REDAKSI
- 14 INFO KEMENTERIAN
- 36 OPINI
- 46 INFO KULINER
- 68 INFO KESEHATAN
- 72 INFO WISATA
- 90 INFO ISTANA
- 90 INFO PALEMBANG



50

INFO MALUKU UTARA

Keadilan di Indonesia tampaknya kini memiliki label harga yang jelas. Di saat seorang warga desa seringkali harus mendekam di balik jeruji besi hanya karena mengambil beberapa batang kayu untuk menyambung hidup, perusahaan tambang skala raksasa yang membat puluhan hektare hutan tanpa izin justru bisa melenggang bebas hanya dengan melakukan transfer bank.



SAAT INDONESIA MENDEKAT KE AMERIKA SERIKAT

Agenda bisnis dan politik luar negeri saling beriringan dalam kunjungan Presiden Prabowo ke Amerika Serikat. Kian jelas dalam acara buka bersama dengan kalangan pengusaha di Washington DC.

Karena berlangsung pada Ramadan, saat berpuasa bagi umat Islam, acara jamuan makan malam dari komunitas bisnis Amerika Serikat menyambut kunjungan Presiden Prabowo ke negeri Paman Sam itu bertajuk Gala Iftar Dinner. Katakanlah buka bersama. Acaranya berlangsung di kantor pusat U.S. Chamber of Commerce (USCC), Kamar Dagang AS, di ibu kota negeri itu, Washington DC.

Nah, di acara Gala Iftar Dinner pada Rabu, 18 Februari 2026 itulah Presiden Prabowo mengemukakan bahwa Indonesia merupakan teman sejati (true friend) AS. "Kami selalu mencoba meyakinkan Amerika Serikat, bahwa Indonesia adalah teman sejati, meskipun secara politik, kami memiliki tradisi politik luar negeri nonblok," ujar Prabowo.

Dalam acara yang mempertemukan pemimpin bisnis dan pejabat kedua negara ini, Prabowo menempatkan hubungan bilateral Indonesia–Amerika Serikat sebagai fondasi penting bagi stabilitas kawasan Indo-Pasifik dan pertumbuhan

ekonomi global. Presiden pun menyambut kunjungannya kali ini membawa agenda strategis, termasuk penyelesaian perjanjian dagang besar antara kedua negara.

"Saya juga berada di sini untuk menyelesaikan sebuah perjanjian perdagangan besar antara kedua negara kita. Kita telah bernegosiasi sangat intens selama beberapa bulan terakhir, dan saya pikir kita telah mencapai kesepakatan yang solid dalam banyak isu," ujar Presiden Prabowo.

Ia mengemukakan perjanjian tersebut diharapkan menjadi pendorong utama penguatan kemitraan ekonomi Indonesia–Amerika Serikat. Presiden menekankan bahwa berbagai kesepakatan penting telah ditandatangani, baik antara institusi pemerintah maupun pelaku usaha kedua negara, termasuk tindak lanjut atas isu keseimbangan perdagangan. "Saya menantikan perjanjian perdagangan ini sebagai dorongan besar bagi kelanjutan kemitraan ekonomi dan kerja sama ekonomi antara Amerika

Serikat dan Indonesia,” ungkap Presiden.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo juga menegaskan bahwa Indonesia tidak melupakan peran historis Amerika Serikat dalam mendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia pada periode 1945–1949. Presiden menyebut dukungan tersebut sebagai fondasi moral dalam hubungan bilateral kedua negara. “Indonesia akan selalu mengingat peran yang dimainkan Amerika Serikat dalam sejarah kami. Amerika Serikat berperan penting dalam mendukung perjuangan kemerdekaan kami,” kata Presiden.

Meski Indonesia memiliki tradisi politik luar negeri non-blok, Presiden Prabowo menegaskan bahwa hal tersebut tidak mengurangi komitmen Indonesia terhadap persahabatan dengan Amerika Serikat maupun negara-negara besar lainnya. Menurutnya, Indonesia menghormati semua kekuatan besar dan berupaya menjadi jembatan serta honest broker di tengah dinamika global.

“Kami selalu ingin melihat kehadiran Amerika yang kuat di Indonesia. Kami selalu mencoba meyakinkan Amerika Serikat bahwa Indonesia adalah sahabat sejati, meskipun mungkin secara politik kita memiliki tradisi non-blok” tegas Pres-

iden.

Presiden Prabowo juga menilai dunia saat ini membutuhkan kolaborasi dan kerja sama yang lebih erat di tengah tantangan global yang semakin kompleks. Presiden turut menyambut baik upaya kepemimpinan Amerika Serikat dalam menciptakan iklim perdamaian global.

“Saya melihat ada kemauan besar dari para pemimpin Amerika Serikat saat ini untuk menciptakan iklim perdamaian. Mungkin ini tidak memuaskan semua pihak, tetapi setidaknya kita harus mencoba,” ujar Presiden.

Toh kunjungan Prabowo ke Washington beriringan dengan dinamika geopolitik yang rawan, tak terkecuali soal pembentukan Dewan Perdamaian Internasional (Board of Peace) untuk implementasi gencatan senjata di Gaza serta negosiasi perjanjian perdagangan besar antara Indonesia dan Amerika Serikat. Dalam konteks ini, Indonesia memosisikan diri sebagai mitra strategis sekaligus jembatan diplomasi.

Prabowo menegaskan bahwa Indonesia tetap berpegang pada politik luar negeri bebas aktif, menghormati semua kekuatan besar, dan berkomitmen menjadi “honest broker” dalam konflik global. Namun, dia juga menekankan bahwa kemitraan dengan Amerika Serikat me-

miliki nilai historis dan strategis yang tidak tergantikan.

“Itulah tradisi kebijakan luar negeri kami. Kami mengambil posisi yang sangat menghormati semua kekuatan besar. Kami menghargai persahabatan dengan semua bangsa. Pada akhirnya, kami merasa dapat menjadi semacam jembatan, semacam perantara yang jujur (honest broker) di antara kekuatan-kekuatan besar dunia,” kata Prabowo.

Presiden Prabowo pun menegaskan komitmen Indonesia untuk membangun hubungan terbaik dengan Amerika Serikat di berbagai bidang, mulai dari politik, ekonomi, bantuan kemanusiaan, hingga perlindungan lingkungan. “Kami menginginkan hubungan terbaik dengan Amerika Serikat di semua bidang,” tandasnya.

Di bagian akhir pidatonya, Presiden mengemukakan Indonesia bukan lagi “sleeping giant”, raksasa sedang tidur. Menurut dia, dunia mulai mengakui kekuatan ekonomi dan stabilitas politik Indonesia. “Indonesia memiliki banyak potensi. Kami menyadari—dan saya rasa kawasan ini juga menyadari—bahwa Indonesia bukan lagi raksasa yang tertidur. Kami mulai bangun,” tegasnya. ●



KETIDAKPASTIAN MASIH MEMBAYANG

Usai bertemu dengan komunitas bisnis kamar dagang dan industri AS, agenda utama kunjungan Presiden Prabowo ke Amerika Serikat adalah penandatanganan kesepakatan dagang timbal balik dan pertemuan perdana Dewan Perdamaian (Board of Peace). Toh ketidakpastian masih membayang.



Mendekat ke Amerika Serikat bukan berarti jalan lempang sudah terbentang. Dinamika politik domestik di AS, juga geopolitik global, berubah dengan cepat. Apa yang sudah menjadi kesepakatan kedua negara melalui presidennya, tetap terdampak oleh perubahan lingkungan strategis.

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menandatangani perjanjian perdagangan bersejarah di Washington DC, Amerika Serikat, pada Kamis, 19 Februari 2026. Penandatanganan tersebut menjadi

lanjut teknis perjanjian akan segera dibahas bersama kantor United States Trade Representative (USTR).

Dalam kesepakatan tersebut, Amerika Serikat mempertahankan tarif resiproskal sebesar 19 persen untuk produk Indonesia yang masuk ke pasar AS. Namun, terdapat sejumlah produk yang memperoleh tarif 0 persen. Secara total, ada 1.819 pos tarif produk Indonesia — baik dari sektor pertanian maupun industri — yang mendapatkan fasilitas bebas bea masuk.

“Baik itu pertanian maupun industri, antara lain minyak sawit, kopi, kakao, rempah-rempah, karet, komponen elektronik termasuk semikonduktor, kom-

posisi dalam forum World Trade Organization (WTO). Indonesia juga mendorong pengaturan transfer data lintas batas secara terbatas sesuai peraturan perundang-undangan nasional, serta menjamin perlindungan data konsumen yang setara. Pemerintah akan menerapkan strategic trade management guna memastikan perdagangan tidak disalahgunakan di luar tujuan damai. Perjanjian ini akan berlaku 90 hari setelah proses hukum masing-masing negara diselesaikan, termasuk konsultasi dengan DPR RI.

Kesepakatan lainnya adalah pembentukan Council of Trade and Investment sebagai forum utama dialog



tonggak penting dalam penguatan hubungan bilateral kedua negara, khususnya di bidang ekonomi dan perdagangan strategis.

Perjanjian dagang timbal balik (Agreement on Reciprocal Trade) itu bertajuk “Toward a New Golden Age for the US-Indonesia Alliance”, menuju era keemasan baru aliansi AS-Indonesia. Dokumen ini menitikberatkan penguatan kerja sama dagang dan ekonomi kedua negara. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengonfirmasi bahwa tindak

ponen pesawat terbang, yang tarifnya adalah 0 persen,” urai Airlangga.

Untuk produk tekstil dan apparel, pemerintah AS juga memberikan tarif 0 persen melalui mekanisme Tariff Rate Quota (TRQ). “Tentunya ini memberikan manfaat bagi 4 juta pekerja di sektor ini, dan kalau kita hitung dengan keluarga, ini sangat berpengaruh terhadap 20 juta masyarakat Indonesia,” jelasnya.

Di tingkat multilateral, kedua negara sepakat untuk tidak mengenakan bea masuk atas transaksi elektronik sesuai

ekonomi kedua negara. Forum ini akan menjadi mekanisme pembahasan seluruh isu investasi dan perdagangan, termasuk apabila terjadi lonjakan tarif atau kebijakan yang berpotensi mengganggu neraca perdagangan.

Dalam proses menuju kesepakatan ini, Indonesia telah mengirimkan empat surat negosiasi tarif, melakukan empat kunjungan ke Washington D.C., menjalani tujuh putaran perundingan, serta lebih dari sembilan kali pembahasan langsung maupun virtual dengan kantor United States Trade Rep-

representative (USTR). Sekitar 90 persen dokumentasi yang diajukan Indonesia dipenuhi oleh pihak Amerika Serikat.

Secara konkret, diplomasi ekonomi Presiden Prabowo menghasilkan penurunan tarif perdagangan dari sebelumnya 32 persen menjadi 19 persen, atau turun hampir 50 persen. Selain itu, fasilitas tarif 0 persen bagi 1.819 produk unggulan Indonesia semakin memperluas akses pasar ekspor. Pertemuan bilateral antara Presiden

Prabowo dan Presiden Trump turut memainkan peran strategis. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan Indonesia membuka peluang investasi lebih luas bagi perusahaan Amerika Serikat dalam pengembangan mineral kritis seperti nikel dan logam tanah jarang, dengan tetap mematuhi regulasi nasional dan mendukung agenda hilirisasi. Pemerintah menegaskan tidak akan membuka kembali ekspor bahan mentah; ekspor hanya dilakukan sete-

Toh masih ada ketidakpastian. Sehari setelah penandatanganan ART dan Presiden Prabowo masih berada di AS, Jumat, 20 Februari waktu setempat, Mahkamah Agung AS, dengan hasil pemungutan suara 6-3, memutuskan bahwa Presiden Donald Trump tidak berwenang untuk memberlakukan tarif global berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Ekonomi Darurat Internasional (IEEPA). Putusan tersebut membuat AS mulai menerapkan tarif global sementara sebesar 10 persen, dengan rencana Gedung Putih menaikkannya menjadi 15 persen.

Menyusul putusan MA AS itu, penerapan tarif dagang memerlukan penyesuaian dan perubahan dalam ekspor dan impor dari dan ke AS. Di Indonesia, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan tarif dagang Indonesia dengan AS turun dari 19 persen ke 15 persen.

Hal ini menyusul Mahkamah Agung (MA) AS membatalkan kebijakan tarif Presiden AS Donald Trump dan rencana penerapan tarif global 15 persen. "Dapat diskon jadi 15 persen," kata Menko Airlangga saat ditemui di kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI, Jakarta, Jumat, 27 Februari 2026.

Lebih lanjut, Airlangga mengatakan kesepakatan atau hasil akhir negosiasi tarif dagang Indonesia-AS yang tertuang dalam dokumen Agreement on Reciprocal Trade (ART) beberapa waktu lalu tetap akan berlaku setelah 90 hari. "Tidak batal, itu kan baru berlaku sesudah 90 hari, dan sesudah ratifikasi," kata Airlangga.

Nah, bagaimana dengan Board of Peace yang lebih sarat dengan muatan politik luar negeri? Sebagai catatan, pertemuan bilateral antara Presiden Prabowo dan Presiden Trump terkait perjanjian dagang berlangsung sekitar 30 menit di sela agenda Board of Peace yang dihadiri lebih dari 15 kepala negara dan pemerintahan.

Indonesia menjadi satu-satunya negara yang melakukan pertemuan bilateral langsung dengan Presiden Amerika Serikat dalam forum tersebut. Namun, ketidakpastian memang masih membayang. ●



Prabowo dan Presiden Trump berlangsung sekitar 30 menit di sela agenda Board of Peace yang dihadiri lebih dari 15 kepala negara dan pemerintahan, dengan Indonesia menjadi satu-satunya negara yang melakukan pertemuan bilateral langsung dengan Presiden Amerika Serikat dalam forum tersebut.

Dalam implementasinya, sektor en-

lah proses pemurnian di dalam negeri.

Sebagai timbal balik, Indonesia berkomitmen memberikan fasilitas tarif 0 persen bagi produk AS, terutama komoditas pertanian seperti gandum dan kedelai. Pemerintah menilai kebijakan ini dapat menjaga biaya bahan baku impor agar tidak menambah beban masyarakat.

GREAT Institute: PALESTINA DUKUNG KEANGGOTAAN INDONESIA DI BOARD OF PEACE

Masih banyak pihak di dalam negeri yang mengecam keputusan Indonesia bergabung dengan Board of Peace (BoP) untuk memperjuangkan perdamaian di Gaza dan mendukung kemerdekaan Palestina.

Di antara para pengkritik bahkan ada yang mendesak agar Presiden Prabowo Subianto angkat kaki dari BoP.

Para pengkritik biasanya menyebut bahwa BoP merupakan institusi yang bekerja di luar sistem internasional atau dengan kata lain tanpa mandat dari PBB.

Padahal, sebaliknya, Board of Peace adalah instrumen yang dilahirkan Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 yang ditandatangani pada November 2025 lalu.

"Bila kita baca dengan teliti Resolusi 2803 itu maka menjadi jelas bagi kita bahwa BoP dijiwai oleh proposal perdamaian yang disampaikan berbagai negara untuk tidak hanya menciptakan perdamaian di Gaza tetapi juga memperjuangkan kemerdekaan dan kedaulatan Palestina," ujar Direktur Geopolitik GREAT Institute, Dr. Teguh Santosa, dalam keterangan yang diterima redaksi.

Teguh mengatakan, di dalam Resolusi DK PBB 2803 itu disebutkan bahwa reformasi Otoritas Palestina dan pembangunan kembali Gaza akan menjadi jalan yang kredibel menuju penentuan nasib sendiri dan kemerdekaan Palestina.

Selain itu, juga akan dibangun dialog antara Israel dan Palestina untuk menyepakati cakrawala politik untuk hidup berdampingan secara damai dan sejahtera.

"Point ini sejalan dengan salah satu prinsip emas Dasasila Bandung, peaceful coexistence, atau hidup berdampingan secara damai," ujar Teguh lagi.

Dasasila Bandung yang disebutkan adalah hasil dari Konferensi Asia Afrika (KAA) tahun 1955 di Bandung, Indonesia.

Dalam kesempatan itu, Teguh juga mengatakan, pihak Palestina sendiri

versitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta itu.

Teguh mencontohkan, pertemuan pejabat baru Duta Besar Palestina Abdalfatah A.K. Alsattari dengan sejumlah tokoh dan pejabat Indonesia belakangan ini memperlihatkan kepercayaan Palestina pada langkah-langkah strategis yang diambil Presiden Prabowo Subianto.

"Saya mengimbau teman-teman



menyadari dan menghormati berbagai upaya yang dilakukan Indonesia untuk mendukung kemerdekaan negara itu dalam berbagai forum internasional, termasuk di BoP.

"Dukungan Indonesia untuk Palestina tidak perlu diragukan. Pihak Palestina pun tahu dan sangat menghormati posisi dan strategi perjuangan Indonesia," kata dosen Hubungan Internasional Uni-

versitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta itu. Teguh mencontohkan, pertemuan pejabat baru Duta Besar Palestina Abdalfatah A.K. Alsattari dengan sejumlah tokoh dan pejabat Indonesia belakangan ini memperlihatkan kepercayaan Palestina pada langkah-langkah strategis yang diambil Presiden Prabowo Subianto. "Saya mengimbau teman-teman

HAMBATAN DAN KESULITAN BOARD OF PEACE

Presiden Prabowo Subianto mengumumkan Board of Peace akan menghadapi banyak hambatan dan kesulitan. Beberapa hari kemudian ucapannya menjadi kenyataan.

Hadir dalam pertemuan perdana (Inaugural Meeting) Board of Peace (BoP) yang digelar di Donald Trump United States Institute of Peace, Washington DC, Amerika Serikat, pada Kamis, 19 Februari 2026, adalah agenda penting Presiden Prabowo dalam kunjungannya ke negeri itu. Namun, serangan militer oleh Israel dan Amerika Serikat terhadap Iran yang terjadi pada akhir Februari 2026 justru berpotensi meruntuhkan upaya de-eskalasi dan memicu krisis lebih luas.

Dominasi biru laut yang sejuk mewarnai pertemuan perdana (Inaugural Meeting) Board of Peace (BoP) di Donald Trump United States Institute of Peace, Washington DC, Amerika Serikat. Pertemuan tersebut menjadi momentum resmi peluncuran mekanisme internasional BoP sebagai platform kolaborasi global untuk mendukung stabilisasi kawasan konflik dan pemulihan pasca konflik terutama di Gaza.

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menegaskan dukungan penuh Indonesia terhadap rencana 20 poin yang diinisiasi Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebagai kerangka kerja menuju stabilisasi dan perdamaian kawasan. Kepala Negara menyampaikan bahwa sejak awal Indonesia mempelajari rencana tersebut, pemerintah Indonesia telah menyatakan kesepahaman sekaligus komitmen kuat untuk berkontribusi aktif dalam implementasinya.

"Kami berkomitmen untuk memastikan keberhasilannya. Kami memahami bahwa akan ada banyak hambatan dan berbagai kesulitan, namun kami sangat optimistis dengan kepemimpinan Presiden Trump," ujar Presiden Prabowo.

Selain itu, Indonesia menegaskan dukungannya terhadap agenda rekonstruksi dan stabilisasi jangka panjang Gaza yang berorientasi pada pemulihan kehidupan masyarakat sipil, pembangunan institusi, serta penghormatan terhadap hak-hak rakyat Palestina. Sikap tersebut sekaligus memperkuat kon-

sistensi Indonesia dalam mendorong terwujudnya visi Solusi Dua Negara sebagai jalan menuju perdamaian yang adil dan berkelanjutan di kawasan Timur Tengah.

Sedangkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam pengantarnya menegaskan pentingnya kerja sama internasional untuk memastikan masa depan yang lebih cerah bagi masyarakat di jalur Gaza, kawasan Timur Tengah, serta dunia secara luas. Ia menilai pembentukan BoP sebagai langkah strategis karena melibatkan para pemimpin negara dan



tokoh-tokoh berpengaruh dari berbagai kawasan yang memiliki komitmen kuat terhadap perdamaian.

"Namun kita bekerja bersama untuk memastikan masa depan yang lebih cerah bagi rakyat Gaza, kawasan Timur Tengah, dan seluruh dunia. Saya meyakini bahwa Board of Peace, karena sebagian besar beranggotakan para pemimpin serta tokoh-tokoh yang sangat dihormati, terutama para pemimpin negara-negara Timur Tengah, juga negara-negara dari berbagai belahan dunia," ujar Presiden Trump.

Toh apa yang dikemukakan oleh Presiden Prabowo mengenai hambatan dan berbagai kesulitan lebih dulu terjadi beberapa hari kemudian. Pada Sabtu, 28 Februari 2026 Israel dan AS melancarkan serangan terhadap Iran. Serangan ini merupakan yang kedua dilakukan pemerintahan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, sejak serangan pertama pada Juni 2025.

Kali ini serangan presisi terhadap Iran berakibat Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei menjadi korban. Lebih dari itu, implikasi serangan itu menjadi sangat luas termasuk kerawanan kawasan Timur Tengah, eskalasi harga minyak global, dan akhirnya kesinambungan Board of Peace.

Nah, beberapa jam setelah serangan ke Iran berlangsung, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Indonesia menyampaikan pernyataan resmi yang menyayangkan kegagalan perundingan Amerika Serikat-Iran sehingga terjadi serangan militer. "Indonesia menyerukan semua pihak untuk menahan diri dan mengedepankan dialog dan diplomasi. Indonesia kembali menekankan pentingnya menghormati kedaulatan dan integritas wilayah setiap negara serta menyelesaikan perbedaan melalui cara damai," demikian pernyataan Kemenlu RI pada Sabtu, 28 Februari 2026.

Lebih dari itu, Indonesia mengajukan diri menjadi fasilitator dialog para pihak. "Bagi terciptanya kembali kondisi keamanan yang kondusif, dan apabila disetujui kedua belah pihak, Presiden Indonesia bersedia untuk bertolak ke Teheran guna melakukan mediasi," demikian lanjut pernyataan itu.

Peningkatan ketegangan di Timur Tengah berpotensi mengganggu sta-

bilitas kawasan serta perdamaian dan keamanan dunia. "WNI di wilayah terdampak diimbau tetap tenang, waspada, mengikuti arahan otoritas setempat, dan menjaga komunikasi dengan Perwakilan RI terdekat," demikian lanjut pernyataan itu.

Berbagai tanggapan yang cenderung mendukung maupun meragukan inisiatif Presiden menjadi juru damai pun bermunculan. Dukungan datang antara lain dari Wakil Ketua Umum MUI KH Cholil Nafis yang menyatakan dukun-

upaya perdamaian. "Dalam Islam, menjadi juru damai sangat terhormat dan mendapatkan penghargaan dari Allah SWT. Jadi saya dukung Pak Presiden untuk berperan bebas aktif untuk mendamaikan. Sebagaimana juga dalam pesan konstitusi kita," ungkapnya.

Pengasuh Pondok Pesantren Cendekia Amanah, Depok tersebut menambahkan, Indonesia memiliki komitmen historis untuk menghapus segala bentuk penjajahan di muka bumi dan menyebarkan perdamaian global.



gan terhadap inisiatif diplomasi Presiden Prabowo, seraya menekankan pentingnya tetap berpegang pada prinsip politik luar negeri bebas aktif.

"Ya, saya mendorong Pak Presiden untuk menjadi juru damai. Akan tetapi, tentu harus mempertimbangkan kondisi bangsa kita," ujar KH Cholil Nafis sebagaimana dikutip dari laman web MUI Digital, Senin, 2 Maret 2026.

Menurut Kiai Cholil, peran sebagai mediator sejalan dengan amanat konstitusi dan ajaran Islam yang memuliakan

"Bangsa Indonesia memiliki tekad agar segala bentuk penjajahan harus dihapuskan dari muka bumi ini, termasuk juga harus menyebarkan perdamaian kepada seluruh alam semesta," ujarnya.

Sedangkan Kedutaan Besar Republik Islam Iran di Indonesia mengapresiasi dukungan konsisten pemerintah dan rakyat Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan kesiapannya menjadi juru damai untuk meredakan ketegangan militer di Timur Tengah. ●



WACANA KOPERASI DESA MERAH PUTIH DISEBUT BISA GANTIKAN RITEL MODERN

PENGAMAT INGATKAN SOAL EFISIENSI DAN SISTEM

Pernyataan sejumlah pejabat yang menyebut bahwa kehadiran program Koperasi Desa Merah Putih dapat membuat jaringan ritel modern seperti Indomaret dan Alfamart tidak lagi diperlukan, menuai respons kritis dari pelaku usaha dan pengamat ekonomi.



Pernyataan sejumlah pejabat yang menyebut bahwa kehadiran program Koperasi Desa Merah Putih dapat membuat jaringan ritel modern seperti Indomaret dan Alfamart tidak lagi diperlukan, menuai respons kritis dari pelaku usaha dan pengamat ekonomi.

Wacana tersebut dinilai penuh semangat keberpihakan kepada ekonomi desa. Namun, secara rasional, muncul pertanyaan mendasar: apakah koperasi mampu secara sistemik menggantikan efisiensi dan skala sektor swasta?

Sejumlah analis menilai persoalan utama bukan pada niat, melainkan pada model bisnis. Ritel modern bekerja dengan disiplin operasional ketat. Perputaran barang harus cepat agar stok tidak menumpuk dan margin tetap terjaga. Sistem pembayaran pun diatur strategis: penjualan dilakukan tunai ke konsumen, sementara pembayaran ke pemasok memiliki tempo tertentu, menciptakan arus kas yang sehat.

"Permintaan pasar tidak ditebak, tetapi dihitung melalui data historis dan algoritma distribusi. Tanpa sistem itu, risiko penumpukan barang di satu wilayah dan kekosongan di wilayah lain sangat besar," ujar seorang pengamat ritel.

Pengalaman masa lalu menunjukkan banyak jaringan ritel berbasis komunitas atau koperasi pernah muncul dengan semangat besar, namun akhirnya tumbang karena lemahnya pengelolaan sistem, distribusi, dan arus kas. Bahkan badan usaha milik negara (BUMN) yang mendapat dukungan modal besar dan proteksi regulasi pun kerap menghadapi tantangan efisiensi.

Di balik minimarket yang tampak sederhana, terdapat ekosistem kompleks: pusat distribusi regional, integrasi sistem ERP, pengisian ulang otomatis, negosiasi rebate dengan pemasok,

hingga program loyalitas pelanggan. Skala besar memungkinkan harga beli lebih murah dan margin lebih kuat. Inilah yang membuat jaringan seperti Indomaret dan Alfamart mampu bertahan dan mendominasi pasar nasional.

Sejumlah pelaku UMKM menilai, jika pemerintah ingin memperkuat ekonomi rakyat, pendekatan ekosistem dinilai lebih realistis ketimbang menggantikan ritel modern. Misalnya dengan membangun gudang re-

efisien.

Model ini dinilai memberi ruang kompetisi alami. Pelaku usaha yang disiplin dan adaptif akan tumbuh, sementara yang tidak efisien akan tersingkir secara wajar.

Perdebatan ini mencerminkan tantangan klasik dalam kebijakan ekonomi: antara semangat pemerataan dan tuntutan efisiensi pasar. Hingga kini, pemerintah belum merinci secara teknis bagaimana model Koperasi

"Permintaan pasar tidak ditebak, tetapi dihitung melalui data historis dan algoritma distribusi. Tanpa sistem itu, risiko penumpukan barang di satu wilayah dan kekosongan di wilayah lain sangat besar,"



gional, sistem warehouse berbasis IT, resi gudang, serta marketplace B2B yang memperkuat toko tradisional dan warung lokal agar memiliki akses distribusi dan pembiayaan yang lebih

Desa Merah Putih akan membangun sistem distribusi, manajemen stok, dan tata kelola arus kas agar mampu bersaing dengan ritel modern yang telah teruji puluhan tahun. ●



TUNTASKAN DAERAH TERTINGGAL
**MENDES YANDRI TEGASKAN
PERLU KOLABORASI**

Di tengah perayaan 80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, sebuah kenyataan pahit masih membayangi perjalanan bangsa.

Di saat gedung-gedung pencakar langit menjulang dan jaringan digital merambah kota-kota besar, masih ada saudara-saudara sebangsa yang hidup dalam gelap—tanpa listrik, tanpa sinyal internet, tanpa jalan memadai. Fakta inilah yang disorot tajam oleh Yandri Susanto, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT).

Dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Operational Room Kantor Kemendes, Rabu (25/2/2026), Yandri berbicara dengan nada tegas namun sarat keprihatinan. Ia mengingatkan bahwa usia kemerdekaan yang kian matang tidak boleh menyisakan ketimpangan yang terus diwariskan.

“Di usia 80 tahun Indonesia merdeka, masih ada saudara-saudara kita yang berstatus daerah tertinggal. Ini mesti tertinggalnya kita hapus dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Dengan cara apa? Kolaborasi,” ujarnya lantang.

Kata “kolaborasi” menjadi poros utama dalam pernyataannya. Bukan sekadar jargon, melainkan seruan untuk membongkar sekat-sekat ego sektoral yang selama ini menghambat percepatan pembangunan. Ia menggambarkan kondisi riil di sejumlah daerah tertinggal: listrik belum menjangkau rumah-rumah warga, jaringan internet tak kunjung hadir, infrastruktur jalan masih berupa tanah berbatu, dan sarana pendidikan jauh dari kata layak.

Untuk pergi ke sekolah, anak-anak di beberapa wilayah harus berjalan kaki rata-rata dua kilometer. Sementara untuk mencapai pasar sebagai pusat perniagaan, warga harus menempuh perjalanan hingga sembilan kilometer. Angka-angka itu bukan sekadar statistik—melainkan potret perjuangan harian yang senyap dan sering luput dari perhatian publik.

Mantan Wakil Ketua MPR RI itu menegaskan, rapat koordinasi ini tak boleh berakhir sebagai seremoni administratif. Ia berharap lahir rekomendasi konkret yang mampu memecah kebuntuan, sekaligus memperkuat kekompakan

lintas kementerian, pemerintah daerah, hingga sektor swasta dan filantropi.

Dalam forum tersebut, muncul pula usulan dari Koordinator Kepala Daerah berstatus tertinggal yang juga Bupati Nias Utara, Amizaro, agar para kepala daerah difasilitasi audiensi langsung dengan Presiden Prabowo Subianto. Usulan itu disambut positif oleh Yandri.

“Saya kira ini sesuatu yang luar biasa, keinginan mereka, dan kami akan komunikasikan supaya mereka bisa bertemu langsung dengan Bapak Presiden,” kata mantan Ketua Komisi VIII DPR tersebut.

Menurutnya, pertemuan langsung dengan kepala negara akan menjadi momentum

hanya dari kementerian/lembaga, tetapi juga dengan pihak-pihak lain filantropi ataupun swasta,” tegasnya.

Daerah-daerah itu tersebar di berbagai penjuru tanah air. Di Sumatera Utara, misalnya, terdapat Kabupaten Nias Utara yang masih bergulat dengan keterbatasan infrastruktur. Di Nusa Tenggara Timur, terdapat Kabupaten Sumba Tengah, Sumba Barat Daya, dan Sabu Raijua yang menghadapi tantangan serupa. Sementara di kawasan timur Indonesia, sejumlah wilayah di Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah masih masuk dalam daftar daerah tertinggal yang membutuhkan percepatan pembangunan.

Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Wakil Mendagri Ahmad Wiyagus, Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Bappenas Medrilzam, Kepala

“Di usia 80 tahun Indonesia merdeka, masih ada saudara-saudara kita yang berstatus daerah tertinggal. Ini mesti tertinggalnya kita hapus dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Dengan cara apa? Kolaborasi”



penting. Para pemimpin daerah dapat menyampaikan sendiri kondisi nyata di wilayah mereka—tanpa perantara, tanpa distorsi data—agar kebijakan yang lahir benar-benar berpijak pada realitas lapangan.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (PPDT) Kemendes PDT, Samsul Widodo, mengingatkan bahwa sesuai RPJM, masih terdapat 30 daerah berstatus tertinggal yang membutuhkan dukungan multipihak. Bukan hanya dari kementerian dan lembaga negara, tetapi juga dari sektor swasta dan filantropi.

“Masih ada 30 daerah ketinggalan yang membutuhkan dukungan, tidak

Badan Pengembangan Infrastruktur Kementerian PU Bob Arthur Lombogia, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, perwakilan Kementerian Keuangan, serta para bupati dari daerah berstatus tertinggal. Hadir pula Wakil Mendes PDT Ahmad Riza Patria dan Sekjen Taufik Madjid.

Di ruang rapat itu, harapan dan tanggung jawab bertemu. Indonesia tak lagi punya kemewahan untuk menunda. Jika kolaborasi benar-benar diwujudkan, maka jarak dua kilometer ke sekolah dan sembilan kilometer ke pasar bukan lagi simbol keterisolasian—melainkan kenangan tentang masa lalu yang berhasil ditaklukkan. ●



GRATISKAN PEMBINAAN AHLI K3 UMUM

Untuk meningkatkan keterampilan para pekerja, Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, memberikan “kado” dalam rangka peringatan Bulan K3 Tahun 2026 dengan menggratiskan pembinaan bagi 4.025 peserta dalam program Pembinaan dan Sertifikasi Ahli K3 Umum.

Menaker menegaskan, langkah ini merupakan bagian dari upaya membangun tata kelola pembinaan dan sertifikasi K3 yang lebih transparan dan dapat dijangkau lebih luas oleh masyarakat.

Menurutnya, penguatan K3 pada akhirnya kembali ke hal paling mendasar yaitu pekerja bisa bekerja dengan aman dan perusahaan mampu melindungi seluruh orang di tempat kerja secara bertanggung jawab.

Ia menjelaskan, pada tahun lalu Kemnaker sempat mendapat perhatian dan masukan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait perlunya transparansi biaya pembinaan Ahli K3 Umum.

kasi ini, peserta hanya membayar biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp420.000 untuk pengujian sertifikasi sesuai ketentuan yang berlaku, sementara pembinaan tidak dipungut biaya.

Kebijakan ini diharapkan memperluas kesempatan masyarakat untuk meningkatkan kompetensi K3 tanpa terbebani biaya pembinaan yang sebelumnya bisa mencapai jutaan rupiah.

Meski pembinaan dilaksanakan secara daring, Menaker meminta agar ujian sertifikasi tetap dilakukan secara luring guna menjaga kualitas dan kredibilitas hasilnya.

Ia menambahkan, pengelolaan K3

kan perkara sederhana.

"Bagaimana memastikan semua pekerja sudah sesuai SOP? Tidak bisa hanya berasumsi dari kantor. Di lapangan bisa saja SOP tidak tersedia atau peralatan yang seharusnya digunakan justru tidak ada, sehingga muncul improvisasi yang berisiko," ujarnya.

Menurutnya, kompleksitas tersebut kerap memicu kesalahan hingga berujung kecelakaan kerja.

"Perusahaan bertanggung jawab memastikan keselamatan seluruh pekerja. Saya ingin pekerja berangkat dari rumah untuk mencari nafkah dan kembali dalam keadaan selamat. Itu tanggung jawab perusahaan," tegasnya.



"Keilmuan K3 tidak selesai hanya dalam 12 hari. Perlu pendalaman berkelanjutan seiring semakin kompleksnya tempat kerja dan semakin beragamnya risiko"

harus dimulai dari penguatan kompetensi SDM, namun tidak berhenti pada pembinaan singkat semata.

Saat itu, biaya pembinaan bervariasi, mulai dari Rp6 juta hingga Rp8 juta atau lebih tergantung fasilitas pembinaan, karena sepenuhnya penentuan harga pembinaan ini diserahkan kepada masing-masing penyelenggara.

"Karena itu, pada Bulan K3 Nasional tahun ini Kemnaker mengambil inisiatif mengelola pembinaan secara lebih terkoordinasi bersama mitra K3, termasuk Asosiasi Lembaga Pelatihan K3 Indonesia (ALPK3I) dan Perusahaan Jasa K3 (PJK3), sekaligus menggratiskan biaya pembinaan," ujar Menaker Yassierli.

Dalam skema pembinaan dan sertifi-

kasinya, peserta hanya membayar biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp420.000 untuk pengujian sertifikasi sesuai ketentuan yang berlaku, sementara pembinaan tidak dipungut biaya.

Kebijakan ini diharapkan memperluas kesempatan masyarakat untuk meningkatkan kompetensi K3 tanpa terbebani biaya pembinaan yang sebelumnya bisa mencapai jutaan rupiah.

Meski pembinaan dilaksanakan secara daring, Menaker meminta agar ujian sertifikasi tetap dilakukan secara luring guna menjaga kualitas dan kredibilitas hasilnya. Ia menambahkan, pengelolaan K3 harus dimulai dari penguatan kompetensi SDM, namun tidak berhenti pada pembinaan singkat semata.

Dalam Rangka Bulan K3 Nasional 2026
Kemnaker dan ALPK3 INDONESIA selenggarakan

Pembinaan & Sertifikasi AHLI K3 UMUM

25 FEBRUARI - 12 MARET 2026 ONLINE CLASS

GRATIS BIAYA PEMBINAAN **UNTUK 1500** PESERTA

Cukup bayar PNBP sesuai dengan PP No. 41/2023 **Rp 420.000**

dengan rincian:

- Sertifikat Pembinaan Pelatihan K3 Rp150.000/orang
- Evaluasi (SKP) AK3 Rp120.000/orang
- Penerbitan SKP AK3 Rp150.000/dokumen

Batas Pendaftaran 16 Februari 2026

Seleksi Peserta 17 - 18 Februari 2026

Pengumuman Hasil Seleksi 19 Februari 2026

DAFTAR SEKARANG! PJK3 PEMBINAAN K3 bit.ly/AHLIK3UMUMGRATISS

SIAPkerja Kemnaker @KemnakerRI Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia kemnaker.go.id

Sementara itu, Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3, Ismail Pakaya, melaporkan jumlah pendaftar mencapai 4.581 orang, dengan 4.025 peserta dinyatakan lolos seleksi administrasi.

Pelaksanaan kegiatan dibagi dalam dua batch, yakni 2.010 peserta pada tahap pertama (Februari hingga Maret 2026) dan 2.015 peserta pada tahap kedua (April hingga Mei 2026).

Ismail menambahkan, pembinaan dirancang komprehensif dengan materi yang mencakup regulasi K3 nasional, teknik identifikasi bahaya dan pengendalian risiko, investigasi kecelakaan kerja, serta penyusunan sistem manajemen K3 yang berkelanjutan. ●



WUJUDKAN ASTA CITA DENGAN MEMPERKUAT KETAHANAN AIR NASIONAL

Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan terus memperkuat ketahanan air sebagai bagian dari implementasi Asta Cita Presiden Prabowo.

Hal itu dilakukan dengan memantapkan sistem pertahanan dan keamanan negara serta mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Dalam kerangka tersebut, ketahanan air diposisikan sebagai fondasi utama pertahanan dan ketahanan nasional.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan hal itu dalam Town Hall Meeting Water Security di Jakarta yang mempertemukan kementerian dan lembaga, akademisi, NGO, investor, profesional, serta masyarakat sipil untuk merumuskan arah kebijakan air secara terintegrasi.

"Air adalah sumber kehidupan. Kami berdiskusi tidak hanya antar kementerian dan lembaga, tetapi juga melibatkan akademisi, NGO, investor, profesional, hingga masyarakat sipil. Karena air adalah persoalan bersama. Kita ingin menghadirkan air yang memadai untuk kebutuhan hidup manusia dan untuk pertumbuhan ekonomi," ujar Menko AHY.

Ia menekankan sekitar 74 persen pemanfaatan air nasional digunakan untuk sektor agrikultur, mulai dari pertanian hingga peternakan. Karena itu, kebijakan yang tepat dan implementasi yang efektif menjadi kunci dalam mendukung swasembada pangan serta memperkuat ketahanan nasional.

Sebagai landasan kebijakan, pemerintah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air dengan tiga fokus utama: konservasi, pemanfaatan, dan mitigasi daya rusak air.

Konservasi dilakukan melalui perlindungan daerah tangkapan air, pengendalian pencemaran, dan penghematan penggunaan guna menjaga keberlanjutan sumber daya air. Pemanfaatan diarahkan secara adil, efisien, dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, pertanian, industri, dan energi tanpa mengabaikan keseimbangan ekosistem.

Mitigasi daya rusak air difokuskan pada pengurangan risiko banjir, kekeringan, dan erosi melalui perencanaan yang tepat, penguatan infrastruktur pengendali, serta peningkatan kesiapsiagaan.

Untuk mencapai swasembada air, pemerintah menyiapkan empat intervensi strategis. Pertama, dekarbonisasi guna menjaga stabilitas iklim dan mengurangi risiko cuaca ekstrem.

Kedua, penegakan tata ruang dan perlindungan daerah tangkapan air agar fungsi resapan di hulu tetap terjaga.

Ketiga, optimalisasi infrastruktur eksisting melalui pengerukan sedimentasi, pemeliharaan waduk, dan penataan sempadan sungai.

Keempat, peningkatan efisiensi serta pengendalian kualitas air agar pasokan dan kebutuhan tetap seimbang.

Menko AHY menegaskan pendekatan ini bertujuan memulihkan siklus air secara menyeluruh dari hujan yang terserap menjadi cadangan, dimanfaatkan secara produktif, hingga dialirkan kembali secara aman.



Dalam forum tersebut, inovasi teknologi turut menjadi perhatian. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Prof. Arif Satria memaparkan pemanfaatan teknologi untuk menghemat penggunaan air sekaligus mengonversi air kotor menjadi air bersih.

Sementara itu, Kementerian PU telah memiliki roadmap pembangunan dan pemeliharaan bendungan serta infrastruktur air guna memastikan keberlanjutan fungsi layanan.

"Tadi disampaikan Prof. Arif dari BRIN, banyak teknologi terkini yang bisa digunakan untuk menghemat air sekaligus mengonversi air kotor menjadi air bersih. Kementerian PU juga memiliki roadmap, apa saja yang sudah dikerjakan, berapa bendungan yang telah dibangun, dan bagaimana memastikan tidak hanya membangun, tetapi juga memelihara dalam jangka panjang," tambah Menko AHY.

Utusan Khusus Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Isu Air, Retno Marsudi, turut menyampaikan pandangan dari perspektif global mengenai ketahanan air.

Ia menekankan pentingnya menjadikan agenda air global sebagai aksi nyata yang terukur. Berbagi pengalaman dari pertemuannya terkait persiapan UN

Water Conference di Senegal beberapa waktu lalu, ia menegaskan konferensi mendatang harus menghasilkan implementasi konkret, bukan sekadar komitmen.

"Pada saat nanti ada UN Water Conference, maka this conference should be an action-oriented conference," tegasnya.

Ia juga memaparkan besarnya tantangan global dalam sektor air dan sanitasi, termasuk keterkaitannya dengan sektor pertanian, energi, industri, dan ekonomi digital. Kompleksitas tersebut menuntut perubahan pendekatan dari sektoral menjadi kolaboratif dan terintegrasi. ●



PEMULIHAN PASCA BENCANA SUMATERA BANYAK KEMAJUAN

Proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di tiga provinsi Sumatera menunjukkan tanda-tanda menggembirakan. Salah satu indikasinya adalah berkurangnya secara signifikan jumlah warga pengungsi.

Jumlah pengungsi bencana di Sumatera mengalami penurunan yang sangat signifikan pada akhir Februari 2026. Berdasarkan laporan terbaru dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian Dalam Negeri, jumlah pengungsi berkurang drastis hingga lebih dari 95 persen dari total awal yang sempat mencapai sekitar dua juta jiwa.

Per 27 Februari 2026, jumlah pengungsi dilaporkan tersisa sekitar 11.000 hingga 12.994 jiwa secara keseluruhan di wilayah terdampak. Angka ini turun tajam dari posisi Januari 2026 yang masih berada di angka 111.788 jiwa dan awal Februari yang tercatat 47.000 jiwa.

Penurunan terjadi di tiga provinsi utama, yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Saat ini, 38 daerah terdampak telah dinyatakan kembali ke status normal.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M Tito Karnavian selaku Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rekonstruksi dan Rehabilitasi (PRR) Pascabencana Wilayah Sumatera mengungkapkan jumlah pengungsi di tiga provinsi turun signifikan dari semula 2.108.582 menjadi 11.250 orang. Adapun jumlah pengungsi tersebut dengan rincian 10.400 pengungsi di Provinsi Aceh, serta 850 pengungsi di Provinsi Sumatera Utara (Sumut).

"Di Provinsi Sumatera Barat, alhamdulillah tidak ada lagi pengungsi dalam catatan kami. Tidak ada lagi pengungsi yang ada di tenda, semuanya sudah ada di huntera," kata Tito dalam keterangannya dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Wilayah Sumatera di Gedung Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) di Jakarta, Jumat, 27 Februari 2026.

Hadir dalam rapat kali ini antara lain Menteri Koordinator (Menko) PMK Pratikno, Menko Bidang Politik dan Keamanan Djamarri Chaniago, Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, serta pihak terkait dari kementerian/lembaga dan Pemda.

Toh Mendagri Tito mengakui masih ada lima desa di dua provinsi yang perlu ditata ulang akibat terdampak bencana. Tiga desa di antaranya berlokasi di Provinsi Aceh dan dua desa lainnya di Sumut. Sedangkan di Sumbar tidak ada desa yang perlu ditata ulang.

Secara umum Tito melaporkan, dari 52 kabupaten/kota terdampak bencana, 38 kabupaten dan kota kini kondisinya berangsur normal. Tiga kabupaten/kota berada di kondisi mendekati normal. Sedangkan 11 kabupaten/kota masih memerlukan perhatian khusus.

Tito menjelaskan, indikator normalitas suatu daerah ditentukan oleh beberapa variabel. Beberapa antaranya adalah fungsi pemerintahan, layanan publik, akses darat, ekonomi, sosial,

"Kalau pasar sudah bergerak semua, jalan, tapi UMKM-nya belum (optimal sepenuhnya). Masih tugas kita lagi ada pembersihan lumpur, ada jembatan, jalan desa, daerah yang perlu kita selesaikan," ungkap Tito menyinggung soal konektivitas (jaringan perhubungan) dan mobilitas (pergerakan).

Berdasarkan data Satgas PRR per 23 Februari 2026, pemulihan konektivitas difokuskan pada infrastruktur fisik berupa perbaikan jalan dan jembatan, serta perbaikan infrastruktur listrik, telekomunikasi, base transceiver station (BTS), dan jaringan internet. Rinciannya, dari 38 jalan nasional yang terdampak di Aceh, seluruhnya telah beroperasi fungsional. Begitu juga dari 17 jembatan nasional yang terdampak, seluruhnya sudah



dan indikator dasar lain meliputi SPBU, listrik, PDAM, internet, gas LPG, TPA-TPST, Bank Sampah, serta normalisasi sungai. "Sebelumnya ada satu lagi yaitu masalah persawahan dan perkebunan yang juga terdampak serta tambak, perikanan," sambungnya.

Meski rehabilitasi dan rekonstruksi masih terus berlangsung, Tito mengapresiasi jajaran kementerian/lembaga serta pemerintah daerah (Pemda) yang telah bekerja sama mendorong pemulihan pasca bencana. Ia memastikan, saat ini perkembangan rekonstruksi dan rehabilitasi pasca bencana menunjukkan progres positif, terutama pada aspek akses jalan yang telah berfungsi sepenuhnya, aliran listrik yang dapat dimanfaatkan masyarakat, hingga SPBU yang telah beroperasi normal.

dapat digunakan secara fungsional. Sedangkan untuk jalan daerah, dari 1.637 yang terdampak, sebanyak 1.521 di antaranya atau 92 persen telah beroperasi fungsional. Sementara itu, dari 650 jembatan daerah yang terdampak, sebanyak 351 atau 54 persen sudah beroperasi fungsional.

Progres serupa juga sedang disebut di Sumatera Utara. Dari 30 jalan nasional yang terdampak, seluruhnya sudah beroperasi fungsional. Begitu juga dengan 5 jembatan terdampak yang seluruhnya sudah dapat digunakan secara fungsional. Sedangkan untuk jalan daerah, dari 616 yang terdampak, sebanyak 607 atau 98 persen sudah beroperasi fungsional. Sementara dari 366 jembatan terdampak, 344 atau 93 persen sudah beroperasi fungsional. ●



PUTRA DAERAH KINI LEBIH BERPELUANG JADI DOKTER SPESIALIS

Kementerian Kesehatan RI terus memperkuat sistem kesehatan nasional melalui percepatan pemenuhan kebutuhan dokter spesialis dengan pendekatan kebijakan afirmatif bagi putra-putri daerah, terutama dari daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan (DTPK).

Kebijakan afirmatif dilakukan untuk menekan hambatan biaya pendidikan sekaligus membuka akses pendidikan kedokteran spesialis bagi calon tenaga medis yang berasal dari keluarga kurang mampu.

Upaya tersebut dilatarbelakangi oleh masih belum meratanya jumlah dan distribusi dokter spesialis di berbagai wilayah Indonesia. Berdasarkan proyeksi hingga tahun 2032, Indonesia masih mengalami kekurangan hampir 65 ribu dokter spesialis. Pemenuhannya diperkirakan membutuhkan waktu lebih dari 10 tahun apabila tidak dilakukan terobosan strategis.

Sebagai langkah percepatan, Kementerian Kesehatan meluncurkan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama (PPDS RSPPU) pada 6 Mei 2024. Program ini dirancang untuk mempercepat produksi lulusan dokter spesialis sekaligus mendorong pemerataan distribusi yang lebih responsif terhadap kebutuhan daerah.

Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin, menegaskan bahwa tantangan utama transformasi pelayanan kesehatan tidak hanya terletak pada infrastruktur, tetapi juga pada ketersediaan dan distribusi tenaga medis spesialis.

"Kita akan memasang alat-alat kesehatan modern di seluruh kabupaten dan kota, baik di Jawa maupun luar Jawa. Namun, alat saja tidak cukup. Yang paling menentukan adalah ketersediaan dokter spesialis yang merata sesuai kebutuhan daerah" ujar Menkes saat membacakan Orientasi PPDS Batch II TA 2025-2026 dan Serah Terima ke RSPPU di Kantor Kementerian Kesehatan.

Dalam konteks afirmasi akses, PPDS RSPPU merekrut putra-putri daerah yang telah bekerja di rumah sakit dan memang dibutuhkan layanannya. Rekrutmen dilakukan berbasis kebutuhan pelayanan, bukan latar belakang ekonomi, suku, agama, maupun status sosial.

"Yang kita rekrut adalah putra-putri daerah yang bekerja di rumah sakit dan memang dibutuhkan layanannya, bukan berdasarkan latar belakang ekonomi, suku, agama, atau status sosial," tegasnya.

PPDS RSPPU telah menyelenggarakan enam program studi di enam rumah

sakit pendidikan, yaitu RSAB Harapan Kita (Ilmu Kesehatan Anak), RSJPD Harapan Kita (Jantung dan Pembuluh Darah), RS Pusat Otak Nasional (Neurologi), RSK Dharmais (Onkologi Radiasi), RS Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso (Ortopedi dan Traumatologi), serta RS Mata Cicendo (Ilmu Kesehatan Mata).

Sebanyak 58 peserta didik mengikuti batch ke-3, sehingga total terdapat 167 peserta didik yang saat ini menempuh pendidikan pada RSPPU.

Pada tahun 2026, Kementerian Kesehatan akan memperluas penyelenggaraan PPDS RSPPU ke 52 rumah sakit pendidikan dengan total 55 program studi. Perluasan ini difokuskan pada tujuh spesialis dasar serta bidang Keseha-

kan secara kolaboratif lintas kementerian/lembaga sesuai ketentuan dalam SKB Menteri Kesehatan dan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Seleksi peserta didik PPDS RSPPU direncanakan kembali dibuka pada Agustus 2026.

Dalam menjaga mutu, penyelenggaraan PPDS RSPPU mengacu pada standar nasional dan internasional. Rumah sakit pendidikan penyelenggara utama telah memperoleh akreditasi internasional dari Accreditation Council for Graduate Medical Education (ACGME) dan diawasi secara nasional oleh LAM-PTKes untuk menjamin kualitas pendidikan, pelayanan klinis, serta profesionalisme peserta didik.



tan Jantung, Stroke, Uro-Nefrologi, dan Kesehatan Ibu dan Anak (KJSU-KIA), guna menjawab kebutuhan layanan prioritas nasional, termasuk di daerah 3T.

Pendidikan PPDS RSPPU pada hakikatnya merupakan pendidikan residensi, yaitu pendidikan profesi berbasis pelayanan klinis yang menempatkan peserta didik sebagai dokter residen yang belajar melalui praktek langsung dalam sistem pelayanan kesehatan. Model ini memastikan lulusan memiliki kompetensi klinis yang kuat, siap bekerja dalam berbagai kondisi fasilitas kesehatan, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Proses rekrutmen dan seleksi dilaku-

Dari sisi pendanaan, program ini didukung melalui beasiswa LPDP, bantuan pembiayaan pendidikan dari Kementerian Kesehatan, serta insentif dari rumah sakit bagi para residen. Skema ini menjadi bagian dari upaya menekan beban biaya pendidikan agar akses pendidikan spesialis tidak hanya dinikmati kalangan tertentu.

"Dokter spesialis adalah profesional yang bekerja dan dilatih agar semakin mahir, bukan murid yang harus membayar biaya pendidikan yang mahal. Ini perubahan paradigma yang penting agar pendidikan spesialis tidak hanya bisa diakses oleh kalangan tertentu," kata Menkes. ●



GAGAS PERPANJANGAN TENOR RUMAH SUBSIDI 30 TAHUN

Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyiapkan kebijakan baru berupa perpanjangan tenor cicilan rumah subsidi hingga 30 tahun.



Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas akses kepemilikan hunian yang lebih terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) maupun masyarakat berpenghasilan tanggung (MBT).

Menteri PKP Maruarar Sirait (Menteri Ara) menyampaikan bahwa perpanjangan tenor ini menjadi terobosan penting dalam program pembiayaan perumahan nasional. "Selama ini tenor maksimal 15 atau 20 tahun. Sekarang kita perpanjang sampai 30 tahun supaya cicilan makin ringan. Ini bentuk nyata keberpihakan pemerintah kepada rakyat," ujar

hingga 30 tahun.

Dukungan atas kebijakan ini juga disampaikan oleh Menteri Keuangan Purbaya, yang menilai perpanjangan tenor menjadi strategi efektif untuk memperluas akses kredit perumahan rakyat.

"Kami mendukung langkah Kementerian PKP dan BP Tapera untuk memperpanjang tenor menjadi 30 tahun. Dengan begitu cicilan akan lebih murah, DP bisa lebih rendah, dan masyarakat semakin mudah membeli rumah," ujar Menteri Purbaya.

Dengan kebijakan perpanjangan tenor hingga 30 tahun ini, pemerintah berharap semakin banyak masyarakat Indonesia bisa memiliki hunian yang layak dan terjangkau, sejalan dengan

juga menyampaikan seperti yang disampaikan Presiden Prabowo, bahwa apa yang terjadi hari ini tidak lepas dari pemerintahan sebelumnya. Bedanya, di zaman sekarang kita padukan dengan program-program lain," ujar Menteri Ara Rapat Koordinasi Program Perumahan di Kantor Kementerian Dalam Negeri.

Menteri Ara menegaskan, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, mulai tahun 2026 seluruh program perumahan harus menggunakan data dari Badan Pusat Statistik (BPS).

"Tidak ada lagi lobi-lobi dari Pemda. Semua berbasis data BPS agar berkeadilan, dengan mempertimbangkan jumlah penduduk dan tingkat kemiskinan di setiap kabupaten dan kota," ujarnya.

Selain perbaikan rumah, masyarakat penerima manfaat juga akan mendapat dukungan pembiayaan mikro melalui SMF dan PNM. Tujuannya agar warga yang ekonominya tumbuh mampu merawat rumahnya sehingga tidak kembali kumuh.

"Program SMF ini unggulan karena telah memberikan penurunan bunga sebesar 5% bagi sekitar 16,2 juta rakyat, terutama ibu-ibu di daerah. Ini kebijakan yang sangat progresif dan belum pernah terjadi sebelumnya," ungkap Menteri Ara.

Menteri Ara juga mengarahkan agar program renovasi rumah atau BSPS menyerap produk dalam negeri, termasuk genteng produksi rakyat.

Ia juga menyinggung pentingnya inovasi dalam pembangunan perumahan, termasuk melalui model rumah susun subsidi di kawasan Meikarta.

"Kalau kita bisa buat program baru seperti rumah susun subsidi di Meikarta, saya sangat senang. Karena di sini tanahnya merupakan hibah dari pengusaha kepada negara, seluas sekitar 30 hektare. Ini termasuk hibah terbesar tahun ini," jelas Menteri Ara.

Menutup arahnya, Menteri Ara meminta Dirjen Kawasan Permukiman Fitrah Nur untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah dalam menentukan lokasi prioritas penanganan kawasan kumuh di seluruh Indonesia.

"Kami ingin semua program perumahan benar-benar mengurangi beban rakyat. Karena tujuan akhirnya adalah kesejahteraan dan kemandirian masyarakat," pungkasnya. ●



Menteri Ara usai Rapat Komite Tapera di Jakarta.

Ia menambahkan, kebijakan ini melengkapi berbagai kemudahan yang sudah diberikan pemerintah, seperti pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), pembebasan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk MBR, serta PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk pembelian rumah atau apartemen baru senilai hingga Rp2 miliar yang diperpanjang hingga tahun 2027.

Selain untuk MBR, pemerintah juga tengah menyiapkan skema pembiayaan khusus bagi Masyarakat Berpenghasilan Tanggung (MBT) dengan suku bunga tetap 7% selama 15 tahun dan tenor

komitmen Presiden Prabowo untuk menghadirkan rumah bagi seluruh rakyat Indonesia.

Ajak Pemda Sinergikan Program Perumahan Rakyat

Menteri Ara juga mengajak seluruh pemerintah daerah di Indonesia untuk bersinergi dalam menjalankan program perumahan rakyat yang terpadu dan berkeadilan. Dimana program perumahan yang dijalankan pemerintah saat ini merupakan hasil kesinambungan dari kebijakan pemerintahan sebelumnya, namun kini dipadukan dengan berbagai program baru agar dampaknya semakin luas bagi rakyat.

"Mohon sinergi kita semua. Saya



KINERJA APBN SOLID, PENDAPATAN TUMBUH 9,5%

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi menyampaikan realisasi APBN hingga 31 Januari 2026 yang menunjukkan kinerja solid dan tetap terjaga di tengah dinamika ekonomi. Pendapatan negara tercatat mencapai Rp172,7 triliun atau setara dengan 5,5% dari target APBN, tumbuh positif sebesar 9,5% dibandingkan periode yang sama tahun lalu (year-on-year).

Pertumbuhan pendapatan ini didorong oleh kuatnya penerimaan perpajakan serta mulai pulihnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Secara khusus, Menkeu menyoroti pertumbuhan pajak yang melonjak signifikan sebesar 30,7% pada bulan Januari lalu.

"Ini artinya ada perbaikan ekonomi maupun ada perbaikan sedikit atau banyak dari efisiensi pengumpulan pajak di Ditjen Pajak. Saya harap ke depannya akan berlanjut terus," ujar Menteri Keuangan dalam paparan Konferensi Pers APBN Kita di Jakarta.

Dari sisi belanja negara, pemerintah melakukan akselerasi besar-besaran dengan realisasi mencapai Rp227,3 triliun atau 5,9% dari pagu APBN. Angka ini tumbuh tinggi sebesar 25,7% (yoy), yang dialokasikan untuk mendukung berbagai program prioritas, menjaga daya beli masyarakat, serta memacu pertumbuhan ekonomi sejak triwulan pertama.

Terkait postur fiskal, posisi defisit APBN per akhir Januari 2026 berada di angka Rp54,6 triliun atau hanya 0,21% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Menkeu menegaskan bahwa angka defisit tersebut masih sangat terkendali dan sesuai dengan desain APBN 2026. Sementara itu, keseimbangan primer mencatatkan defisit sebesar Rp4,2 triliun, yang menunjukkan pengelolaan fiskal yang tetap prudent atau berhati-hati.

Untuk mendukung kebutuhan anggaran, realisasi pembiayaan telah mencapai Rp105,1 triliun (15,2% dari target). Pembiayaan ini dilakukan secara terukur dan antisipatif guna menjaga likuiditas serta stabilitas pasar keuangan nasional.

"Secara keseluruhan, APBN 2026 tetap berfungsi optimal sebagai shock absorber sekaligus motor penggerak ekonomi. Kami optimis APBN akan terus menjaga stabilitas dan mendukung momentum pertumbuhan ekonomi nasional sepanjang tahun 2026," tutup sang Bendahara Negara.

Realisasi Belanja Negara Tumbuh Signifikan

Wakil Menteri Keuangan (Wamen-

keu) Suahasil Nazara melaporkan kinerja APBN yang ekspansif pada awal tahun 2026. Hingga Januari 2026, realisasi belanja negara tercatat mencapai Rp227 triliun, tumbuh signifikan sebesar 25,7% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Akselerasi belanja ini diharapkan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional di triwulan I-2026, terutama melalui penguatan konsumsi rumah tangga dan investasi infrastruktur.

Salah satu poin utama dalam realisasi belanja pemerintah pusat yang menca-

Gizi (SPPG) yang tersebar di seluruh Indonesia," ujar Suahasil.

Sektor pendidikan tetap menjadi prioritas dengan realisasi sebesar Rp56,5 triliun dari total pagu Rp769,1 triliun. Anggaran ini dialokasikan untuk PIP, KIP Kuliah, tunjangan profesi guru dan dosen, hingga operasional sekolah (BOS). Pemerintah juga menargetkan pembangunan 104 sekolah rakyat baru serta revitalisasi hampir 12.000 sekolah dengan anggaran Rp17,6 triliun tahun ini.

Di sisi infrastruktur, pemerintah mengalokasikan pagu sebesar

"Ini artinya ada perbaikan ekonomi maupun ada perbaikan sedikit atau banyak dari efisiensi pengumpulan pajak di Ditjen Pajak. Saya harap ke depannya akan berlanjut terus"



pai Rp131,9 triliun adalah peningkatan tajam pada pos bantuan sosial (bansos) dan belanja barang. Realisasi bansos mencapai Rp9,5 triliun, naik lebih dari dua kali lipat dibanding Januari tahun lalu (Rp4,1 triliun). Hal ini dipicu oleh percepatan penyaluran PKH Triwulan I yang sudah dimulai sejak Januari.

Sementara itu, program unggulan Makan Bergizi Gratis (MBG) mencatatkan realisasi sebesar Rp19,5 triliun pada Januari 2026. Angka ini melonjak drastis dibandingkan Januari 2025 yang saat itu baru mencapai Rp45 miliar. "Per 21 Februari 2026, program MBG telah menjangkau 60,24 juta penerima melalui 23.678 Satuan Pelayanan Perangkat

Rp434,8 triliun untuk tahun 2026 dengan fokus pada swasembada pangan, energi, dan konektivitas. Proyek strategis mencakup pembangunan bendungan, jaringan irigasi, cetak sawah, serta pembangunan jalan dan jembatan melalui Kementerian PU. Untuk menjaga stabilitas harga dan stok pangan, pemerintah telah mencairkan Rp22,7 triliun kepada Perum Bulog per 31 Januari 2026 untuk penyerapan gabah dan beras petani.

Sementara itu, realisasi Transfer ke Daerah (TKD) mencapai Rp95,3 triliun. Khusus untuk wilayah terdampak bencana di Sumatera (Aceh, Sumut, dan Sumbar), pemerintah memberikan relaksasi syarat penyaluran dan menyiapkan tambahan alokasi sebesar Rp10,65 triliun yang akan mulai dicairkan bertahap pada akhir Februari 2026. ●



TEKANKAN 4 FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN ANGKUTAN LEBARAN 2026

Ada empat faktor penting penentu keberhasilan dalam penyelenggaraan angkutan Lebaran 2026. Keempat faktor inilah menjadi perhatian Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi dengan banyak melakukan koordinasi kepada semua pihak termasuk ke pemerintah daerah.

Keempat faktor yang dimaksud yakni keselamatan dan keamanan, perhatian terhadap hal detail, sinergi dan kolaborasi, serta kewaspadaan terhadap ketidakpastian dan potensi gangguan di lapangan.

Menhub Dudy menegaskan, aspek keselamatan dan keamanan merupakan prioritas utama yang harus diwujudkan melalui langkah antisipatif dan mitigatif guna meminimalkan risiko kecelakaan maupun gangguan keamanan.

Berikutnya, Menhub juga menekankan pentingnya perhatian terhadap hal detail dalam setiap tahapan persiapan.

“Walaupun merupakan tradisi tahunan kita, mungkin Bapak dan Ibu sudah bertahun-tahun menyelenggarakan angkutan Lebaran. Namun saya berharap bahwa hal-hal yang kecil juga harus menjadi perhatian dan kita tidak remeh terhadap hal-hal yang kecil,” ungkapnya.

Selanjutnya adalah sinergi dan kolaborasi yang solid antar pemangku kepentingan. Menurut Menhub Dudy, koordinasi yang kuat menjadi kunci kelancaran penyelenggaraan angkutan Lebaran.

“Sinergi dan kolaborasi sebagaimana yang saya saksikan pada malam hari ini dan Alhamdulillah dengan koordinasi yang solid serta sinergi yang kuat antara seluruh pemangku kepentingan. Kami berharap bahwa penyelenggaraan angkutan Lebaran tahun ini akan berjalan dengan baik,” kata Menhub.

Sejak awal Februari 2026, Kemenhub telah melakukan serangkaian koordinasi dan sinergi dengan berbagai kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan terkait.

Menhub Dudy telah melakukan koordinasi dengan sejumlah kementerian/lembaga antara lain Kemenko Polhukam, Kemenko PMK, KemenPAN RB, Kemaker, Kemenristek, Kemendikdasmen, Kemendagri, Kemendag, Komdigi, Kemenag, serta TNI dan Polri.

Dilakukan juga koordinasi dengan sejumlah pemerintah daerah antara lain Provinsi DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Banten, Lam-

pung serta Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian koordinasi dengan Pemerintah Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Selatan dan beberapa daerah lainnya.

Koordinasi tersebut menghasilkan sejumlah kebijakan antara lain pemberian stimulus diskon tarif transportasi, penerapan flexible working arrangement (FWA), pengaturan operasional angkutan barang, penggunaan masjid sebagai rest area, penguatan keamanan, hingga antisipasi titik rawan seperti perlintasan sebidang, pasar tumpah, serta lokasi wisata.

Kementerian Perhubungan memprediksi, pergerakan terbesar pemudik be-

diimplementasikan secara konsisten oleh seluruh pihak.

“Harapan kita bersama, jika keempat faktor penting ini diperhatikan dengan seksama, bukan tidak mungkin tujuan kita bersama yaitu zero accident and zero fatality dapat kita wujudkan,” sebutnya.

Lebih lanjut, Menhub memberikan arahan dan berpesan pada saat pelaksanaan angkutan Lebaran 2026, perlu dilakukan antisipasi lokasi kemacetan yang terjadi di jalur arteri seperti pasar tumpah.

Setidaknya, lokasi yang perlu diantisipasi terdapat pada 4 lokasi di Banten, 25 lokasi di Jawa Barat, 12 lokasi di Jawa



“Terakhir adalah always expect uncertainty and irregularities. Cuaca ekstrem, bencana alam yang dapat terjadi kapan saja, berpotensi menimbulkan gangguan pada transportasi”

rasal dari Jawa Barat sebanyak 30,97 juta orang, diikuti DKI Jakarta (19,93 juta) dan Jawa Timur (17,12 juta). Sedangkan dari sisi tujuan, arus terbesar mengarah ke Jawa Tengah sebesar 38,71 juta orang, Jawa Timur (27,29 juta) dan Jawa Barat (25,09 juta). Angka tersebut didapatkan berdasarkan hasil survei Badan Kebijakan Transportasi (BKT) Kemenhub.

“Terakhir adalah always expect uncertainty and irregularities. Cuaca ekstrem, bencana alam yang dapat terjadi kapan saja, berpotensi menimbulkan gangguan pada transportasi,” tegasnya.

Menhub Dudy menyampaikan harapan agar keempat faktor tersebut dapat

Tengah, 6 lokasi di Yogyakarta, serta 9 lokasi di Jawa Timur. Begitu juga dengan daerah lain yang berpotensi mengalami kemacetan karena pasar tumpah.

“Adapun antisipasi kemacetan dapat dilakukan dengan memperkuat koordinasi dan antisipasi lokasi pasar tumpah, serta pengendalian dan pengaturan hambatan samping di jalan nasional seperti kios pedagang dan alat transportasi tradisional becak dan delman,” ucap Menhub.

Kemudian menurut Menhub, yang perlu diantisipasi juga adalah peningkatan arus di daerah wisata. Diperkirakan, akan terjadi peningkatan signifikan di Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, serta Jawa Timur. Pergerakan ini biasanya terjadi setelah hari pertama Lebaran. ●



EKSPOR BERAS HAJI NUSANTARA KE ARAB SAUDI

Pemerintah akan mengekspor beras ke Arab Saudi sebanyak 2.280 ton dengan nilai sekitar Rp150 miliar pada akhir Februari 2026. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan alias Zulhas menyebut pengiriman ini menjadi ekspor perdana beras Indonesia ke negara tersebut.

“Untuk perdana ini kira-kira 2.000 ton, 2.280 ton ya. Nanti lanjut akan Malaysia dan lain-lain, tapi ini perdana ke Arab Saudi 2.280 ton,” ujar Zulhas.

Ia mengatakan pengiriman tahap pertama dijadwalkan mulai diberangkatkan pada 28 Februari 2026 dan akan diluncurkan secara resmi.

Ekspor tersebut merupakan hasil koordinasi lintas kementerian/lembaga, termasuk Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Perdagangan (Kemendag), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), serta sejumlah BUMN.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menjelaskan beras yang dikirim merupakan pasokan untuk

mencapai sekitar Rp150 miliar. Rizal menyebut peluang pasar beras Indonesia di Arab Saudi cukup besar, terutama karena banyaknya warga Indonesia yang tinggal di negara tersebut serta tingginya jumlah jemaah umrah asal Indonesia yang diperkirakan hampir 2 juta orang per tahun.

“Jadi jemaah umrah Indonesia itu estimasi hampir 2 juta orang per tahun. Oleh karena itu banyak pengusaha-pengusaha sana yang tertarik untuk setelah nanti ada ekspor beras haji akan dilanjutkan dengan ekspor beras umrah dan untuk masyarakat yang ada di Saudi Arabia,” jelas Rizal.

Permintaan diperkirakan akan

Bantah Isu Beras Impor Amerika Serikat

Menko Pangan Zulkifli Hasan juga membantah tegas kabar yang menyebutkan Indonesia mengimpor beras dari Amerika Serikat. Ia memastikan hingga saat ini tidak ada beras impor yang masuk ke Tanah Air.

“Ekspor! Indonesia ekspor beras, bukan impor. Impor tidak ada satu butir pun. Jadi tanggal 28, kita akan ekspor ke Arab Saudi 2.280 ton. Impor nol, tidak ada,” tegasnya.

Dengan penegasan tersebut, pemerintah berharap masyarakat tidak terpengaruh isu yang tidak sesuai fakta dan tetap percaya pada kebijakan pangan



kebutuhan konsumsi jemaah haji Indonesia di Arab Saudi. Pengiriman dilakukan dalam dua gelombang.

“Dukungan beras haji dengan total jumlah sesuai dengan permintaan dari Kementerian Haji adalah 2.280 ton yang akan kami berangkatkan, direncanakan tanggal 28 Februari 2026 gelombang pertama dan gelombang keduanya tanggal 4 Maret 2026,” kata Rizal.

Ia menjelaskan pengiriman dilakukan sesuai prosedur ekspor dan telah berkoordinasi dengan Kemendag.

Beras dikirim dari Pelabuhan Tanjung Priok menuju Pelabuhan Jeddah, sementara distribusi lanjutan hingga ke dapur penyedia konsumsi jemaah haji menjadi tanggung jawab importir di Arab Saudi. Terdapat dua importir yang menangani distribusi tersebut.

Nilai ekspor perdana itu diperkirakan

berkembang untuk kebutuhan jemaah umrah dan masyarakat umum, termasuk melalui jaringan ritel modern di negara tersebut. Beberapa jaringan supermarket besar yang disebut telah mengkonfirmasi minat menyerap beras Indonesia antara lain Bin Dawood di Madinah dan Lulu Hypermarket Saudi Arabia.

Untuk mendukung distribusi jangka panjang, Bulog juga menyiapkan pembangunan fasilitas penyimpanan beras di Arab Saudi. Kementerian Haji dan Umrah telah memberikan izin penyediaan lahan sekitar 2 hingga 3 hektare di kawasan Kampung Haji yang direncanakan menjadi kawasan berikat.

“Ekspor! Indonesia ekspor beras, bukan impor. Impor tidak ada satu butir pun. Jadi tanggal 28, kita akan ekspor ke Arab Saudi 2.280 ton. Impor nol, tidak ada”

nasional yang saat ini tengah diperkuat.

Indonesia tidak melakukan impor beras dari AS, walaupun ada hanya sebesar 1.000 ton tidak signifikan atau hanya sekitar 0,00003 persen dari total produksi beras nasional yang mencapai 34,69 juta ton tahun 2025. Sebagai perbandingan, produksi beras nasional pada 2025 mencapai 34,69 juta ton.

Pemerintah Indonesia juga memberikan klarifikasi bahwa impor ayam dilakukan dalam bentuk live poultry untuk kebutuhan grand parent stock (GPS). Jumlah impor GPS tercatat sebanyak 580.000 ekor dengan estimasi nilai sekitar 17–20 juta dolar AS. ●



KEPEMIMPINAN TRANSFORMATIF KUNCI KEDAULATAN PERTANIAN

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa kepemimpinan yang berani mengubah sistem pertanian menjadi pondasi utama dalam menjaga kedaulatan pangan sekaligus mendorong lompatan ekonomi nasional.

Mentan Amran menegaskan bahwa kepemimpinan bukan sekadar jabatan struktural, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan integritas dan keberanian mengambil keputusan.

“Memimpin itu indah dalam mimpi, tetapi tidak mudah dalam kenyataan. Pemimpin yang adil dimuliakan, yang tidak adil kehilangan kehormatan,” ujarnya.

Ia berbagi perjalanan panjangnya di berbagai lini pengabdian, mulai dari birokrat lebih dari dua dekade, tiga periode di kabinet, dua puluh tahun sebagai pengusaha, hingga lebih dari satu dekade sebagai dosen. Ia juga pernah menjadi penyuluh pertanian lapangan selama bertahun-tahun. Menurutnya,

nyederhanaan distribusi. Sistem yang sebelumnya panjang kini dipangkas sehingga lebih efisien dan transparan, hanya melibatkan Kementerian Pertanian, PT Pupuk Indonesia, serta Gapoktan atau pengecer sebagai ujung distribusi kepada petani.

Reformasi tersebut menurunkan biaya pupuk bersubsidi hingga 20 persen serta meningkatkan volume pupuk 700 ribu ton tanpa tambahan anggaran. Langkah ini memperkuat kepastian pasokan dan meningkatkan efisiensi di tingkat petani.

Secara khusus, Mentan Amran menilai peluang hilirisasi kelapa semakin besar seiring terjadinya pergeseran pola konsumsi pangan global, termasuk di China, yang mulai beralih dari susu he-

katanya.

Sementara pada komoditas CPO, Indonesia menguasai sekitar 60-70 persen pasar dunia. Dengan strategi penguatan biofuel dan pengurangan impor solar, nilai tambahnya dinilai dapat melonjak signifikan. “Baru 3 komoditas saja yang di hilirisasi bisa menghasilkan 15 ribu triliun,” ujarnya.

Perkuat Percepatan Program Strategis

Kementan memperkuat tata kelola dan efektivitas pelaksanaan program strategis melalui koordinasi terpusat di Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) tingkat provinsi. Skema ini memastikan seluruh operasional, kinerja, serta pengawasan program pertanian di daerah berjalan terintegrasi, terukur, dan akuntabel.

Kebijakan ini menjadi langkah tegas untuk memastikan seluruh capaian program, mulai dari cetak sawah, optimalisasi lahan (oplah), Luas Tambah Tanam (LTT), hingga distribusi alat dan mesin pertanian (alsintan), berjalan efektif dan berbasis meritokrasi.

“Kita ingin pertanian terhormat. Bukan untuk dihormati secara pribadi, tetapi agar kolaborasi dengan gubernur dan bupati berjalan kuat dan setara. Semua program harus terkoordinasi dan jelas penanggung jawabnya,” ujar Mentan Amran.

Penguatan BRMP juga difokuskan untuk mendorong kemandirian pangan di kawasan timur Indonesia, khususnya enam provinsi di Tanah Papua, seperti Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Barat Daya, Papua Barat, dan Papua.

Program peningkatan luas tanam padi, pengembangan kopi, kakao, dan komoditas strategis lainnya menjadi fokus utama. Pemerintah menargetkan peningkatan signifikan luasan sawah di wilayah Papua guna mewujudkan kemandirian pangan regional.

“Kita ingin Papua mandiri pangan. Itu mimpi kita. Kita mulai dari Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Barat Daya, semua harus berdiri dan bergerak,” tegas Mentan Amran. ●



tekanan dan ujian justru membentuk karakter kepemimpinan yang tangguh.

Menurut Mentan Amran, sektor pertanian membutuhkan kepemimpinan yang tidak ragu membongkar sistem lama yang berbelit dan tidak efektif. Reformasi regulasi, subsidi, hingga tata niaga menjadi langkah konkret untuk memastikan kebijakan benar-benar berdampak pada petani.

“Kalau kita hanya melakukan hal yang sama dan berharap hasil berbeda, itu tidak masuk akal. Kita harus berani ubah sistem, Indonesia bisa melompat,” tegasnya.

Sebagai bukti, ia memaparkan reformasi tata kelola pupuk bersubsidi melalui deregulasi 145 aturan dan pe-

wani seperti susu sapi dan kambing ke susu nabati berbasis kelapa.

“Ini coconut milk. Itu ada pergeseran pangan di China, itu dari susu sapi kambing bergeser ke susu yang dari kelapa. Ini nilainya ini total itu bisa potensi Rp5.000 triliun,” ungkapnya.

Ia juga menyoroti komoditas gambir, di mana sekitar 80 persen bahan bakunya dikuasai Indonesia, namun proses pengolahannya masih dilakukan di luar negeri.

“Gambir kita diekspor ke India, lalu dijual kembali oleh India ke Amerika. Potensinya bisa mencapai Rp5.000 triliun,”

“Memimpin itu indah dalam mimpi, tetapi tidak mudah dalam kenyataan. Pemimpin yang adil dimuliakan, yang tidak adil kehilangan kehormatan”

MENGAPA DI NEGARA YANG MAYORITAS POPULASINYA BERPUASA SEBULAN PENUH TAPI KORUPSINYA TINGGI?

Suatu petang di bulan Ramadan. Langit perlahan meredup. Azan hampir menyentuh udara. Di sebuah kantor pemerintahan, seorang pejabat menatap berkas terakhir sebelum berbuka.

Sejak fajar ia menahan lapar. Tenggorokannya kering. Kepalanya sedikit pening. Ia menghitung menit menuju magrib.

Di mejanya ada dua hal. Dokumen persetujuan proyek. Dan sebuah pesan singkat yang menjanjikan kompensasi jika ia mempercepat tanda tangan.

la berpuasa.

Tetapi apakah ia benar benar sedang belajar menahan diri.

Azan berkumandang. Ia meneguk air. Ia berbuka. Namun keputusan moralnya telah dibuat lebih dulu.

Di situlah pertanyaan besar itu lahir. Jika puasa adalah latihan menahan diri, mengapa di negeri yang penuh orang berpuasa, tangan masih mudah mengambil yang bukan haknya.

-000-

Islam datang bukan sebagai kumpulan ritual. Ia adalah revolusi moral. Ia mengguncang struktur ketidakadilan di Makkah. Ia menantang penumpukan harta oleh elite. Ia membela budak. Ia mengingatkan bahwa kekuasaan adalah amanah, bukan hak istimewa.

Puasa bukan sekadar menahan makan dan minum. Puasa adalah sekolah integritas. Ia melatih manusia menahan diri dari yang halal agar tidak mengambil yang haram.

Ia melatih empati agar yang kaya merasakan lapar orang miskin. Ia melatih kejujuran agar yang berkuasa tidak tergoda menyalahgunakan wewenang.

Puasa sejatinya adalah latihan berkata tidak. Tidak pada nafsu. Tidak pada keserakahan. Tidak pada peluang menyimpang.

Namun sejarah panjang sering membuat pesan besar itu menyempit.

Agama yang lahir sebagai visi moral sosial perlahan direduksi menjadi kepatuhan formal. Yang dinilai adalah sah atau tidak sah. Yang dihitung adalah jumlah ritualnya, bukan dampaknya. Puasa dianggap selesai saat magrib tiba, bukan saat keserakahan berhasil ditundukkan.

Ritual tetap hidup. Integritas publik melemah.

-000-

Di sinilah data berbicara dengan jernih.

Menurut Corruption Perceptions Index 2025 yang dirilis Februari 2026 oleh Transparency International, sejumlah negara dengan populasi mayoritas Muslim masih menghadapi persoalan serius dalam persepsi tata kelola publik.



OLEH DENNY JA

Arab Saudi mencatat skor 57 dan berada di peringkat 45 dari 182 negara.

Malaysia memperoleh skor 52 dan peringkat 54.

Indonesia berada pada skor 34 dan peringkat 109.

Turki mencatat skor 31 dan berada di peringkat 124.

Mesir memperoleh skor 30 dan peringkat 130.

Sebagai pembandingan, Denmark mencatat skor 89. Finland 88. Singapura 84. Tiga negara ini, yang tidak memiliki tradisi berpuasa sebulan, justru jauh

lebih bersih dari korupsi.

Angka ini bukan ukuran iman. Ia adalah ukuran institusi. Ia menunjukkan jarak antara kesalehan pribadi dan tata kelola publik.

Indeks ini mengukur persepsi korupsi sektor publik—penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi—sebagaimana dilihat pakar dan pelaku usaha, sehingga yang disorot adalah mutu aturan main dan akuntabilitas, bukan kadar ibadah warga.

Jika puasa membentuk manusia yang tahan godaan, mengapa sistem masih memberi ruang luas bagi godaan itu.

-000-

Mengapa jarak itu terjadi? Mengapa di negara yang populasi dan pejabat pemerintahannya sering berpuasa selama sebulan tapi korupsinya tinggi?

Pertama, puasa berhenti pada disiplin fisik dan tidak menjelma menjadi disiplin moral yang berkelanjutan.

Kita mampu menahan lapar, tetapi tidak menahan tamak. Kita mampu menahan haus, tetapi tidak menahan ambisi kekuasaan.

Padahal inti puasa adalah membangun karakter yang tetap teguh ketika tidak ada yang melihat. Jika setelah Ramadan praktik mark up proyek, jual beli izin, dan transaksi kekuasaan tetap berjalan, maka yang berubah hanya jadwal makan, bukan struktur keinginan.

Hadis Nabi mengingatkan bahwa betapa banyak orang berpuasa tetapi tidak mendapatkan dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Peringatan itu terasa sangat relevan di ruang rapat dan meja anggaran.

Kedua, sistem kekuasaan sering lebih kuat daripada kesalehan individu.

Biaya politik tinggi. Pembiayaan kampanye tidak transparan. Jaringan patronase membentuk loyalitas. Kekuasaan menjadi alat distribusi rente. Regulasi dapat dibelokkan. Pengawasan bisa dinegosiasikan.

Dalam sistem seperti itu, korupsi bukan sekadar penyimpangan moral. Ia menjadi bagian dari desain kekuasaan. Integritas menjadi mahal. Penyimpangan menjadi rasional.

Puasa membentuk hati. Tetapi negara membentuk aturan main. Jika aturan main memberi hadiah pada manipulasi dan risiko kecil pada pelanggaran, maka nurani dipaksa bertarung sendirian.

Ketiga, religiositas berubah menjadi identitas simbolik.

Kesalehan publik dinilai dari ritual yang terlihat. Rajin berpuasa. Rajin beribadah. Aktif dalam seremoni keagamaan. Tetapi transparansi anggaran dan integritas jabatan jarang menjadi ukuran spiritualitas.

Korupsi tidak selalu memalukan. Yang memalukan justru tertangkap.

Ketika agama menjadi simbol keanggotaan, bukan standar akuntabilitas, ritual tetap ramai tetapi etika publik kehilangan daya koreksinya.

-000-

Dua buku membantu memperdalam refleksi ini

Dalam *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition* yang diterbitkan University of Chicago Press tahun 1982, Fazlur Rahman mengkritik kecenderungan legalistic formalism. Agama berhenti pada kepatuhan teknis dan kehilangan visi etika sosialnya.

Rahman menunjukkan bahwa wahyu turun untuk membangun masyarakat yang adil. Namun dalam sejarah intelektual Islam, perhatian sering tersedot pada detail hukum dan legalitas, sementara semangat transformasi sosialnya melemah.

Ia menawarkan metode double movement. Memahami konteks historis wahyu untuk menangkap prinsip moralnya, lalu menggerakkannya dalam konteks modern.

Dalam kerangka ini, puasa bukan sekadar kewajiban tahunan. Ia adalah proses pembentukan manusia yang sanggup menghadirkan keadilan dalam sistem sosial.

Jika ritual meningkat tetapi korupsi tetap tinggi, maka yang hilang adalah internalisasi visi moral tersebut.

Dari perspektif berbeda, James C. Scott dalam *The Moral Economy of the Peasant* yang diterbitkan Yale University Press tahun 1976 menunjukkan bahwa perilaku manusia dibentuk oleh struktur insentif dan relasi kuasa.

Scott menemukan bahwa masyarakat memiliki batas moral terhadap kekuasaan. Selama elite menjaga keadilan minimum, legitimasi bertahan.

Ketika elite memaksimalkan keuntungan tanpa akuntabilitas, legitimasi runtuh. Dalam sistem yang memberi insentif pada penyimpangan dan lemah dalam sanksi, korupsi menjadi rasional.

Pelajaran dari Scott jelas. Reformasi moral harus berjalan bersama reformasi institusi.

Kedua pemikiran ini bertemu pada satu titik. Moralitas tanpa sistem akan rapuh. Sistem tanpa moralitas akan dingin dan tidak berjiwa.

-000-

Ramadan seharusnya menjadi laboratorium pengendalian diri.

Jika kita mampu menahan diri dari seteguk air di siang hari karena keyakinan bahwa Tuhan melihat, mengapa kita tidak menahan diri dari mengambil yang bukan hak kita ketika manusia tidak melihat.

Puasa mengajarkan kita menahan diri dari yang halal agar kita tidak mengambil yang haram.

Mungkin yang perlu direnungkan bukan berapa kali kita khatam membaca kitab suci, tetapi berapa banyak godaan yang berhasil kita tolak ketika tidak ada saksi.

Bukan berapa panjang doa kita, tetapi seberapa jujur tanda tangan kita.

Bukan seberapa keras kita berbicara tentang moralitas, tetapi seberapa teguh kita berkata tidak pada peluang menyimpang.

Puasa tidak hanya menguji daya tahan lapar kita. Ia menguji apakah kita sanggup menahan tak mengambil yang bukan hak, ketika kekuasaan memberi peluang.

Dan mungkin, di antara azan dan tanda tangan sebuah proyek, di situlah terlihat apakah puasa benar benar membentuk karakter bangsa, atau hanya menghiasi kalender.



Transformasi bangsa menuntut perkawinan

antara kesalehan personal dan reformasi birokrasi. Hanya saat rasa takut kepada Tuhan bersenyawa dengan ketegasan hukum dan tata kelola kelembagaan, puasa benar-benar menjadi perisai yang melumpuhkan tangan-tangan serakah di ruang kekuasaan.* (Perluasan orasi Denny JA dalam acara buka puasa bersama para direksi, komisaris, pimpinan Pertamina Hulu Energi dan 10 Yayasan Yatim Piatu, 23 Februari 2026)

Jakarta, 24 Februari 2026

REFERENSI

1. Fazlur Rahman. *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: University of Chicago Press, 1982.

2. James C. Scott. *The Moral Economy of the Peasant: Rebellion and Subsistence in Southeast Asia*. New Haven: Yale University Press, 1976.

3. Transparency International. *Corruption Perceptions Index 2025*. Berlin, 2026. ●

SUMSEL JADI SIMPUL KONEKTIVITAS TRANSPORTASI SUMATERA

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyebut Provinsi Sumatera Selatan memiliki posisi vital sebagai simpul konektivitas di wilayah barat Indonesia khususnya Pulau Sumatera, yang didukung jaringan angkutan jalan, perkeretaapian, penyeberangan, hingga udara.

"Penguatan koordinasi dan kemitraan strategis antara Kementerian Perhubungan dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menjadi faktor penentu dalam menjamin penyelenggaraan Angkutan Lebaran 2026 berjalan aman, tertib, lancar, dan selamat. Langkah ini juga penting untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi lonjakan mobilitas masyarakat pada periode arus mudik dan balik di wilayah Sumatera Selatan," ujar Menhub Dudy saat bertemu Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru di Palembang.

Menhub Dudy menjelaskan, kontribusi pergerakan masyarakat pada masa Angkutan Lebaran yang berasal dari wilayah Sumsel diperkirakan mencapai angka 3,87 juta orang. Sementara dari segi tujuan, pergerakan masyarakat yang menuju wilayah Sumsel diprediksi mencapai angka 3,85 juta orang.

"Sumatera Selatan punya posisi strat-



egis sebagai simpul utama pergerakan masyarakat di koridor tengah Pulau Sumatera. Arus masuk dan keluar wilayah ini diproyeksikan akan meningkat dari arah Lampung dan Jambi, baik yang melalui jalur darat yaitu Tol Trans Sumatra dan Jaringan Jalan Lintas Sumatera maupun melalui angkutan udara, kereta api, serta penyeberangan menuju Kota Palembang dan sekitarnya," terang Menhub.

Menhub Dudy menambahkan, dari

segi pilihan moda transportasi, mobil pribadi jadi pilihan utama pemudik untuk melakukan perjalanan, di mana jumlahnya diprediksi mencapai angka 76,24 juta orang. Trans Sumatra (Non Tol) menjadi pilihan kedua terbesar dengan prediksi jumlah mobil pribadi mencapai angka 7,85 juta kendaraan, sehingga berpotensi meningkatkan kepadatan lalu lintas pada ruas arteri dan menghubungkan antar wilayah.

Untuk Program Mudik Gratis Kemen-

terian Perhubungan menyediakan 401 unit bus yang mampu mengangkut penumpang sebanyak 15.834 orang dengan 34 kota tujuan, salah satunya Palembang.

Terminal Alang-Alang Lebar di Palembang jadi lokasi kedatangan mudik gratis dan keberangkatan arus balik di wilayah Sumatera Selatan. Adapun untuk angkutan laut, tersedia kuota sebanyak 66.082 penumpang ekonomi yang melayani 121 ruas, termasuk ruas Muntok-Palembang pada periode 11 Maret hingga 5 April 2026.

"Butuh dukungan Pemprov Sumatera Selatan dalam hal menyediakan kemudahan akses bagi para pemudik untuk menuju terminal dan pelabuhan, termasuk layanan angkutan feeder pada simpul-simpul mudik gratis," tutur Menhub.

Angkutan Lebaran 2026. Menhub pun mengimbau seluruh pihak yang berada di wilayah Sumsel agar tidak mengoperasikan angkutan barang yang lebih muatan dan lebih dimensi untuk menjaga keselamatan bersama.

Pada kesempatan ini, Menhub Dudy juga membahas perlintasan sebidang yang ada di wilayah Sumsel. Diungkapkannya, terdapat sebanyak 196 perlintasan sebidang di wilayah tersebut, di mana saat ini telah dilakukan penambahan sebanyak 138 penjaga untuk meningkatkan pengawasan.

Menhub Dudy pun memberikan perhatian khusus kepada pengguna kendaraan pribadi, khususnya roda dua yang akan melintasi jalur arteri selama masa Lebaran. Bersama Kementerian Agama, Kementerian Perhubungan mendorong optimalisasi masjid sebagai tempat istirahat sementara melalui program "Masjid Ramah Pemudik".

Fokus Atasi Bottleneck dan Perlintasan Sebidang

Sementara Gubernur Herman Deru menyampaikan, rakor ini bertujuan memastikan kesiapan infrastruktur dan layanan transportasi menjelang Idul Fitri 1447 Hijriah, mengingat Sumsel merupakan jalur strategis lintas Sumatera.

Menurutnya, percepatan perbaikan

jalan nasional sepanjang kurang lebih 1.500 kilometer menjadi prioritas. Seluruh ruas berlubang ditargetkan selesai diperbaiki maksimal H-10 sebelum Lebaran.

Ruas Musi Rawas, Banyuasin, Musi Banyuasin, Palembang-Prabumulih, hingga Prabumulih-Lahat menjadi perhatian utama. Selain itu, jalur Palembang-Betung yang menghubungkan arus kendaraan menuju Jambi dan Aceh juga menjadi fokus penanganan.

"Dari sekitar 60 kilometer ruas padat tersebut, 22 kilometer mengalami kemacetan cukup parah akibat bottleneck. Optimalisasi tol dan jaringan Jalan Tol Trans-Sumatera diharapkan dapat men-

tion. Untuk mengatasi kemacetan akibat perlintasan sebidang, disepakati pembangunan empat flyover di Muara Enim.

Pemprov Sumsel juga meminta dukungan Kementerian Perhubungan untuk mempertegas penegakan larangan angkutan batubara melintas di jalan umum.

Selain infrastruktur darat dan perkeretaapian, Pemprov Sumsel terus mendorong percepatan PSN Pelabuhan Tanjung Carat serta mengusulkan penambahan maskapai penerbangan guna mengantisipasi lonjakan penumpang.

Menteri Perhubungan Dudy Purwandhi menyatakan kesiapan Sumsel

Butuh dukungan Pemprov Sumatera Selatan dalam hal menyediakan kemudahan akses bagi para pemudik untuk menuju terminal dan pelabuhan, termasuk layanan angkutan feeder pada simpul-simpul mudik gratis"



jadi solusi," jelasnya.

Di sektor perkeretaapian, peningkatan frekuensi kereta api barang, terutama angkutan batu bara, turut menjadi perha-

menghadapi Angkutan Lebaran sudah berjalan baik. Ia menegaskan, koordinasi lintas sektor menjadi faktor utama kelancaran arus mudik dan balik. ● ADV

TINGKATKAN SILATURAHMI DAN TEKANKAN SINERGI PEMBANGUNAN

Bulan suci Ramadan dimanfaatkan Gubernur Herman Deru untuk bersilaturahmi dengan masyarakat melalui safari keliling masjid di Sumatera Selatan. Kali ini Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, menghadiri Pengajian Ramadhan 1447 Hijriah bersama Bupati Banyuasin Askolani dan jajaran Forkopimda di Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Talang Kelapa.

Pada kesempatan tersebut, Herman Deru menyerahkan santunan kepada anak-anak yatim sebagai wujud kepedulian dan semangat berbagi di bulan suci Ramadhan.

Bupati Banyuasin Askolani menyampaikan apresiasi atas kehadiran Gubernur Sumsel yang bersilaturahmi langsung dengan masyarakat Banyuasin. Ia bersyukur daerahnya tetap dalam kondisi kondusif meskipun masyarakatnya majemuk.

"Walaupun masyarakat majemuk, tetapi tetap guyub. Kita tetap bersatu bersama-sama," ujarnya.

Menurut Askolani, sektor pertanian di Banyuasin mengalami peningkatan produksi yang signifikan. Bahkan, Banyuasin berhasil meraih predikat produktivitas pangan tertinggi secara nasional.

Namun demikian, sebagai kabupaten terluas dengan jumlah penduduk terbesar, Banyuasin masih menghadapi se-

jumlah persoalan, khususnya di bidang infrastruktur.

"Persoalan Banyuasin tidak hanya pada infrastruktur jalan dan jembatan, tetapi juga air bersih PDAM, termasuk jalan negara. Keterbatasan ini membuat

kami banyak meminta bantuan kepada Bapak Gubernur Herman Deru," katanya.

Ia juga menyoroti persoalan kemacetan yang diharapkan dapat terurai melalui pembangunan jalan tol dari Keramasan hingga Suak Tape. Askolani menyampaikan terima kasih atas dukungan pembangunan yang telah diberikan Pemprov Sumsel, terutama pada 2025, di mana sejumlah jalan dan jembatan telah mendapat bantuan.

Sementara itu, Herman Deru mengatakan Safari Ramadhan memiliki nilai tambah berupa silaturahmi yang tidak didapat saat berbuka puasa di rumah.

"Safari Ramadhan ini memiliki nilai tambahan, yaitu silaturahmi yang tidak didapat seperti berbuka puasa di rumah,"

"Persoalan Banyuasin tidak hanya pada infrastruktur jalan dan jembatan, tetapi juga air bersih PDAM, termasuk jalan negara. Keterbatasan ini membuat kami banyak meminta bantuan kepada Bapak Gubernur Herman Deru"



ujarnya.

Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah kabupaten dan provinsi dalam mengelola pembangunan. Menurutnya, kepala daerah memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola keuangan wilayah.

"Kepala daerah itu lebih dari ibu rumah tangga dalam mengelola keuangan wilayah. Oleh karena itu, diperlukan sinergi dengan Pemprov," katanya.

Di akhir sambutannya, Herman Deru mengajak seluruh pihak terus menjaga kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat demi kemajuan Sumatera Selatan.

Sebelumnya Gubernur Herman Deru juga menyoroti percepatan penutupan lubang jalan menjelang arus mudik Lebaran agar aman, nyaman serta selamat sampai tujuan.

Ia menyebutkan, Polda Sumsel bersama jajaran dan instansi terkait menargetkan minimal penutupan lubang jalan H-10 sebelum Lebaran.

Ia meminta Kapolda dan jajaran di daerah terus mengawasi percepatan penutupan lubang agar masyarakat dapat menikmati perjalanan mudik dan arus balik dengan aman dan nyaman.

"InsyaAllah dengan dukungan semua pihak, Sumsel dapat nyaman dilalui para pemudik," tegasnya. ●ADV





PERKUAT PERAN BUMD UNTUK DUKUNG PSN TANJUNG CARAT

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terus melangkah mempercepat realisasi pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat. Salah satunya dengan memperkuat peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk mendukung Proyek Strategis Nasional (PSN) Tanjung Carat.

Percepatan penguatan BUMD di pembangunan PSN Tanjung Carat ini disampaikan Wakil Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H. Cik Ujang pada Rapat Paripurna XXI DPRD Provinsi Sumsel dengan agenda penyampaian jawaban Gubernur atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Ranperda tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 terkait PT Sumsel Energi Gemilang.

Dalam penyampaiannya, Cik Ujang mengapresiasi dukungan seluruh fraksi DPRD Sumsel terhadap Ranperda yang diajukan. Ia menilai pandangan, saran, dan masukan yang disampaikan merupakan bentuk komitmen bersama dalam memperkuat peran

BUMD.

Menjawab pertanyaan Fraksi Partai Golkar dan Fraksi PAN, ia menjelaskan bahwa Pemprov Sumsel telah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja BUMD sebagai bagian dari upaya peningkatan profesionalisme dan tata kelola perusahaan.

Menurutnya, transformasi BUMD sangat diperlukan agar mampu menjadi entitas usaha yang sehat, kompetitif, dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Cik Ujang juga menegaskan bahwa Ranperda tersebut tidak mengubah bentuk badan hukum PT Sumsel Energi Gemilang yang saat ini telah berstatus Perseroada. Perubahan yang diusulkan berfokus pada penambahan bidang usaha guna mendukung Program Strategis Nasional, khususnya pembangunan dan pengembangan Pelabuhan Tan-



jung Carat.

Ia berharap penguatan peran BUMD tersebut dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat sekaligus mendorong peningkatan perekonomian Sumatera Selatan.

Menutup penyampaiannya, Cik Ujang memastikan seluruh masukan fraksi, termasuk dari Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai NasDem, dan Fraksi Partai Demokrat, akan menjadi perhatian serius pemerintah daerah dalam menyempurnakan Ranperda demi kepentingan dan kemajuan Sumatera Selatan.

Masuki Tahap Konsorsium

Keberhasilan pembangunan Pelabuhan Palembang Baru di Tanjung Carat merupakan hasil nyata sinergi antara pemerintah dan sektor swasta. Setelah Nota Kesepahaman dan Serah Terima Lahan ditandatangani, tahap selanjutnya adalah pembentukan konsorsium untuk pengelolaan dan pembangunan pelabuhan tersebut.

Dimana sebelumnya ada Nota Kesepahaman yang ditandatangani Menteri Perhubungan RI Dudy Purwagandhi dan Gubernur Sumsel Herman Deru, disaksikan Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi RI Todotua Pasaribu, Wakil Gubernur Sumsel H. Cik Ujang, serta Wakil Bupati Banyuasin Netta Indian di Griya Agung, Palembang.

Menindaklanjuti kesepakatan tersebut, Gubernur Herman Deru akan segera menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) yang memberikan mandat kepada PT Sumsel Energi Gemilang (SEG) untuk membentuk anak perusahaan sebagai bagian dari konsorsium.

“Pergub akan diterbitkan dalam minggu ini untuk mempercepat pembentukan anak perusahaan SEG, sehingga konsorsium dapat segera ber-

jalan,” ujar Herman Deru.

Konsorsium pembangunan pelabuhan akan terdiri dari PT Pelindo, PT Samudra Pasai, dan PT Sumsel Konstruksi Utama (SKU), dengan komposisi saham 51 persen, 30 persen, dan 19 persen. Sinergi ini diharapkan dapat memperkuat struktur investasi dan operasional dalam skema Ker-

gapresiasi dukungan pemerintah pusat dan pihak swasta yang telah berkomitmen dalam proyek ini.

Selain aspek investasi, pemerintah juga memperhatikan faktor lingkungan. Herman Deru menegaskan pelabuhan akan dibangun dengan konsep ecopark guna melindungi kawasan mangrove yang menjadi pen-



“Pergub akan diterbitkan dalam minggu ini untuk mempercepat pembentukan anak perusahaan SEG, sehingga konsorsium dapat segera berjalan”

12 PROGRAM STRATEGIS

1 Mewujudkan New Palembang Port Tanjung Carat



• Rencana Induk Pelabuhan (Keputusan Menteri Perhubungan RI Nomor : KM. 83 Tahun 2023 Tanggal 2 Agustus 2023)

• Penetapan Pelepasan Kawasan Hutan (KepMen LHL No.1259/2024)



- 1 Proses Serifikasi Lahan Pada Lokasi Pelabuhan Utama seluas 59,95 Ha.
- 2 Proses Serifikasi Lahan penyangga darat (Mozaik 5 dan 6)



jasama Pemanfaatan (KSP) Badan Usaha Pelabuhan (BUP).

Menurut Gubernur Herman Deru, proyek strategis nasional ini akan membawa multiplier effect besar bagi ekonomi daerah, membuka lapangan kerja baru, serta memperkuat rantai pasok industri Sumsel.

“Pelabuhan ini akan jadi pintu gerbang ekspor baru Sumatera Selatan,” ujarnya.

Deru juga menekankan pentingnya percepatan dan koordinasi lintas lembaga agar tahapan konsorsium dapat berjalan tanpa hambatan. Ia men-

yangga ekosistem pesisir Banyuasin.

Penandatanganan MoU menjadi tonggak penting dalam sejarah pembangunan ekonomi Sumatera Selatan. Momentum ini menandai kesiapan daerah untuk berdiri sejajar dengan provinsi maju dalam hal infrastruktur dan konektivitas logistik.

Dengan sinergi kuat antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, Pelabuhan Palembang Baru diyakini akan menjadi kebanggaan baru Sumsel sekaligus simbol keberhasilan kolaborasi menuju kemajuan. ●ADV

SIAGA PENUH SAMBUT MUDIK HARI RAYA IDUL FITRI 1447 H

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) memantapkan strategi pengamanan dalam menyambut arus mudik dan perayaan Idul Fitri 1447 Hijriah. Salah satunya mengikuti rapat koordinasi lintas sektor bidang operasional tingkat Menteri secara daring.

Rakor tersebut dipimpin langsung Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo. Agenda ini menjadi langkah strategis untuk menyelaraskan kesiapan kementerian, lembaga, TNI/Polri, hingga pemerintah daerah dalam menjamin keamanan dan kenyamanan masyarakat selama momentum Lebaran 2026.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Prof. Dr. Pratikno dalam arahannya mengungkapkan, berdasarkan survei Kementerian Perhubungan, estimasi pergerakan masyarakat pada mudik tahun ini mencapai 143,9 juta orang. Puncak arus mudik diprediksi terjadi pada 18 Maret 2026.

Ia menegaskan, tantangan utama mudik tahun ini adalah faktor cuaca. Periode mudik yang bertepatan dengan puncak musim penghujan berpotensi menimbulkan bencana hidrometeorologi.

"Keselamatan jiwa adalah prioritas tertinggi. Kita harus menghindarkan masyarakat dari risiko kecelakaan, kriminalitas, hingga bencana alam melalui mitigasi yang terintegrasi," tegasnya.

Untuk mengantisipasi hambatan di

lapangan, pemerintah menetapkan sejumlah fokus utama. Pertama, mitigasi bencana dengan respons cepat melalui Satgas Gabungan yang terdiri atas Polri, BPBD, Basarnas, dan Dinas Pekerjaan Umum. Satgas ini disiagakan di tingkat Polres dengan target waktu respons kurang dari 30 menit apabila terjadi longsor atau banjir.

Kedua, peningkatan keselamatan pemudik sepeda motor melalui screening ketat di titik keberangkatan utama. Pemerintah menghimbau masyarakat untuk menghindari mudik jarak jauh menggunakan sepeda motor, terutama yang membawa anak kecil, serta memanfaatkan program mudik gratis yang disediakan.

Patroli intensif juga akan ditingkatkan di jalur arteri dan rest area. Selain itu, sebanyak 6.859 masjid akan dioptimalkan sebagai safe point atau titik aman bagi para pemudik.

Sementara itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menekankan agar seluruh jajaran tidak meremehkan situasi meskipun terdapat fluktuasi data pergerakan masyarakat. Ia meminta setiap keputusan rekayasa lalu lintas, seperti contra



flow atau one way, didasarkan pada data real-time melalui perhitungan volume capacity ratio (V/C ratio).

“Tampilkan wajah Polri yang melayani. Lakukan penegakan hukum secara persuasif dan edukatif. Pastikan kehadiran negara dirasakan langsung oleh masyarakat melalui pelayanan yang humanis dan responsif,” ujarnya.

Kapolri juga menginstruksikan Satgas Pangan untuk berkolaborasi dalam menjaga stabilitas harga serta ketersediaan bahan pokok dan BBM/BBG.

“Jika ditemukan penyimpangan atau penimbunan, tindakan tegas akan diambil tanpa mengganggu rantai pasokan,” katanya.

Menutup rapat, seluruh pihak menegaskan bahwa kunci kesuksesan pelayanan mudik Idul Fitri 1447 H adalah sinergi tanpa ego sektoral. Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan diharapkan mampu menciptakan suasana Idulfitri yang aman, tertib, dan penuh makna bagi masyarakat.

Target Zero Lubang Jelang Lebaran

Agar lalu lintas berjalan aman dan nyaman Pemprov Sumsel juga menargetkan semua jalan di Sumatera Selatan tidak ada yang berlobang. Sehingga para pemudik merasa nyaman dan aman saat pulang kampung merayakan



Hari Raya Idul Fitri 1147 Hijriah.

Gubernur Herman Deru menyoroti percepatan penutupan lubang jalan menjelang arus mudik Lebaran. Ia menyebutkan, Polda Sumsel bersama jajarannya dan instansi terkait menargetkan minimal penutupan lubang jalan H-10 sebelum Lebaran.

Ia meminta Kapolda dan jajaran di daerah terus mengawasi percepatan penutupan lubang agar masyarakat dapat menikmati perjalanan mudik dan arus balik dengan aman dan nyaman.

“InsyaAllah dengan dukungan semua pihak, Sumsel dapat nyaman dilalui para pemudik,” tegasnya.

Sementara Kapolda Sumsel Irjen Pol Sandi Nugroho mengatakan, kegiatan

tersebut merupakan tindak lanjut atas arahan Presiden RI untuk melaksanakan Gerakan Indonesia Asri. Di Sumsel, gerakan ini memiliki kekhasan dengan menjadikan ikan belida sebagai ikon daerah sekaligus simbol gerakan bersih dan asri.

Ia menegaskan, kegiatan ini menunjukkan sinergi kuat antara pemerintah daerah dan Forkopimda, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

“Mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat. Mari kita ciptakan zero lubang di Sumsel,” ujarnya pada apel kegiatan Program Belida Polda Sumsel (Bersih Lingkungan dan Asri) di Terminal Timbangan Indralaya, Jalan Lintas Indralaya-Prabumulih KM 32, Kabupaten Ogan Ilir. •ADV





SIAP JADI CONTOH NASIONAL, PROGRAM MBG BERBASIS PANGAN LOKAL

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal tersebut ditegaskan Gubernur Sumsel, Dr. H. Herman Deru, saat menghadiri Rapat Konsolidasi Program MBG bersama Kasatpel, mitra, dan yayasan se-Sumsel.

Herman Deru menilai Program MBG sejalan dengan komitmen Pemprov Sumsel dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan menekan angka stunting. Ia menyebut, Sumsel saat ini menjadi provinsi dengan prevalensi stunting nomor dua terkecil setelah Jawa Barat.

Keberhasilan tersebut, lanjutnya, tidak terlepas dari kebijakan kemandirian pangan yang telah dibangun sejak beberapa tahun terakhir melalui Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP). Program ini lahir saat pandemi Covid-19 dan tekanan inflasi mendorong banyak daerah bergantung pada pasokan dari luar.

"Kalau semua daerah mendatangkan bahan dari luar, akan terjadi rebutan dan harga makin tidak terkendali. Karena itu, kita perkuat kemandirian pangan," ujarnya.

Melalui dukungan CSR perbankan, termasuk Bank Mandiri, Pemprov Sumsel mengembangkan sektor peternakan ayam, ikan air tawar, belut, serta bantuan bibit cabai dan bawang untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga.

Gerakan yang dicanangkan pada November 2021 itu terbukti efektif menjaga stabilitas harga. Sumsel bahkan meraih penghargaan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) selama lima tahun berturut-turut.

Ia menegaskan, saat Program MBG mulai berjalan, Sumsel tidak mengalami kekhawatiran kekurangan bahan pangan karena fondasi kemandirian sudah terbentuk. Telur, daging ayam, dan ikan air tawar tersedia dalam jumlah cukup sehingga ekosistem ekonomi tetap stabil.

Herman Deru juga membuka peluang bagi Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mengadopsi GSMP sebagai model nasional guna mendukung keberhasilan MBG di berbagai daerah.

Sementara itu, Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya, menyampaikan bahwa sekitar 2.000 orang di Sumsel terlibat dalam pelaksanaan program tersebut. Ia menekankan pentingnya pemenuhan gizi seimbang sebagai pondasi menuju Indonesia Emas 2045.

Menurutnya, bahan baku Program MBG berasal dari petani dan produsen

lokal, sehingga tidak hanya berdampak pada peningkatan gizi masyarakat, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Program MBG sendiri bertujuan meningkatkan asupan gizi masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti balita, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak sekolah. Selain menekan angka stunting dan malnutrisi, program ini juga mendorong peningkatan kualitas SDM serta pemberdayaan UMKM, petani, dan peternak lokal.

Perkuat Peran Lumbung Pangan Sumatera

Pemprov Sumsel juga menegaskan komitmennya dalam menjaga stabilitas pasokan pangan di wilayah Sumatera.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumsel H Edward Candra menyoroti capaian Sumsel sepanjang 2025. Sumsel berhasil menjadi penghasil beras terbesar di Sumatera serta menduduki peringkat ketiga nasional dalam peningkatan produksi padi.

"Produksi padi Sumsel mencapai 3.586.332 ton pada 2025, meningkat 23,69 persen (year on year/yoY) dibandingkan tahun sebelumnya. Angka ini menegaskan peran strategis Sumsel sebagai lumbung pangan yang siap memasok kebutuhan daerah lain, terutama yang terdampak bencana di wilayah Sumatera," ujar Edward saat menghadiri Rapat Koordinasi TPIP-TPID Wilayah Sumatera 2026

Optimisme tersebut berlanjut pada 2026 dengan program cetak sawah yang diproyeksikan menjadi motor utama peningkatan produksi. Pemprov Sumsel juga menyatakan kesiapan menjalin Kerja Sama Antar Daerah (KAD) guna memastikan stabilitas pasokan beras di seluruh provinsi di Sumatera.

Menghadapi potensi inflasi menjelang Idul Fitri, Edward menjelaskan TPID Sumsel bergerak masif melalui penyelenggaraan pasar murah. Fokus utama diarahkan pada komoditas berisiko seperti aneka cabai, bawang, telur, dan daging ayam melalui kolaborasi bersama BUMD pangan, Bulog, serta jaringan Rumah Pangan Kita (RPK).

Selain menjaga stabilitas harga, Sekda menekankan pentingnya sinkronisasi antara program Makan Bergizi Gratis

(MBG) dan Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP).

"Kami berencana mendorong dapur MBG menasar pesantren-pesantren di Sumsel. Untuk itu, dukungan permodalan dari BUMN dan BUMD sangat diperlukan agar pesantren mampu secara mandiri menyuplai kebutuhan bahan baku dapur MBG, seperti telur dan kebutuhan lainnya," tambahnya.

Menurutnya, langkah tersebut pent-

ing untuk menjaga keseimbangan antara peningkatan permintaan dari program pemerintah dengan ketersediaan pasokan di pasar agar tidak memicu inflasi.

Rapat koordinasi ini diharapkan menghasilkan rekomendasi konkret guna memperkuat integrasi program daerah dengan kebutuhan nasional, demi mewujudkan kedaulatan pangan yang tangguh di tengah tantangan iklim global. ●



AJAK JAGA STABILITAS HARGA KEBUTUHAN POKOK

Guna menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok menyambut Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, Gubernur Sumsel Herman Deru meminta seluruh pihak terkait untuk melakukan pemantauan secara intensif terhadap stabilitas harga kebutuhan pokok selama Ramadhan.

Langkah itu dinilai penting guna mengantisipasi lonjakan harga di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat. Sehingga peran jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta perwakilan BUMN dan BUMD Provinsi Sumsel sangat dibutuhkan.

Gubernur Herman Deru juga menyampaikan rasa syukur atas terseleng-

garanya Safari Ramadhan sebagai momentum mempererat silaturahmi antara pemerintah daerah, Forkopimda, dan masyarakat.

"Alhamdulillah, hari ini kita dapat melaksanakan Salat Isya dan Tarawih berjamaah sekaligus mempererat silaturahmi bersama Forkopimda Provinsi Sumatera Selatan," ujar Herman Deru saat melaksanakan Safari Ramadhan bersama Forkopimda.



la juga mengapresiasi jajaran Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan yang telah menjadi tuan rumah dan menyambut para jemaah dengan baik. Menurutnya, Safari Ramadhan menjadi sarana memperkuat sinergi antar lembaga sekaligus mendekatkan pemerintah dengan masyarakat.

Gubernur menilai pelaksanaan Ramadhan tahun ini berlangsung kondusif dan penuh semangat kebersamaan. Ia menyebut situasi tetap terjaga sejak awal, meskipun terdapat perbedaan penetapan awal puasa di sebagian kalangan.

"Alhamdulillah, seluruh lapisan masyarakat menjalankan Ramadhan dengan penuh kebersamaan. Situasi tetap kondusif dan tidak ada persoalan berarti sejak awal pelaksanaannya," katanya.

Dia juga meminta seluruh pihak terkait untuk melakukan pemantauan secara intensif terhadap stabilitas harga kebutuhan pokok selama Ramadhan. Langkah itu dinilai penting guna mengantisipasi lonjakan harga di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat.

"Saya minta dilakukan monitoring secara khusus agar tidak terjadi lonjakan harga kebutuhan pokok di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat selama Ramadhan," tegasnya.

Ia juga mengapresiasi kekompakan Forkopimda dan seluruh jajaran yang tetap aktif mengikuti rangkaian Safari Ramadhan di tengah padatnya agenda masing-masing.

Gubernur mengajak seluruh pihak untuk terus melaksanakan Safari Ramadhan sesuai jadwal yang telah ditetapkan serta menjaga semangat kebersamaan dan pelayanan kepada masyarakat.

"Marilah kita melaksanakan Safari Ramadhan ini sesuai jadwal yang telah ditentukan. Terima kasih kepada seluruh pihak, khususnya Kajati dan jajaran Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan yang telah menyambut kami dengan sangat baik," pungkasnya.

Gelar Operasi Pasar Murah

Pemprov Sumsel juga memastikan pelaksanaan Operasi Pasar Murah (OPM) dan Gerakan Pangan Murah (GPM) selama bulan suci Ramadhan hingga menjelang Idul Fitri 1447 Hijriah.

Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel, H

Edward Candra memastikan stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok tetap terjaga selama Ramadhan hingga Idul Fitri. Untuk itu ia

menekankan pentingnya komunikasi publik atas setiap program pengendalian harga yang dilaksanakan pemerintah daerah.

"Setiap OPD harus mempublikasikan kegiatan monitoring pasar dan jadwal

Monitoring harga dan ketersediaan bahan pokok dilakukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sumsel bersama Satgas Pangan di sejumlah pasar dan distributor, baik di Kota Palembang maupun kabupaten/kota lainnya. Langkah ini diambil untuk memastikan distribusi berjalan lancar serta mengantisipasi lonjakan harga yang tidak wajar selama Ramadhan.



Operasi Pasar Murah secara luas agar masyarakat mengetahui serta dapat memanfaatkan program tersebut," ujar Edward Candra.

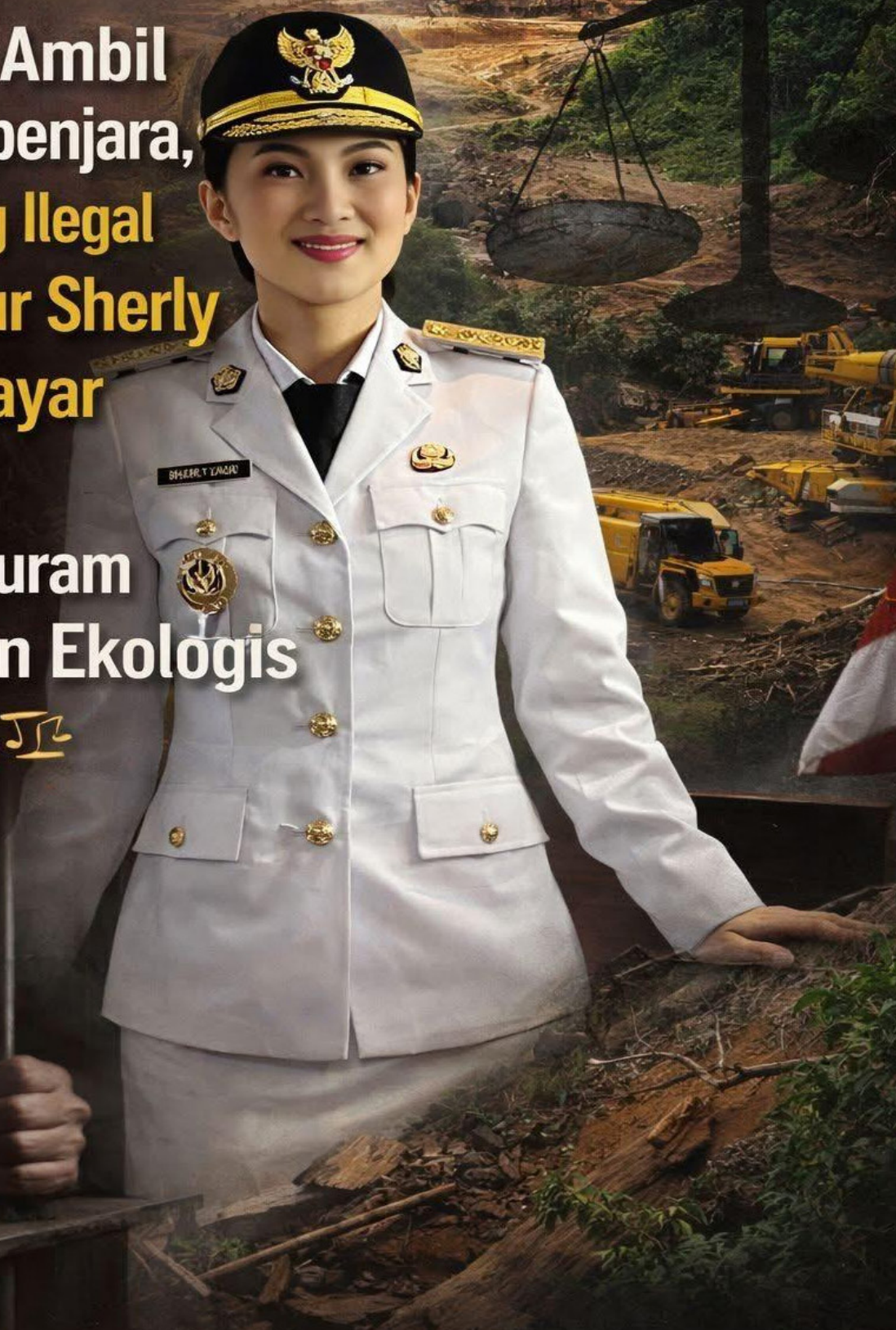
Ia menegaskan, meskipun inflasi Sumsel dalam kondisi relatif terkendali, pengawasan tetap harus diperketat. Pengawasan dilakukan melalui inspeksi mendadak (sidak) ke pasar-pasar dan distributor, termasuk pengawasan distribusi elpiji guna mencegah kelangkaan dan praktik penimbunan.

Sekda juga meminta agar cakupan lokasi kegiatan tahun ini diperluas, khususnya menjangkau masyarakat yang belum tersentuh program pada tahun sebelumnya.

Dengan sinergi antar-OPD serta pengawasan yang terjadwal dan berkelanjutan, Pemprov Sumsel optimistis stabilitas harga bahan pokok tetap terjaga sehingga masyarakat dapat menjalankan ibadah Ramadhan dan menyambut Idul Fitri dengan tenang dan nyaman. ●



**Rakyat Ambil
Kayu Dipenjara,
Tambang Ilegal
Gubernur Sherly
Cuma Bayar
Denda:
Potret Buram
Keadilan Ekologis
Kita** 🌲🌲 ⚖️



**Mata Hukum Sepertinya Warna-warni:
Hijau untuk Rakyat, Emas untuk Penguasa**

Keadilan di Indonesia tampaknya kini memiliki label harga yang jelas. Di saat seorang warga desa seringkali harus mendekam di balik jeruji besi hanya karena mengambil beberapa batang kayu untuk menyambung hidup, perusahaan tambang skala raksasa yang memabat puluhan hektare hutan tanpa izin justru bisa melenggang bebas hanya dengan melakukan transfer bank.

Keadilan di Indonesia tampaknya kini memiliki label harga yang jelas. Di saat seorang warga desa seringkali harus mendekam di balik jeruji besi hanya karena mengambil beberapa batang kayu untuk menyambung hidup, perusahaan tambang skala raksasa yang memabat puluhan hektare hutan tanpa izin justru bisa melenggang bebas hanya dengan melakukan transfer bank.

Kasus terbaru yang melibatkan PT Karya Wijaya (KW), perusahaan yang berafiliasi dengan Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, menjadi bukti nyata betapa "ramahnya" hukum bagi mereka yang bermodal. Denda administratif sebesar Rp500 miliar ditetapkan sebagai penebus dosa atas aktivitas tambang nikel ilegal seluas 51,3 hektare.

Hukum yang "Bisa Dibeli"

Denda ratusan miliar mungkin terdengar besar bagi masyarakat umum, namun di mata industri nikel yang ten-

gah booming, angka tersebut tak lebih dari sekadar "biaya tak terduga" dalam neraca keuangan. Melalui mekanisme perizinan dan investasi saat ini, sanksi pidana (penjara) seolah menjadi barang antik yang jarang disentuh.

Prioritas pemerintah saat ini tampaknya hanya bergeser pada Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Logikanya disederhanakan secara serampangan: perusahaan yang melanggar cukup membayar denda, dan urusan dianggap selesai. Inilah yang disebut oleh banyak aktivis sebagai "pemutihan dosa korporasi" yang dilegalkan oleh negara.

Ketidakadilan yang Kasat Mata

Kontrasnya sangat menyakitkan. Kita masih sering mendengar berita tentang masyarakat adat atau warga lokal yang dikriminalisasi karena memasuki

dan sumber air yang tercemar limbah.

Efek Jera yang Hilang: Jika hukuman bisa dibayar dengan uang, maka perusahaan tidak akan pernah takut untuk melanggar aturan lagi. Mereka hanya perlu menghitung: "Apakah margin keuntungan nikel lebih besar dari nominal dendanya?" Jika iya, maka pelanggaran akan terus dieksekusi sebagai strategi bisnis.

Keadilan Ekologis yang Terluka

Kasus PT Karya Wijaya dan perusahaan nikel lainnya di Maluku Utara menunjukkan bahwa keadilan ekologis kita sedang berada di titik nadir. Ketika pejabat publik dan korporasi terjalin dalam lingkaran aktivitas tambang yang bermasalah, sanksi administratif hanyalah formalitas untuk mencuci tangan. Tidak mengapa negara butuh pemasu-



kawasan hutan yang mereka tinggali turun-temurun. Bagi mereka, hukum adalah pedang yang tajam. Namun bagi korporasi yang merusak ekosistem secara sistematis, hukum berubah wujud menjadi kasir pembayaran.

Dampak dari prinsip "bayar untuk selesai" ini sangat fatal:

Hutan Tidak Bisa Kembali: Uang Rp500 miliar tidak akan pernah bisa membeli kembali keanekaragaman hayati yang hilang, tanah yang terkikis,

kan, tapi jangan jadikan ruang hidup rakyat sebagai tumbalnya.

Selama "denda" masih menjadi instrumen utama penegakan hukum lingkungan, maka selama itu pula hutan kita akan terus dijual kepada penawar tertinggi. Kita tidak hanya kehilangan pohon, kita sedang kehilangan rasa keadilan yang paling mendasar.

#MalukuUtara #TolakTambangIlegal #SherlyTjoanda #IndonesiaEmas #SaveHutanIndonesia

GELOMBANG BOIKOT BAYAR PAJAK, UJIAN KEPERCAYAAN PUBLIK DI AWAL 2026

Tagar #StopBayar-Pajak mendominasi dipicu oleh dua isu utama yang terjadi hampir bersamaan, keluhan lonjakan tagihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Jawa Tengah serta terungkapnya kasus korupsi baru di lingkungan otoritas pajak pada awal 2026.

Situasi ini menjadi ujian serius bagi keberlanjutan penerimaan negara, di tengah target pendapatan perpajakan dalam APBN 2026 yang dipatok sebesar Rp2.357,7 triliun atau naik sekitar 23 persen dibanding realisasi tahun sebelumnya.

Tekanan ekonomi akibat dampak lanjutan kenaikan PPN 12 persen juga membuat sentimen publik terhadap pengelolaan pajak semakin sensitif.

Bagi pemerintah, fenomena ini tidak lagi dapat dipandang sebagai sekadar tren digital, melainkan sinyal peringatan atas rapuhnya kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan.

Dua pemicu utama keresahan publik yakni keluhan lonjakan PKB di Jawa Tengah sejak pertengahan Februari 2026, masyarakat di berbagai daerah di Jawa Tengah ramai mengunggah bukti tagihan PKB yang dinilai melonjak tidak wajar. Sebagian menyebut nilai tagihan meningkat hingga mendekati dua kali

lipat dibanding tahun sebelumnya.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah merespons dengan menegaskan bahwa tidak ada kenaikan tarif resmi PKB pada 2026.

Penelusuran awal menunjukkan, lonjakan nominal yang dirasakan masyarakat lebih disebabkan oleh penyesuaian Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) serta akumulasi denda atau sanksi administrasi yang dihitung melalui sistem baru. Namun, minimnya penjelasan kepada publik membuat narasi "pajak naik diam-diam" berkembang luas di media sosial.

Kedua karena terungkapnya kasus korupsi pejabat pajak. Kemarahan publik semakin menguat setelah Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan terhadap pejabat pajak pada Februari 2026.

Dalam perkara tersebut, KPK menetapkan Kepala KPP Madya Banjarmasin berinisial MLY sebagai tersangka dugaan suap pengurusan restitusi PPN



senilai Rp1,5 miliar. Kasus ini berkaitan dengan manipulasi Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) dengan nilai pencairan restitusi yang diduga mencapai Rp48,3 miliar.

Kasus ini menambah daftar panjang praktik korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Sebelumnya, pada Januari 2026, penyidik juga menetapkan lima tersangka dalam perkara suap di KPP Madya Jakarta Utara.

Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah, Muhammad Masrofi, menilai kekhawatiran atas ajakan boikot pembayaran pajak di Jawa Tengah tidak perlu dibesar-besarkan.

Ia menyampaikan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat justru diperkirakan meningkat setelah pemerintah daerah menerapkan program relaksasi opsen PKB sebesar 5 persen.



“Adanya diskon kepatuhan akan meningkat, nanti masyarakat akan berpikir ulang, awalnya memboikot nanti mau kembali bayar pajak,” kata Masrofi belum lama ini.

Relaksasi tersebut berupa potongan 5 persen dari total opsen sebesar 16,6 persen. Opsen PKB merupakan pungutan tambahan atas pajak pokok PKB dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Untuk periode 2025-2026, besaran opsen PKB di Jawa Tengah ditetapkan sebesar 16,6 persen dari nilai pokok PKB, sedangkan opsen BBNKB sebesar 32 persen dari nilai pokok BBNKB.

Masrofi berharap kebijakan ini mampu mendorong masyarakat kembali membayar pajak.

“Harapannya adanya diskon bikin warga bayar pajak meningkat,” ujarnya.

Ia menjelaskan, penerimaan opsen sangat penting bagi kabupaten dan kota karena hasil pungutannya langsung masuk ke kas daerah.

“Dulu kan bagi hasil sama provinsi, sekarang langsung masuk ke daerah. Jadi, potensi pajak opsen tergantung dari keaktifan pembayaran pajak di masing-masing kabupaten kota,” ungkapnya.

Besaran opsen juga sangat dipengaruhi oleh NJKB.

“Kalau motor NJKB turun ya nilai pajak opsen-nya juga turun,” terangnya.

Berdasarkan data Bapenda Jawa Tengah, realisasi penerimaan PKB murni tanpa opsen sepanjang 2025 mencapai Rp3,96 triliun dari target Rp4,15 triliun.

Sementara itu, setelah dikenakan opsen, penerimaan PKB tercatat sebesar Rp2,1 triliun.

Untuk sektor BBNKB, realisasi peneri-

Brebes Rp47 miliar (37 persen), Pati Rp40 miliar (35,7 persen), dan Demak Rp42 miliar (35,5 persen).

Kebijakan opsen sendiri merupakan bagian dari penguatan pajak daerah sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Namun, Masrofi mengingatkan bahwa kebijakan pemutihan pajak pada 2025 berdampak pada berkurangnya potensi penerimaan daerah.

Selama tiga bulan program tersebut berlangsung, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tercatat kehilangan potensi pendapatan pajak hingga sekitar Rp300 miliar.



Lima daerah dengan kinerja PKB dan BBNKB Jateng 2025

SURAKARTA
sebesar Rp87 miliar (59,2 persen)
KOTA SEMARANG
Rp301 miliar (56,2 persen)
KOTA MAGELANG
Rp16 miliar (53 persen)
KABUPATEN SUKOHARJO
Rp74 miliar (50,2 persen).

maan mencapai Rp1,74 triliun dari target Rp2,5 triliun. Penurunan kinerja BBNKB dipengaruhi melemahnya daya beli masyarakat terhadap kendaraan baru.

Daerah dengan persentase opsen BBNKB tertinggi meliputi Kabupaten Tegal Rp41 miliar (41,6 persen), Kabupaten Kendal Rp35 miliar (39 persen),

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, menegaskan bahwa rencana Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan relaksasi pajak sebesar 5 persen bukan merupakan solusi jitu untuk meredakan keresahan masyarakat.

Aria Bima mengingatkan pemerintah agar tidak menutup mata terhadap kondisi ekonomi warga kelas menengah dan bawah yang saat ini sedang terjepit.

Menurutnya, mengejar target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak boleh dilakukan dengan cara memaksa atau memberatkan masyarakat yang sudah kesulitan.

“Pemerintah harus memperhitungkan kemampuan warganya, khususnya warga menengah dan miskin. Dalam meningkatkan pendapatan, jangan sampai mengabaikan daya beli mereka,” ujar Aria Bima. ●

PEMROV JATIM KUNCI PENGAWASAN DANA HIBAH DARI HULU KE HILIR

Pemerintah Provinsi Jawa Timur menegaskan komitmennya memperkuat sistem pengawasan dana hibah secara berlapis dan berkelanjutan. Skema ini dirancang untuk menutup celah penyalahgunaan anggaran sekaligus memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sepanjang siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).



Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa secara terbuka menegaskan bahwa proses penyaluran dana hibah di lingkungan pemerintah provinsi telah dijalankan sesuai prosedur selama pemeriksaan oleh KPK.

Pernyataan ini mencerminkan upaya pemerintah daerah menjaga kredibilitas mekanisme pengelolaan hibah.

"Proses penyaluran dana hibah di lingkungan pemerintah telah dijalankan sesuai dengan prosedur," katanya.

Kepala Biro Hukum Setdaprov Jatim, Adi Saroni, menegaskan bahwa pengawasan tidak hanya dilakukan pada tahap monitoring dan evaluasi, tetapi sejak

awal proses hibah.

"Pengawasan dana hibah di Jawa Timur dilakukan secara berlapis dan menjadi bagian dari seluruh tahapan pengelolaan APBD, mulai dari pengusulan sampai pertanggungjawaban," ujar Adi Saroni.

Menurut Adi, pengawasan internal dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) melalui Inspektorat. Sementara itu, audit eksternal dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan untuk memastikan transparansi dan kepatuhan terhadap regulasi.

Selain lembaga pengawas formal, fungsi kontrol juga melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Timur

sebagai representasi masyarakat, serta partisipasi publik melalui mekanisme pengaduan.

Seluruh unsur tersebut, kata Adi, disinergikan agar proses penyaluran dana hibah berjalan transparan, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pemprov Jatim menempatkan pencegahan penyimpangan sejak tahap paling awal, yakni ketika proposal hibah diajukan oleh calon penerima. Setiap usulan diverifikasi secara berjenjang, dimulai dari Sekretariat DPRD, lalu diteruskan ke organisasi perangkat daerah (OPD) sesuai kewenangannya.

Verifikasi tidak hanya mencakup kelengkapan administrasi, tetapi juga pemeriksaan lapangan untuk memastikan keberadaan lembaga, kesesuaian program, serta kelayakan penerima. Pada tahap ini, APIP turut melakukan re-viu guna mendeteksi potensi kelompok masyarakat fiktif, tumpang tindih penerima, maupun indikasi penyimpangan lainnya.

Dalam tahap penganggaran, alokasi dana hibah dibahas bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan DPRD melalui rangkaian rapat Badan Anggaran, komisi, fraksi, hingga persetujuan pada rapat paripurna.

Setelah hibah direalisasikan, pengawasan tetap berlanjut. Setiap penerima diwajibkan menyampaikan laporan pertanggungjawaban sebagai dasar evaluasi penggunaan dana.

Adi menegaskan bahwa pola pengawasan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat tata kelola hibah, terutama setelah adanya sorotan publik terhadap dugaan penyimpangan dana hibah di Jawa Timur yang sebelumnya juga menjadi perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi.

Untuk memperkuat kepastian hukum, Pemprov Jatim mewajibkan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sebelum pencairan dana.

Penerima hibah juga harus menandatangani pakta integritas serta surat pernyataan tanggung jawab mutlak.

Dokumen tersebut menjadi dasar

komitmen bahwa dana hibah digunakan sesuai peruntukan dan penerima bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kegiatan.

"Seluruh instrumen itu disiapkan agar tidak ada ruang penyalahgunaan dan penerima memahami konsekuensi hukum apabila melanggar," kata Adi.

Melalui pengawasan yang terintegrasi dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga pelaporan, Pemprov Jatim menargetkan pengelolaan dana hibah yang semakin transparan dan akuntabel pada tahun 2026 dan seterusnya.

Pemerintah daerah berharap sistem ini tidak hanya menekan potensi korupsi, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik bahwa dana hibah benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat dan pembangunan di Jawa Timur.

Berdasarkan laporan audit keuangan

Pemprov Jawa Timur tahun anggaran 2023, BPK RI memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan pemerintah provinsi Jawa Timur.

Namun BPK juga mencatat kelemahan pada pengendalian internal terkait monitoring dan evaluasi pertanggungjawaban dana hibah, menunjukkan kebutuhan perbaikan mekanisme pengawasan.

Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, pernah mengungkap sejumlah potensi penyimpangan dalam pengelolaan dana hibah seperti duplikasi penerima dan rekening fiktif. KPK mencatat adanya 757 rekening dengan identitas identik dalam periode pengelolaan tertentu, yang menjadi sorotan utama untuk perbaikan sistematis.

"Pengelolaan hibah di Jawa Timur masih menghadapi tantangan serius... minimnya transparansi menjadi faktor utama yang membuka celah praktik koruptif," ujar Budi Prasetyo. ●

"Pengawasan dana hibah di Jawa Timur dilakukan secara berlapis dan menjadi bagian dari seluruh tahapan pengelolaan APBD, mulai dari pengusulan sampai pertanggungjawaban"



Setahun Jeje–Asep

CAPAIAN MEMBAIK, TANTANGAN MASIH BESAR

Satu tahun kepemimpinan Jeje Ritchie Ismail dan Wakil Bupati Asep Ismail di Kabupaten Bandung Barat (KBB), sejumlah indikator makro menunjukkan perbaikan.

Namun, di balik capaian tersebut, persoalan struktural mulai dari ketimpangan, perlambatan ekonomi, hingga reformasi birokrasi masih membayangi efektivitas pemerintahan.

Evaluasi tersebut disampaikan Ketua Pusat Kajian Politik, Ekonomi, dan Pembangunan (Puskapol Ekbang), Holid Nurjamil dengan mengacu pada rilis resmi Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung Barat dan Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat periode 2024-2025.

"Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2025 tercatat 71,65, naik dari 70,77 pada 2024. Ini menunjukkan perbaikan kualitas hidup, pendidikan, dan standar hidup, meski peningkatannya belum signifikan," ujar Holid belum lama ini.

Sebagai pembandingan, IPM Jawa Barat meningkat dari 74,92 menjadi 75,90 pada periode yang sama. Artinya, laju peningkatan kualitas hidup KBB masih tertinggal secara regional.

Kemiskinan dan Pengangguran Menurun

Persentase penduduk miskin di KBB turun dari 10,49 persen pada 2024 menjadi 9,87 persen pada 2025. Penurunan ini menjadi salah satu catatan positif pemerintahan Jeje–Asep.

Meski begitu, angkanya masih berada di atas rata-rata Jawa Barat yang berada

di kisaran 7,02 persen.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) juga menurun tipis, dari 6,75 persen menjadi 6,60 persen. Capaian ini relatif sejalan dengan rata-rata Jawa Barat sebesar 6,77 persen, tetapi masih menunjukkan pasar kerja yang belum sepenuhnya pulih.

Dari sisi pemerataan, Rasio Gini KBB berada pada angka 0,40. Menurut Holid, angka ini mengindikasikan ketimpan-

gan pendapatan masih cukup kuat.

"Kesenjangan antara kawasan perkotaan dan perdesaan belum teratasi secara optimal. Ini menjadi tantangan utama pembangunan yang berkeadilan," katanya.

Pertumbuhan ekonomi KBB pada 2025 tercatat 4,94 persen, sedikit melambat dibanding 5,00 persen pada 2024. Walaupun masih tergolong stabil, perlambatan tersebut dinilai menjadi sin-



yal perlunya penguatan sektor-sektor produktif, khususnya industri pengolahan, pariwisata, dan UMKM.

Sementara itu, Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita meningkat dari sekitar Rp30,62 juta pada 2024 menjadi Rp32,5 juta pada 2025. Namun, angka ini masih jauh tertinggal dibandingkan rata-rata PDRB per kapita Jawa Barat yang telah melampaui Rp56 juta.

Pemerintah daerah menjalankan sejumlah proyek percepatan pembangunan jalan, drainase, dan fasilitas umum. Meski demikian, dampaknya dinilai belum merata, terutama di wilayah pinggiran dan perdesaan.

Holid menilai, pembangunan fisik masih cenderung terkonsentrasi di kawasan dengan aktivitas ekonomi tinggi, sehingga belum sepenuhnya menjawab kebutuhan konektivitas dan pelayanan dasar masyarakat desa.

Dari sisi fiskal, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) KBB dilaporkan mencapai 100 persen dari target. Sejumlah sektor pajak daerah mengalami peningkatan.

Namun, pajak hotel dan restoran, pajak hiburan, serta opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang dikelola melalui Samsat Jawa Barat dilaporkan tidak mencapai target.

"Capaian ini belum mampu membentuk basis PAD yang kuat dan berkelanjutan untuk menopang pembiayaan pembangunan jangka menengah," tegas Holid.

Sorotan lain diarahkan pada reformasi birokrasi. Hingga 20 Februari 2026, sejumlah jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrasi, serta jabatan penguasaan di lingkungan Pemkab Bandung Barat masih belum terisi.

Kondisi tersebut dinilai berdampak pada lambatnya pengambilan keputusan, proses administratif, dan mutu pelayanan publik. Inovasi daerah, termasuk digitalisasi layanan dan pengembangan ekonomi berbasis teknologi lokal, juga belum terlihat menonjol.

Sebagai pembanding, analisis kebijakan publik dari lingkungan akademik menyebutkan bahwa pengisian jabatan strategis dan percepatan digitalisasi menjadi kunci keberhasilan reformasi birokrasi di daerah.

"Konsistensi penguatan manajemen talenta dan penyederhanaan proses lay-

anan digital sangat menentukan kualitas pelayanan publik," ujar peneliti tata kelola pemerintahan dari Universitas Padjadjaran tersebut.

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat melalui pernyataan resmi Bagian Humas menyatakan bahwa pengisian jabatan struktural dan percepatan transformasi digital tengah diproses secara bertahap sesuai ketentuan perundang-undangan dan sistem merit.

Secara umum, satu tahun kepemimpinan Jeje-Asep menunjukkan perbaikan pada sejumlah indikator dasar, khususnya penurunan kemiskinan dan pengangguran. Namun, perlambatan pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan, serta tersendatnya reformasi birokrasi menjadi pekerjaan rumah besar yang harus segera dituntaskan.



Puskapol Ekbang menilai, satu tahun pertama cukup untuk memetakan persoalan struktural daerah. Memasuki tahun kedua, publik menantikan langkah yang lebih tajam, inovatif, dan konsisten agar arah pembangunan tidak hanya tercermin dalam statistik, tetapi benar-benar dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Bandung Barat.

Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail menyebut pemerintah daerah memprioritaskan pembenahan di sektor infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

"Alhamdulillah capaian-capaian yang sudah kami raih di tahun pertama menjabat sudah ada peningkatan mulai dari IPM meningkat, angka kemiskinan menurun, pengangguran juga menurun," kata Jeje.

Peneliti kebijakan publik Universitas Padjadjaran, Yogi Suprayogi Sugandi, menilai bahwa tantangan terbesar Kabupaten Bandung Barat saat ini bukan lagi pada perencanaan, tetapi pada konsistensi eksekusi kebijakan.

"Perbaiki indikator makro seperti IPM dan kemiskinan menunjukkan arah kebijakan sudah relatif tepat. Namun, tanpa percepatan reformasi birokrasi, terutama pengisian jabatan strategis dan penguatan sistem kerja berbasis kinerja, dampak kebijakan sulit dirasakan secara merata oleh masyarakat," kata Yogi.

Ia menambahkan, penguatan layanan publik berbasis digital dan kolaborasi lintas perangkat daerah menjadi prasyarat untuk mempercepat pemerataan pembangunan di wilayah pinggiran.

Sementara, Direktur Riset Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Badiul Hadi menilai kinerja PAD Kabupaten Bandung Barat perlu diarahkan pada penguatan basis pajak jangka panjang.

"Realisasi PAD yang mencapai target memang positif. Tetapi ketergantungan pada sektor-sektor yang fluktuatif, seperti hotel, restoran, dan hiburan, membuat struktur pendapatan daerah menjadi rentan. Pemerintah daerah perlu memperluas basis pajak dan retribusi yang bersumber dari aktivitas ekonomi produktif," ujarnya.

Menurut Badiul, optimalisasi sektor UMKM, kawasan industri, dan penguatan sistem pendataan wajib pajak daerah menjadi kunci untuk meningkatkan kemandirian fiskal. ●

JAKARTA MENUJU KOTA SINEMA 2027

Jakarta terus menggeliat untuk bertahan sebagai kota metropolitan sekaligus pusat bisnis. Salah satunya, menyediakan peluang masa depan bagi generasi muda.

Yang mengemuka belakangan ini antara lain menyiapkan Jakarta sebagai Kota Sinema. Kota Sinema merupakan visi strategis Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membangun ekosistem perfilman yang utuh dan berkelanjutan.

Patokan dan lini masa sudah tersusun. Jakarta Kota Sinema ditargetkan tercapai sepenuhnya pada 2027 bertepatan dengan HUT ke-500 Jakarta.

Visi ini mencakup penguatan seluruh rantai industri, mulai dari produksi dan distribusi hingga pendidikan sumber daya manusia dan dampak ekonomi bagi kota. Dengan begitu, Jakarta sebagai kota bisnis metropolitan pun lebih terjamin kesinambungannya.

Langkah demi langkah menuju Jakarta Kota Sinema terus melaju. Salah satunya adalah Youth Film Festival (JYFF) 2026.

Penuh semangat, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, menggelar pe-

luncuran (Kick Off) Jakarta Youth Film Festival (JYFF) 2026 di Djakarta Theater XXI, Jalan MH Thamrin, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa, 3 Februari 2026. "Jakarta Youth Film Festival 2026 adalah langkah strategis memperkuat subsektor perfilman dan konten audio visual di Jakarta. Kami meyakini film memiliki kekuatan besar untuk membangun kesadaran, membentuk karakter, serta memperkuat identitas bangsa," kata Rano yang juga aktor terkemuka yang pernah memerankan figur Si Doel Anak Betawi.

Rano menegaskan, eksistensi festival ini turut mendukung visi Jakarta Kota Sinema. Visi itu, menurut Rano, tidak hanya berfokus pada festival atau produksi film, tetapi juga pada pembangunan ekosistem perfilman yang terintegrasi mulai dari pendidikan, produksi, distribusi, hingga apresiasi karya.

Menurut Rano, selama ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus berupaya memperkuat regulasi dan fasilitas indus-





tri film. Hal itu, katanya, sebagai upaya membangun fondasi agar ekosistem perfilman Jakarta tumbuh lebih maju, berdaya saing dan berkelanjutan. "Jakarta Kota Sinema bukan sekadar slogan, melainkan agenda pembangunan kota," tegasnya.

Ia pun optimistis Jakarta akan menjadi magnet bagi sineas muda dunia dalam waktu dekat. "Saya membayangkan kick-off Jakarta Youth Film Festival ini akan panjang. Mungkin dalam waktu dua tahun, youth filmmakers internasional akan datang ke Jakarta," kata Rano Karno.

Rano menilai festival ini menjadi langkah awal penting untuk mewujudkan visi Jakarta sebagai kota sinema dunia. Menurutnya, film, khususnya film pendek, bukan sekadar karya murah, melainkan medium dengan kekuatan konsep yang besar dan berpotensi melahirkan sineas kelas dunia.

"Banyak sutradara besar lahir dari film pendek. Kreativitas itu kuncinya ada di konsep. Film pendek itu bukan film murah, tapi film dengan pemikiran yang kuat," ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya ekosistem yang berkelanjutan, mulai festival, workshop, hingga keterlibatan investor. Rano meyakini ke depan JYFF tidak hanya diikuti pembuat film, tetapi juga akan menarik perhatian pelaku industri dan investor perfilman.

Jakarta Youth Film Festival 2026 di-

harapkan menjadi wadah bagi generasi muda, khususnya Milenial dan Gen Z, untuk mengekspresikan kreativitas sekaligus memperkuat posisi Jakarta di peta industri film nasional dan internasional.

Sebagai catatan penting, festival film JYFF untuk anak muda ini mendapat dukungan pembiayaan dari komunitas bisnis. Bahkan Bank Indonesia Kantor Perwakilan Jakarta turun langsung menjadi penyelenggara.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi DKI Jakarta Iwan Setiawan menyampaikan sektor ekonomi kreatif memiliki peran strategis dalam perekonomian Jakarta. Berdasarkan data BI, ekonomi kreatif DKI Jakarta tumbuh sebesar 9,4 persen, namun kontribusinya terhadap PDRB masih sekitar 11,4 persen, sehingga ruang pengembangannya masih sangat besar.

"Ini menunjukkan peluang yang sangat besar untuk kita dorong. Salah satunya melalui sektor film yang memiliki multiplier effect kuat ke sektor lain, seperti transportasi, kuliner, fashion, hingga penciptaan lapangan kerja," jelas Iwan.

Iwan menambahkan, JYFF 2026 merupakan bagian dari komitmen BI DKI Jakarta untuk mengimplementasikan ide dan visi Pemprov DKI dalam mengembangkan ekonomi kreatif, khususnya perfilman. Festival ini juga menjadi rangkaian dari Jakarta Creative Festival dan perayaan HUT DKI Jakarta. "Pak Wagub menyampaikan visinya, dan kami di BI siap mengeksekusi. Ini bentuk komitmen kami untuk mendorong Jakarta menjadi kota sinema dunia," tandasnya.

Tahun depan Jakarta memperingati lima abad perjalanannya. Semoga Kota Sinema telah terwujud nyata. ●



Mudik Gratis 2026 dari Jakarta

ARMADA DITAMBAH DAN MOTOR IKUT DIANGKUT

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali menyelenggarakan program Mudik Gratis 2026 melalui Dinas Perhubungan DKI Jakarta.

Program ini ditujukan bagi warga Jakarta yang ingin pulang kampung saat Idul Fitri dengan layanan transportasi tanpa biaya.

Antusiasme masyarakat terlihat sejak hari pertama pendaftaran. Sekitar 3.000 orang tercatat telah mendaftar pada tahap awal.

Wakil Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Ujang Harmawan mengatakan lonjakan pendaftar terjadi sejak portal resmi dibuka.

"Pada tahap 1 kurang lebih 3.000 pemudik sudah mendaftar," ujarnya, Rabu 25 Februari 2026.

Tahun ini, Pemprov DKI Jakarta menyediakan layanan angkutan bus penumpang sekaligus fasilitas pengiriman sepeda motor menggunakan truk khusus.

"Skema ini dirancang untuk menekan penggunaan sepeda motor jarak jauh sekaligus meningkatkan keselamatan pemudik," lanjutnya.

Layanan mudik mencakup 20 kota dan kabupaten tujuan di berbagai provinsi. Selain itu, pengiriman sepeda motor dilayani ke enam kota, yakni Semarang, Kebumen, Solo, Yogyakarta, Wonogiri, dan Sidoarjo.

Pendaftaran dilakukan secara daring melalui laman resmi mudikgratis.jakarta.go.id dan akan ditutup otomatis setelah kuota terpenuhi.



Jadwal Keberangkatan dan Arus Balik

Pemprov DKI Jakarta menetapkan jadwal sebagai berikut:

- ▶ Keberangkatan pemudik dari Jakarta: 17 Maret 2026, berlokasi di Monumen Nasional (Monas).
- ▶ Pengiriman sepeda motor dari Jakarta: 16 Maret 2026 dari Terminal Pulogadung.
- Batas penyerahan sepeda motor: 15 Maret 2026 pukul 17.00 WIB.
- ▶ Arus balik pemudik: 26 Maret 2026

dari 20 kota tujuan menuju Terminal Terpadu Pulo Gebang.

- ▶ Arus balik sepeda motor: 25 Maret 2026 dari enam kota tujuan menuju Terminal Pulogadung.

Pada 2026, armada yang disiapkan untuk arus mudik mencapai 366 bus, meningkat dibandingkan 293 bus pada 2025.

Untuk arus balik, disediakan 295 bus dari 20 daerah tujuan dengan kuota sekitar 11.800 penumpang.

Selain bus, Pemprov DKI Jakarta juga



mengoperasikan sekitar 15 truk pengangkut sepeda motor saat arus mudik dan 15 truk untuk arus balik.

Persyaratan Pendaftaran

Calon peserta wajib menyiapkan:

- ▶ KTP DKI Jakarta (diutamakan),
- ▶ Kartu Keluarga (KK),
- ▶ STNK bagi peserta yang mengikutsertakan sepeda motor.

Dalam satu pendaftaran, peserta dapat menambahkan maksimal tiga anggota keluarga yang tercantum dalam satu KK. Seluruh dokumen diunggah saat pendaftaran daring dan akan diverifikasi oleh petugas di lokasi verifikasi yang telah ditentukan.

Peserta yang terdeteksi mengikuti program mudik gratis lain akan otomatis dibatalkan. Tiket juga tidak boleh diperjualbelikan atau dipindahtangankan.

Pendaftaran dibagi dalam tiga klaster berdasarkan kota tujuan, dengan rentang waktu 22 Februari hingga 2 Maret 2026. Proses verifikasi dilakukan secara bertahap hingga 5 Maret 2026 di enam lokasi Suku Dinas Perhubungan wilayah Jakarta.

Pemprov DKI Jakarta mengimbau calon peserta menyesuaikan jadwal pendaftaran sesuai klaster kota tujuan serta memastikan seluruh data yang diunggah sesuai dokumen resmi.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menyampaikan pemerintah akan segera menerbitkan surat edaran

(SE) yang meminta warga melapor kepada pengurus lingkungan sebelum meninggalkan rumah.

“Jadi, kami akan membuat surat edaran yang akan ditandatangani oleh Sekda, meminta kepada warga yang mudik untuk melaporkan terlebih dahulu, apakah kepada RT, RW, atau kelurahan setempat,” kata Pramono, Jumat 27 Februari 2026.

la juga menegaskan, pengaktifan kembali sistem keamanan lingkungan

atau siskamling akan digalakkan selama periode mudik guna menjaga keamanan permukiman.

Melalui program Mudik Gratis Jakarta 2026, Pemprov DKI Jakarta menargetkan perjalanan mudik yang lebih aman, nyaman, dan terkoordinasi. Fasilitas angkutan massal dan pengiriman sepeda motor diharapkan mampu menekan kepadatan lalu lintas sekaligus mengurangi risiko kecelakaan di jalan raya. ●



Mobil Dinas Rp8,5 Miliar Gubernur Kaltim

MARWAH DAERAH ATAU BEBAN ANGGARAN?

Pengadaan mobil dinas baru Gubernur Kalimantan Timur kembali menjadi perbincangan publik. Anggaran senilai Rp8,5 miliar dinilai sebagian kalangan tidak sejalan dengan semangat efisiensi, meski pemerintah daerah menegaskan pengadaan tersebut telah sesuai ketentuan.

Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas'ud menyatakan pembelian kendaraan dinas dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah.

Menurut Rudy, aturan tersebut membatasi kapasitas mesin kendaraan kepala daerah, maksimal 3.000 cc untuk sedan dan 4.200 cc untuk kendaraan jenis jeep.

"Sesuai Permendagri Nomor 7 Tahun 2006, pengadaan mobil dinas untuk kepala daerah jenis sedan kapasitas mesinnya 3.000 cc, sedangkan jeep 4.200 cc. Kami hanya memesan yang 3.000 cc saja," ujar Rudy, Rabu 25 Februari 2026.

Ia menilai penggunaan kendaraan dengan spesifikasi tinggi merupakan hal wajar, mengingat posisi Kalimantan Timur sebagai wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara.

"Masa iya kepala daerahnya pakai mobil ala kadarnya? Jangan dong, jaga marwah Kaltim, marwah masyarakat Kalimantan

Timur," ucapnya.

Terkait nilai pengadaan yang mencapai Rp8,5 miliar, Rudy menyebut pemerintah provinsi hanya memesan kendaraan berdasarkan spesifikasi teknis.

"Persoalan harga, ada rupa ada harga, ada mutu ada harga. Kami tidak mengikuti harganya berapa, kami hanya pesan mobilnya saja," katanya.

Rudy juga menegaskan bahwa hingga kini dirinya belum menggunakan kendaraan dinas untuk operasional di daerah. Selama hampir satu tahun menjabat, ia mengaku masih memakai mobil pribadi.

"Pemprov Kaltim belum menyediakan mobil untuk keperluan di Kaltim. Yang ada saat ini mobil pribadi, kondisinya sudah hancur semua. Tapi tidak apa-apa untuk keperluan masyarakat Kaltim," ujarnya.

Adapun kendaraan dinas yang baru diadakan, menurut Rudy, ditempatkan di Jakarta untuk menunjang kegiatan nasional dan internasional.

"Kaltim adalah Ibu Kota Nusantara. Tamu kita bukan hanya kepala daerah se-Indonesia, tetapi juga masyarakat global. Mosok kepala daerahnya mobil dinasnya ala kadarnya?" tuturnya.

Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman, Purwadi Purwoharsojo meminta Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur meninjau ulang pengadaan kendaraan dinas tersebut.

Ia menilai belanja kendaraan



mewah tidak sejalan dengan kondisi fiskal daerah pada 2026.

Menurut Purwadi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kalimantan Timur 2026 turun menjadi Rp15 triliun dari Rp21 triliun pada 2025. Penurunan terutama dipicu merosotnya pendapatan Dana Bagi Hasil (DBH), yang pada 2026 diproyeksikan hanya Rp3,13 triliun, jauh dibandingkan Rp9,9 triliun pada tahun sebelumnya.

Purwadi juga mencatat total alokasi peremajaan kendaraan pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mencapai sekitar Rp11 miliar.

“Kondisi keuangan Pemprov Kaltim ini kalau diibaratkan masih kuning, belum merah. Artinya masih bisa berjalan dengan catatan dikelola dengan baik melalui efisiensi sesuai skala prioritas,” ujarnya.

Purwadi juga menyinggung budaya belanja konsumtif di kalangan pejabat daerah, termasuk kebijakan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) di lingkungan Pemprov Kaltim, yang disebut mencapai puluhan juta rupiah per bulan bagi pejabat tertentu.

Polemik semakin meluas setelah Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto ikut menyoro kebijakan tersebut.

“Sebaiknya tidak berlebihan, sesuai saja dengan kebutuhan yang ada,” ujarnya, Kamis 26 Februari 2026.

Bima Arya mengingatkan bahwa pengadaan barang milik daerah harus mengacu pada spesifikasi teknis serta melewati uji kelayakan, terlebih di tengah kebijakan efisiensi anggaran nasional.

“Apakah pembelanjaan mobil dinas sudah sesuai dengan kebutuhan, apakah sudah layak dalam masa efisiensi seperti ini,” katanya.

Ia juga mengungkapkan telah berkomunikasi langsung dengan Rudy. Dari penjelasan gubernur, diketahui bahwa selama ini aktivitas kedinasan di Kalimantan Timur masih menggunakan kendaraan pribadi.

Sementara, Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, Budi Prasetyo menegaskan seluruh proses pengadaan barang dan jasa di pemerintah daerah harus berjalan transparan dan akuntabel.

“Dalam konteks belanja daerah harus dilakukan perencanaan kebutuhan. Dan yang terpenting, pengadaan ini tidak

menjadi ruang tindak pidana korupsi, pengkondisian, penyimpangan, markup harga, downgrade spesifikasi,” ujarnya.

Menurut Budi, perencanaan yang matang menjadi kunci agar belanja daerah tidak menyimpang dari tujuan awal. Ia menegaskan praktik pengondisian pemenang, penggelembungan harga, maupun penurunan spesifikasi harus dihindari.

KPK, kata dia, juga melakukan pemantauan melalui fungsi koordinasi dan supervisi, termasuk terhadap penggunaan kendaraan dinas pejabat.

premium.

Berdasarkan spesifikasi yang beredar di lingkungan otomotif, kendaraan dinas tersebut diduga merupakan varian SUV mewah setara kelas Range Rover Autobiography LWB PHEV.

Mobil ini memadukan mesin bensin 3.0 liter turbo dengan motor listrik. Sistem PHEV memungkinkan kendaraan melaju menggunakan tenaga listrik murni dalam jarak tertentu sebelum mesin bensin bekerja membantu.

Total tenaga gabungan mencapai sekitar 434 tenaga kuda dengan torsi



“Soal mobil dinas, KPK melalui fungsi koordinasi dan supervisi melakukan pemantauan. Pasca-dipakai pejabat periode itu, harusnya dikembalikan. Bukan dikuasai dan ini berpotensi jadi tindak pidana korupsi,” tegasnya.

Terlepas dari polemik anggaran, kendaraan yang dianggarkan Rp8,5 miliar tersebut menarik perhatian dari sisi teknis. Mobil ini masuk kategori SUV plug-in hybrid (PHEV) berkapasitas mesin sekitar 3.000 cc, berpengerak empat roda, dan memiliki kemampuan off-road

sekitar 620 Nm. Konfigurasi tersebut memberi dorongan kuat pada putaran rendah, karakter yang dibutuhkan untuk medan menanjak, jalan berlumpur, serta aktivitas lapangan.

Di sektor kaki-kaki, kendaraan kelas ini umumnya dibekali sistem all-wheel drive permanen, suspensi udara adaptif, serta pengaturan mode berkendara untuk berbagai permukaan jalan. Fitur tersebut membuat kendaraan mampu beradaptasi pada kondisi geografis Kalimantan Timur yang beragam. ●



PLTSA PALEMBANG DISIAPKAN JADI ANDALAN ENERGI BERBASIS SAMPAH

Pemerintah Kota Palembang kini tengah memantapkan langkah besar dalam transformasi pengelolaan limbah perkotaan melalui proyek Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSA).

Fasilitas ini diproyeksikan tidak hanya sekadar menjadi solusi kebersihan, tetapi juga bertransformasi menjadi tulang punggung sistem energi berkelanjutan yang mampu mengolah hingga 1.000 ton sampah setiap harinya.

Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, mengungkapkan optimisme tinggi terhadap fasilitas ini.

Dalam keterangannya, ia menjelaskan bahwa PLTSA tersebut dirancang dengan kapasitas luar biasa untuk menghasilkan energi listrik bersih sebesar 20 Megawatt (MW).

Kehadiran proyek ini menjadi jawaban konkret atas masalah produksi sampah harian Palembang yang saat ini menyentuh angka 1.100 hingga 1.200 ton.

"Efisiensi yang ditawarkan sangat signifikan karena mampu mereduksi volume sampah yang masuk ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) hingga mencapai 80 persen," katanya.

Selain mengurangi ketergantungan pada lahan pembuangan, langkah ini juga krusial dalam menekan produksi gas metan yang merusak atmosfer.

Mengenai aspek kesehatan, pemerintah menjamin operasional PLTSA tidak akan mencemari udara sekitar berkat teknologi filtrasi berlapis serta pemantauan ketat terhadap parameter udara seperti dioksin dan furan agar tetap memenuhi baku mutu lingkungan.

Namun, visi besar untuk menjadikan PLTSA sebagai tulang punggung energi ini bukan tanpa tantangan. Ratu Dewa mengakui bahwa sisi logistik masih menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan.

Agar mesin dapat beroperasi stabil selama 24 jam, diperlukan distribusi sampah yang konsisten sekitar 40 hingga 50 ton per jam. Saat ini, Palembang masih mengalami kekurangan sekitar 65 unit armada pengangkut dari total kebutuhan ideal sebanyak 225 unit.

“Untuk itu, pemerintah berencana melakukan peremajaan kendaraan tua serta pengadaan unit baru agar manajemen sampah berbasis data dapat berjalan lebih terukur,” jelas Ratu Dewa.

Meski teknologi canggih telah disiapkan di hilir, Ratu Dewa mengingatkan bahwa partisipasi masyarakat tetap menjadi jantung dari keberhasilan sistem ini. Melalui program “Satu Kelurahan Satu Bank Sampah”, pemerintah mendorong warga untuk melakukan pemilahan sejak dari sumbernya.

Saat ini, sebanyak 96 bank sampah telah aktif beroperasi di 107 kelurahan dengan misi mengurangi beban sampah sistem utama sekaligus menggerakkan ekonomi kerakyatan melalui daur ulang.

Ratu Dewa menegaskan bahwa sistem secanggih apa pun tidak akan berjalan optimal tanpa dukungan warga melalui prinsip 4R (Reduce, Reuse, Recycle, Replace). Baginya, kolaborasi antara teknologi PLTSA sebagai penyokong energi dan kesadaran masyarakat adalah kunci utama untuk menciptakan ekosistem lingkungan yang lebih bersih dan mandiri bagi masa depan Kota Palembang.

Selain manfaat lingkungan yang nyata, proyek PLTSA ini juga diproyeksikan menjadi motor penggerak ekonomi baru bagi pendapatan asli daerah.

“Dengan hasil energi listrik sebesar 20 Megawatt, Pemerintah Kota Palembang memiliki peluang untuk menjalin kerja sama strategis dengan pihak PLN dalam menyalurkan energi bersih ini ke jaringan listrik kota.

Pendapatan yang dihasilkan dari penjualan listrik tersebut nantinya dapat diputar kembali untuk membiayai pemeliharaan infrastruktur perkotaan dan penguatan sistem sanitasi, sehingga pengelolaan sampah tidak lagi menjadi beban biaya semata, melainkan aset yang menguntungkan bagi pembangunan daerah.

Ke depannya, Ratu Dewa berharap keberhasilan PLTSA Palembang ini dapat menjadi cetak biru (blueprint) bagi kota-kota besar lainnya di Indonesia dalam mengimplementasikan konsep ekonomi sirkular.

Pemerintah Kota berkomitmen untuk terus mengintegrasikan teknologi ini dengan sistem smart city, di mana setiap

pergerakan truk sampah dan volume limbah yang terolah dapat dipantau secara real-time melalui pusat kendali data.

Dengan menjadikan sampah sebagai tulang punggung energi, Palembang tidak hanya sedang berupaya membersihkan wajah kota, tetapi juga sedang membangun fondasi bagi peradaban perkotaan yang lebih modern, mandiri,

untuk memastikan ambang batas lingkungan tetap aman.

Dari total energi yang dihasilkan, sekitar 17,7 MW direncanakan masuk ke jaringan listrik PLN. Sisanya digunakan untuk operasional fasilitas.

Namun, Mustain mengakui masih ada tantangan dalam sistem distribusi sampah. Saat ini, Palembang memiliki



dan berkelanjutan.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Palembang, Akhmad Mustain, menjelaskan sampah yang masuk akan ditampung lebih dulu di bunker selama kurang lebih tujuh hari sebelum masuk tahap pembakaran (combustion). Proses itu dilengkapi teknologi penyaring emisi berlapis dan pemantauan berkala

sekitar 160 armada pengangkut yang melayani 18 kecamatan. Untuk mendukung operasional maksimal PLTSA, dibutuhkan sedikitnya 220 unit armada atau masih kurang sekitar 60 kendaraan.

“Perlu penambahan dan peremajaan armada agar distribusi sampah dari TPS ke fasilitas berjalan tepat waktu dan sesuai kapasitas,” ujarnya. ●

TUNJUKKAN KOMITMEN SEJAHTERAKAN RAKYAT

Kehadiran investasi di Bumi Serasan Sekate harus berjalan selaras dengan perlindungan hak-hak dasar dan kenyamanan rakyat di Kabupaten Musi Banyuasin.

Salah satunya adalah pembangunan jalan layang khusus angkutan batubara di Desa Kaliberau Kecamatan Bayung Lencir yang diresmikan oleh Bupati Muba, HM Toha Tohet dan Gubernur Sumsel, Herman Deru.

Pembangunan overpass ini merupakan bagian dari sistem jalur logistik mandiri yang akan memisahkan sepenuhnya arus kendaraan tambang dari jalan nasional. Dengan hilangnya perlintasan sebidang (zero crossing), risiko kecelakaan dapat ditekan seminimal mungkin dan kelancaran arus lalu lintas bagi pengguna jalan umum dapat kem-

het memberikan pesan yang sangat lugas dan tanpa kompromi kepada pihak perusahaan. Beliau menyoroti dampak lingkungan yang sering terabaikan, terutama polusi debu yang mengganggu kesehatan warga serta menurunkan produktivitas kebun sawit di sekitar lokasi operasional.

Dengan tegas, Bupati menyatakan bahwa kekayaan alam Muba silakan dikelola, namun jangan sampai merusak lingkungan apalagi membiarkan masyarakat “makan debu”.

Pernyataan ini menegaskan komitmen bahwa kesejahteraan dan kesehatan masyarakat Musi Banyuasin adalah



berjalan normal tanpa hambatan kendaraan bertonase besar yang sering memicu kemacetan.

Namun, di balik dukungan penuh terhadap proyek strategis milik PT Musi Mitra Jaya (MMJ) ini, Bupati Toha To-

het menegaskan bahwa kesejahteraan dan kesehatan masyarakat Musi Banyuasin adalah prioritas yang tidak bisa ditawar oleh kepentingan bisnis mana pun.

Senada dengan visi tersebut, Gubernur Sumsel H. Herman Deru mengapresiasi ketegasan dan gerak cepat Bupati Muba dalam memfasilitasi solusi

terhadap masalah Over Dimension Over Load (ODOL).

Kehadiran jalur khusus ini diharapkan menjadi standar baru bagi perusahaan lain dalam menjaga ketahanan jalan negara.

Perkuat Sinergitas Wilayah

Selain meresmikan pembangunan jembatan layang khusus batubara ini, Bupati HM Toha Tohet juga melaksanakan kunjungan kerja intensif di wilayah Kecamatan Bayung Lencir dengan mendatangi Koramil dan Polsek Bayung Lencir, guna memperkuat koordinasi keamanan dan ketertiban masyarakat. Kunjungan ini untuk menekankan pentingnya sinergitas antara pemerintah daerah dan aparat keamanan dalam menjaga kondusifitas wilayah perbatasan.

Usai meninjau aspek keamanan, rombongan langsung bergerak menuju RSUD Bayung Lencir untuk memastikan standar pelayanan kesehatan berjalan maksimal. Kehadiran Bupati disambut Direktur RSUD Bayung Lencir, dr. Novita Sari, MARS.

Bupati segera melakukan inspeksi mendalam, mulai dari mengecek kesiapan petugas di Unit Gawat Darurat (UGD) hingga meninjau ketersediaan obat dan menyapa langsung masyarakat yang sedang mengantri di loket farmasi dengan ramah.

Pada kesempatan itu Bupati juga memasuki ruang intermediate. Di sana, HM. Toha Tohet meluangkan waktu untuk berdialog langsung dengan para pasien yang sedang dalam masa pemulihan.

Sambil memberikan suntikan semangat dan doa bagi kesembuhan mereka, ia juga menanyakan kualitas pelayanan yang diterima selama dirawat. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa setiap warga Muba mendapatkan perlakuan medis yang layak, cepat, dan humanis tanpa diskriminasi.

Sebagai penutup kunjungannya di rumah sakit, Bupati memberikan teladan bagi masyarakat dengan melakukan pengecekan kesehatan pribadi. Di hadapan staf medis, ia melakukan pemeriksaan tensi dan kadar gula darah secara langsung.

Aksi ini dilakukan sebagai bentuk kampanye hidup sehat sekaligus pesan kepada masyarakat agar tidak



ragu memanfaatkan fasilitas kesehatan yang ada untuk deteksi dini penyakit. Bupati berharap, RSUD Bayung Lencir

terus berinovasi dalam memberikan pelayanan prima bagi seluruh lapisan masyarakat. ●



TIPS PUASA SEHAT DAN BUGAR SELAMA RAMADAN

Perubahan pola makan, tidur, dan aktivitas selama Ramadan merupakan hal yang wajar. Namun, rutinitas kerja dan belajar tetap menuntut stamina yang prima.

dr Carla Pramudita Susanto mengungkapkan agar puasa tetap berjalan optimal baik dari sisi ibadah maupun kesehatan masyarakat perlu menerapkan strategi sederhana yang konsisten dan berbasis kebutuhan tubuh.

Berikut rangkuman tips puasa sehat yang disusun lebih ringkas, terstruktur, dan relevan untuk pola hidup masyarakat saat ini.

1. Jaga hidrasi dengan pola minum terencana

Risiko dehidrasi meningkat saat waktu asupan cairan terbatas. Kebutuhan cairan

harian orang dewasa tetap disarankan setara hari biasa, yakni sekitar delapan gelas per hari.

Pola yang mudah diterapkan selama Ramadan adalah 2-4-2 yakni 2 gelas saat berbuka, 4 gelas di antara waktu berbuka hingga sebelum tidur dan 2 gelas saat sahur.



"Air putih tetap menjadi pilihan utama. Air kelapa dapat dikonsumsi sesekali saat berbuka karena mengandung elektrolit alami yang membantu pemulihan cairan tubuh," katanya.

2. Sahur tidak boleh dilewatkan

Sahur berfungsi sebagai sumber energi utama untuk menopang aktivitas hingga waktu berbuka. Menu sahur sebaiknya mengandung karbohidrat kompleks (beras merah, gandum utuh, oat), protein (telur, ikan, ayam, tahu, tempe), serta serat dari sayur dan buah.

gukus, menumis ringan, atau memanggang.

"Jika harus menggoreng, gunakan minyak nabati yang lebih stabil seperti minyak kanola atau minyak zaitun, dan perhatikan jumlahnya," tambahnya.

5. Kendalikan asupan gula harian

Minuman dan makanan manis memang sering menjadi menu favorit saat berbuka. Namun, jumlah gula tetap perlu dibatasi.

Rekomendasi konsumsi gula harian masyarakat Indonesia mengacu pada anjuran dari Kementerian Kese-

Upayakan tidur lebih awal pada malam hari, khususnya jika harus bangun dini untuk sahur. Tidur yang cukup berperan penting dalam menjaga konsentrasi, daya tahan tubuh, dan kestabilan emosi selama berpuasa.

8. Perbanyak konsumsi buah tinggi kandungan air

Buah membantu menjaga hidrasi sekaligus memenuhi kebutuhan vitamin dan mineral. Beberapa pilihan buah dengan kandungan air tinggi antara lain semangka, jeruk, pepaya, dan pir.



Kombinasi tersebut membantu menjaga rasa kenyang lebih lama dan menstabilkan energi sepanjang hari.

3. Atur porsi, hindari makan berlebihan

Makan berlebihan, baik saat sahur maupun berbuka, justru meningkatkan risiko perut begah, refluks asam, dan gangguan pencernaan.

"Saat berbuka, awali dengan air putih dan buah atau kurma. Makan utama dilakukan secara bertahap setelah salat Magrib atau Tarawih dengan porsi seimbang," jelasnya.

4. Batasi makanan tinggi lemak dan gorengan

Makanan yang digoreng dengan minyak berlebih cenderung meningkatkan asupan lemak jenuh dan kalori. Konsumsi rutin dapat berkontribusi pada kenaikan berat badan serta peningkatan kadar kolesterol.

Metode memasak yang lebih dianjurkan antara lain merebus, men-

hatan Republik Indonesia, yaitu maksimal sekitar 50 gram per hari.

Sebagai alternatif yang lebih sehat, pilih buah segar utuh atau jus buah tanpa tambahan gula agar tetap memperoleh serat.

6. Tetap aktif dengan olahraga ringan-sedang

Aktivitas fisik tetap dianjurkan selama Ramadan karena bermanfaat menjaga kebugaran, suasana hati, serta kualitas tidur.

Waktu yang relatif aman adalah setelah berbuka atau menjelang berbuka dengan intensitas ringan. Pilihan aktivitas meliputi jalan kaki, bersepeda santai, peregangan, atau jogging ringan selama 20-30 menit.

"Hindari olahraga berat di bawah terik matahari atau saat perut benar-benar kosong," sambungnya.

7. Perbaiki pola tidur

Rasa lelah saat puasa lebih sering disebabkan oleh kurang tidur, bukan semata karena tidak makan dan minum.

Buah juga menjadi alternatif camilan sehat dibandingkan makanan tinggi gula dan lemak.

9. Biasakan berbuka dengan kurma

Kurma mengandung gula alami seperti glukosa dan fruktosa yang berfungsi sebagai sumber energi cepat. Selain itu, kurma juga menyediakan serat serta mineral, terutama kalium dan magnesium.

Kandungan seratnya membantu mengontrol nafsu makan sehingga mencegah makan berlebihan saat berbuka.

Puasa Ramadan dapat menjadi momentum untuk membangun kebiasaan hidup yang lebih sehat. Kunci utamanya terletak pada keseimbangan antara hidrasi, pola makan bergizi, aktivitas fisik teratur, serta tidur yang cukup.

Bagi masyarakat dengan kondisi medis tertentu seperti diabetes, hipertensi, atau gangguan lambung disarankan menyesuaikan pola puasa dengan anjuran tenaga kesehatan. ●

PANDUAN NUTRISI SEHAT SAAT SAHUR DAN BERBUKA PUASA

Menjalani ibadah puasa tidak hanya menuntut kesiapan spiritual, tetapi juga kesiapan fisik. Pola makan yang tepat saat sahur dan berbuka berperan besar dalam menjaga stamina, fokus, serta daya tahan tubuh sepanjang hari.

Prinsip utama yang dianjurkan hingga saat ini tetap mengacu pada pola gizi seimbang sebagaimana direkomendasikan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

dr. Margaretha Dianasanti, Sp. GK, Spesialis Gizi Klinik Primaya Hospital Pasar Kemis menyebutkan nutrisi saat sahur dan berbuka sangat penting, selama Ramadan tubuh hanya memperoleh asupan energi dan zat gizi dari dua waktu makan utama, yaitu sahur dan berbuka.

"Pada fase ini, tubuh membutuhkan strategi makan yang lebih terencana agar kebutuhan gizi harian tetap terpenuhi," katanya.

Pemenuhan nutrisi yang tepat berperan dalam menjaga kecukupan cairan tubuh dan mencegah dehidrasi, mempertahankan kestabilan kadar gula darah, menjaga konsentrasi dan daya ingat, mempertahankan massa

otot, serta mempercepat pemulihan energi setelah berpuasa.

"Gizi seimbang sendiri mencakup pemenuhan zat gizi makro (karbohidrat, protein, lemak, dan air) serta zat gizi mikro (vitamin dan mineral) dari ragam bahan pangan," ungkapnya.

Tidak ada satu jenis makanan yang mampu memenuhi seluruh kebutuhan gizi, sehingga variasi menu menjadi kunci utama.

Panduan Nutrisi Sehat Saat Sahur

Sahur berfungsi sebagai sumber energi utama untuk menopang aktivitas selama berpuasa. Pemilihan menu sebaiknya berfokus pada makanan yang mengenyangkan lebih lama, menjaga kestabilan gula darah, serta membantu menjaga hidrasi.

Prinsip utama menu sahur:

1. Karbohidrat kompleks tinggi serat

Pilih sumber karbohidrat dengan



indeks glikemik lebih rendah agar energi dilepaskan secara bertahap, seperti nasi merah, roti gandum utuh, oatmeal, kentang, atau ubi jalar.

2. Protein dalam jumlah cukup

Protein membantu memperpanjang rasa kenyang dan menjaga massa otot. Sumber yang dianjurkan antara lain telur, ikan, ayam, tahu, tempe, serta kacang-kacangan.

3. Lemak sehat

Lemak tidak jenuh membantu mencukupi energi dan penyerapan vitamin larut lemak. Contohnya alpukat, kacang-kacangan, biji-bijian, dan minyak zaitun.

4. Serat dari sayur dan buah

Serat membantu memperlambat proses pencernaan, menjaga kadar gula darah, serta mendukung kesehatan saluran cerna.

5. Cairan yang cukup

Minum air putih 2-3 gelas saat sahur membantu menjaga keseimbangan cairan tubuh sepanjang hari.

Panduan Nutrisi Sehat Saat Berbuka

Berbuka berfungsi memulihkan energi, cairan, dan kadar gula darah setelah berpuasa seharian.

“Cara berbuka yang tepat membantu mencegah rasa lemas, kembung, dan gangguan pencernaan,” jelasnya.

Prinsip berbuka yang dianjurkan:

1. Awali dengan cairan

Minum segelas air putih terlebih dahulu untuk menggantikan cairan yang hilang.

2. Konsumsi kurma dalam jumlah wajar

Kurma mengandung gula alami, serat, serta mineral seperti kalium dan magnesium yang membantu pemulihan energi.

3. Pilih makanan ringan dan mudah dicerna di awal

Sup hangat dengan sayuran dapat menjadi pilihan yang aman untuk

lambung.

4. Karbohidrat sederhana secukupnya

Buah segar, jus buah tanpa gula tambahan, atau madu membantu menaikkan kadar gula darah secara bertahap.

5. Lanjutkan dengan menu utama seimbang

Pastikan terdapat kombinasi kar-

Melakukan aktivitas fisik ringan hingga sedang secara rutin, mengelola stres melalui kegiatan yang menyenangkan, serta menjaga pola makan tetap teratur dan tidak berlebihan.

Apabila memiliki kondisi kesehatan tertentu atau kebutuhan gizi khusus, disarankan untuk berkonsultasi dengan dokter atau ahli gizi agar perencanaan menu selama Ramadan dapat disesuaikan secara



bohidrat kompleks, protein, dan lemak sehat.

Selain pengaturan menu sahur dan berbuka, beberapa kebiasaan membantu menjaga kebugaran selama Ramadan, tidur cukup sekitar 7-8 jam per hari.

personal.

Dengan menerapkan pola makan gizi seimbang, sahur dan berbuka tidak hanya menjadi rutinitas, tetapi juga sarana menjaga kesehatan agar ibadah puasa berlangsung lebih nyaman, produktif, dan berkelanjutan. •



DISKON TIKET LEBARAN 2026, WISATA DOMESTIK MELESAT

Pemerintah menyiapkan paket stimulus transportasi nasional menjelang Hari Raya Idul Fitri 2026 untuk menjaga kelancaran mobilitas masyarakat sekaligus memperkuat pergerakan ekonomi domestik.

Salah satu kebijakan utama adalah pemberian potongan harga tiket pesawat, kereta api, dan angkutan laut, yang dikombinasikan dengan penerapan kebijakan kerja fleksibel bagi aparatur negara.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa pemerintah akan memberikan diskon tarif pesawat sekitar 17-18 persen selama periode libur Lebaran 2026.

Selain itu, diskon tarif sebesar 30 persen juga disiapkan untuk layanan kereta api dan angkutan laut.

"Kita kasih diskon 30 persen untuk kereta api, kemudian kapal juga 30 persen, dan pesawat sekitar 17 atau 18 persen," kata Airlangga dalam keterangannya di Jakarta.

Untuk mendukung kebijakan tersebut, pemerintah menetapkan pola work from anywhere (WFA) pada 16-17 serta 25-27 Maret 2026. Skema ini dirancang untuk mengisi hari kerja yang berdek-

tan dengan cuti bersama Lebaran agar pergerakan masyarakat lebih merata.

Menurut Airlangga, pengaturan waktu kerja fleksibel memungkinkan masyarakat merencanakan perjalanan lebih awal, sehingga tekanan pada puncak arus mudik dan balik dapat ditekan.

Pemerintah menilai pendekatan ini penting mengingat karakteristik Indonesia, di mana peningkatan mobilitas pada masa liburan berbanding lurus dengan kenaikan belanja masyarakat.

"Indonesia memang salah satu anomali. Saat liburan, mobilitas tinggi. Pada saat mobilitas tinggi, belanja juga tinggi dan ekonominya bergerak," ujarnya.

la menambahkan, periode libur panjang umumnya diikuti oleh penguatan sejumlah indikator, seperti indeks keyakinan konsumen, penjualan produk elektronik, serta tingkat hunian hotel di berbagai daerah tujuan.

Sementara itu, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menegaskan bahwa kebijakan diskon tiket pesawat tidak

akan mengganggu keberlanjutan bisnis maskapai nasional.

Potongan harga sepenuhnya ditopang oleh stimulus pemerintah melalui skema Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP).

“Yang pasti bahwa kebijakan itu adalah kebijakan pemerintah. Kita tidak mengganggu maskapai,” ujar Dudy.

Selain insentif pajak, pemerintah juga memberikan potongan hingga 50 persen untuk tarif jasa kebandarudaraan guna menekan biaya operasional maskapai selama periode puncak mudik.

Total anggaran yang disiapkan pemerintah untuk mendukung program stimulus lintas moda transportasi mencapai Rp911,16 miliar. Untuk sektor penerbangan, diskon tiket rute domestik

kelas ekonomi sebesar 17–18 persen akan berlaku pada periode penerbangan 14–29 Maret 2026.

Program tersebut ditargetkan menjangkau sekitar 3,3 juta penumpang yang melakukan perjalanan mudik ke berbagai wilayah di Indonesia.

Kebijakan potongan harga tiket pesawat hanya berlaku selama 15 hari pada Maret 2026 dan secara khusus menyasar penumpang kelas ekonomi. Penumpang kelas bisnis tidak termasuk dalam skema insentif sehingga tetap dikenakan tarif normal.

Di sisi lain, pembiayaan selisih harga melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berpotensi meningkatkan beban fiskal apabila realisasi jumlah penumpang melampaui proyeksi 3,3 juta orang.

“Meski demikian, pemerintah menilai skema subsidi lebih aman bagi stabilitas industri penerbangan dibandingkan mendorong maskapai menurunkan harga secara mandiri,” kata Dudy.

Kebijakan ini mendapat dukungan dari kalangan parlemen. Anggota Komisi VII DPR RI dari Partai Keadilan Sejahtera, Hendry Munief menilai diskon tiket pesawat menjadi angin segar bagi masyarakat yang ingin mudik maupun berlibur pada masa Lebaran.

“Kebijakan ini jadi angin segar bagi masyarakat. Di mana, saat ekonomi saat ini masih berat, diringkankan oleh kebijakan ini. Tentu masyarakat akan merencanakan perjalanan negerinya, baik itu pulang kampung atau sekadar libur Lebaran. Semua pihak menikmatinya,” ujar Hendry.

Ia menekankan bahwa manfaat kebijakan tidak hanya dirasakan oleh penumpang, tetapi juga berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah tujuan perjalanan.

Hendry juga mendorong kementerian dan lembaga mitra kerja Komisi VII DPR RI, termasuk Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta Kementerian Koperasi dan UKM, untuk menyiapkan kebijakan lanjutan.

Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat promosi destinasi, mendorong program insentif bagi pelaku usaha pariwisata, serta memacu UMKM seperti sentra oleh-oleh dan produk ekonomi kreatif agar memanfaatkan lonjakan arus wisatawan selama periode Lebaran.

Pemerintah telah menetapkan bahwa potongan harga tiket pesawat domestik kelas ekonomi sebesar 17–18 persen berlaku untuk periode penerbangan 14–29 Maret 2026. Adapun pembelian tiket dengan tarif khusus dapat dilakukan mulai 10 Februari hingga 29 Maret 2026.

Melalui sinergi lintas kementerian, lembaga, dan pelaku industri penerbangan nasional, program ini ditargetkan menjangkau sekitar 3,32 juta penumpang.

Pemerintah berharap kebijakan ini mampu menjaga kelancaran mobilitas masyarakat pada musim mudik sekaligus memperkuat pemulihan ekonomi nasional melalui peningkatan aktivitas perjalanan, konsumsi, dan pariwisata di berbagai daerah. ●





ANTARA KEBUTUHAN MOBILITAS DAN HARGA YANG BELUM MERATA

Transportasi udara tetap menjadi urat nadi konektivitas di Indonesia, sebuah fakta yang tak terbantahkan mengingat karakteristik geografis negara kepulauan ini.

Namun pada 2026, isu tingginya harga tiket pesawat domestik kembali mencuat ke permukaan, memunculkan kritik dari masyarakat, pelaku industri, hingga pembuat kebijakan.

Sejumlah rute domestik, terutama yang memiliki durasi antara 1,5–3 jam, masih dibanderol di angka yang dinilai tidak proporsional oleh banyak pihak.

Sebagai contoh penerbangan antarkota besar seperti Jakarta–Surabaya atau Jakarta–Denpasar umumnya dipatok di atas Rp1,2 juta–Rp1,8 juta per segmen pada periode normal, angka yang sering kali lebih tinggi daripada tarif maskapai rute internasional dengan waktu tempuh lebih panjang.

Fenomena ini bukan hal baru. Kritik terhadap ketidakseimbangan harga domestik dan internasional sudah muncul selama beberapa tahun terakhir, dengan sejumlah maskapai luar negeri menawarkan harga kompetitif ke Singapura atau Kuala Lumpur yang dalam beberapa kasus lebih murah dibanding penerbangan dalam negeri.

Subsidi Pemerintah: Meringankan, Tapi Tidak Menyelesaikan Akar Masalah

Menyikapi keluhan publik, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perhubungan, serta Kementerian Keuangan telah meluncurkan kebijakan stimulus tarif untuk periode tertentu.

Pada periode 14–29 Maret 2026, pemerintah memberikan diskon tiket pesawat domestik kelas ekonomi sebesar 17–18 persen dengan skema Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ditanggung pemerintah 100 persen, potongan biaya bahan bakar, dan pengurangan biaya layanan bandara. Kebijakan ini menargetkan sekitar 3,3 juta penumpang domestik.

Menurut Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda, kebijakan ini merupakan bagian dari upaya meredam beban masyarakat saat mudik Lebaran, namun masih perlu evaluasi lanjutan agar potongan tarif dapat lebih maksimal.

“Tapi ini perlu adanya evaluasi lanjutan sehingga potongan tarif dapat maksimal,” katanya.

Meski demikian, data pantauan harga platform penjualan tiket menunjukkan bahwa setelah diskon masih ada beberapa rute yang bertahan di kisaran Rp1,4 juta–Rp1,9 juta saat periode mudik, jauh di atas ekspektasi tarif ideal pada kisaran Rp600 ribu–Rp1,2 juta untuk durasi yang setara.

Penyebab di Balik Harga yang Tetap Tinggi

Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi buka-bukaan soal harga tiket pesawat ke luar negeri (internasional) yang lebih murah dibandingkan rute domestik. Dudy bicara dalam konteks harga tiket penerbangan ke Singapura.

Dudy mengungkapkan, harga tiket

atau bahkan menghapus PPN perlu perhitungan mendalam lantaran PPN terhadap tiket domestik berkontribusi cukup signifikan terhadap penerimaan negara.

“Jadi, saya juga harus mempertimbangkan kondisi keuangan dari negara, apakah memungkinkan kita membebaskan PPN atau menolak PPN, karena undang-undangnya mengatakan harus ada PPN. Jadi, kalau itu (PPN) bisa dikurangi atau dibebaskan, harapannya bahwa pasar domestik kita bisa hidup,” katanya.

Selain PPN, adanya perbedaan harga avtur di Singapura dan Indonesia. Harga avtur di Singapura lebih murah dibandingkan di Indonesia.

“Kemudian seperti Singapura-Jakarta. Ada isitilahnya di penerbangan itu double uplift ya, mereka isi bensinnya tidak di Indonesia, isi bensinnya di Singapura.



pesawat rute domestik dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), sementara rute internasional tidak dikenakan PPN.

“Harga tiket pesawat kenapa ke luar lebih murah, salah satunya adalah karena tidak adanya PPN,” kata Dudy dalam konferensi pers di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Dudy mengatakan, saat ini pihaknya tengah membahas dengan Kementerian Keuangan untuk mencari jalan tengah terkait PPN agar penerbangan domestik lebih hidup.

Meski begitu, ia menjelaskan bahwa proses untuk dapat mengurangi PPN

Jadi, harga avturnya, harga di sana. Itu praktik yang biasanya terjadi,” katanya.

Alasan lain adalah, jumlah pesawat komersial di Indonesia belum kembali sepenuhnya ke level pra-pandemi, menetapkan tekanan pada suplai seat dan menahan harga tetap tinggi.

Harga tiket yang tinggi membebani mobilitas masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Bagi banyak wilayah luar Jawa termasuk wilayah timur Indonesia pesawat bukan sekadar alat transportasi pilihan, melainkan kebutuhan dasar untuk akses pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

Keluhan masyarakat dari provinsi sep-

erti Gorontalo atau Papua kerap menyuarakan bahwa tingginya tiket pesawat menghambat pertumbuhan regional yang lebih merata.

Perbandingan Tarif dan Harapan Publik

Pengamatan pelaku industri menilai tarif ideal untuk beberapa segmen domestik seharusnya berada di kisaran berikut (estimasi dari berbagai analisis pasar):

- * Rute 1,5–2 jam: Rp600 ribu–Rp700 ribu
- * Rute menengah 2,5–3 jam: Rp1 juta–Rp1,2 juta
- * Rute jarak jauh 5–6 jam: sekitar Rp2 juta

Tarif ideal tersebut dianggap lebih seimbang dengan biaya operasional sekaligus lebih terjangkau bagi masyarakat luas.

Harga tiket pesawat domestik 2026



mencerminkan tantangan kompleks antara kebutuhan mobilitas nasional dan dinamika biaya operasional industri penerbangan.

Diskon sementara membantu meringankan beban, namun solusi jangka panjang diperlukan mencakup reformasi pajak, efisiensi biaya bahan bakar, serta peningkatan suplai kursi melalui perluasan armada.

Tanpa langkah struktural seperti itu, hambatan biaya penerbangan berpotensi terus membatasi mobilitas dan pertumbuhan ekonomi masyarakat Indonesia secara menyeluruh. ●



**LAUTAN MANUSIA ANTAR ALEX NOERDIN
KE PERISTIRAHATAN TERAKHIR**

LANGIT PALEMBANG SEAKAN IKUT BERDUKA

Rabu siang itu, Palembang seperti kehilangan denyutnya. Langit menggantung kelabu, angin berembus pelan seakan turut menahan tangis. Provinsi yang pernah ia pimpin selama dua periode itu menjadi saksi perpisahan terakhir dengan putra terbaiknya, Alex Noerdin.

Mantan Gubernur Sumatera Selatan periode 2008–2018 itu dimakamkan di TPU Kebun Bunga, Sukarami, Rabu (26/2/2026). Namun sebelum tanah menyambut jasadnya, ribuan manusia telah lebih dulu menumpahkan doa dan air mata di Masjid Agung Palembang. Masjid kebanggaan wong kito itu sesak oleh lautan pelayat. Setiap sudut dipenuhi wajah-wajah sendu. Tangis tertahan, doa lirih, dan bisik-bisik kenangan menyatu dalam satu gelombang duka yang tak terbendung.

Jarum jam menunjuk pukul 11.25

doa dan air mata, perjalanan panjang seorang tokoh ditutup dengan khidmat.

Istri tercinta, Eliza Alex, berdiri tegar dalam balutan duka. Bersama Doddy Alex, Lury Alex, dan keluarga besar, mereka tak kuasa menyembunyikan kesedihan. Air mata jatuh tanpa suara, membasahi doa-doa yang melangit, berharap sampai lebih cepat ke hadirat Sang Khalik.

Deretan tokoh penting hadir memberi penghormatan terakhir. Sekretaris Daerah Sumsel Edward Candra, mantan Gubernur Syahril Oesman, Wali Kota Palembang Ratu Dewa, Bupati Banyuasin Askolani,

mata menjadi saksi cinta dan penghormatan.

Dalam suasana yang sarat duka, Doddy menyampaikan pesan yang menggugurkan hati. Dengan suara nyaris patah, ia memohon maaf atas segala khilaf sang ayah selama berinteraksi dengan masyarakat.

“Jika sekiranya ada dari bapak atau ibu yang selama dalam pergaulan beliau merasa terganjal dan tersangkut, saya sebagai putra sulung beliau siap menerima dan dapat menghubungi kami,” ujarnya lirih.

Ia juga menyampaikan terima kasih



WIB saat iring-iringan jenazah tiba di pemakaman keluarga. Suasana hening mendadak berubah menjadi isak pilu ketika anak sulungnya, Doddy Reza Alex, berdiri untuk mengumandangkan azan bagi sang ayah. Suaranya bergetar, pecah di antara kalimat-kalimat suci yang meluncur berat dari dadanya. Azan itu bukan sekadar panggilan salat, melainkan seruan perpisahan terakhir—sebuah salam cinta dari seorang anak kepada ayah yang kini berpulang.

Di pusara, suasana semakin mengharu biru. Tanah seakan berat menerima jasad seorang pemimpin yang pernah menggenggam kemudi pembangunan Sumatera Selatan. Di sanalah, di antara

Bupati Ogan Ilir Panca Wijaya Akbar, Bupati Empat Lawang Jonck Muhammad, Ketua DPRD Sumsel Andie Dinaldie, hingga mantan Ketua DPRD Sumsel Anita Noeringhati, berdiri dalam barisan yang sama: barisan kehilangan. Kehadiran mereka menjadi penegas bahwa jejak pengabdian Alex Noerdin tak pernah pudar oleh waktu.

Warga dari berbagai penjuru Sumatera Selatan memadati area TPU Kebun Bunga. Mereka datang bukan sekadar menyaksikan, melainkan memastikan bahwa langkah terakhir sang pemimpin diantar dengan doa terbaik. TPU Kebun Bunga hari itu berubah menjadi samudra manusia—di mana setiap tetes air

atas simpati dan doa masyarakat Sumsel yang mengalir deras sejak kabar duka itu tersebar. Menurutnya, cinta masyarakat adalah warisan terbesar yang tak akan mampu terbalas hingga akhir zaman.

Doddy mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama membacakan surat Yasin di rumah, musala, dan masjid masing-masing.

“Saya harap untuk pembacaan surat Yasin bagi almarhum, orang tua kita, tokoh Sumsel yang paling dicintai masyarakatnya. Semoga dalam perjalanan terakhirnya menuju Sang Khalik pencipta, kita doakan husnul khotimah,” tuturnya, menahan tangis. ●

ALEX NOERDIN ANGKAT CITRA INDONESIA DI MATA DUNIA

Nama Alex Noerdin tetap harum sepanjang masa bagi masyarakat Provinsi Sumatera Selatan dan Indonesia. Berbagai terobosan yang dilakukannya membuat Sumsel dan Indonesia dikenal luas di mata dunia. Bahkan hingga kini namanya selalu dikenang sebagai salah satu putra terbaik bangsa yang dimiliki Sumatera Selatan.

Sosok Alex Noerdin merupakan salah satu tokoh politik dari seorang birokrat yang pernah memimpin Sumatera Selatan selama dua periode, yakni 2008–2013 dan 2013–2018.

Kiprahnya dalam pemerintahan daerah menjadikannya figur yang cukup berpengaruh dalam dinamika pembangunan dan politik di provinsi tersebut.

Alex Noerdin lahir pada 9 September 1950 di Gunung Meraksa, Pendopo, Empat Lawang. Ia merupakan anak ketiga dari tujuh bersaudara pasangan Haji Muhammad Noerdin Pandji dan Haji Siti Fatimah.

Dalam bidang pendidikan, ia menempuh studi sarjana di Universitas Trisakti

dan lulus pada 1980. Setahun kemudian, ia melanjutkan pendidikan di Universitas Atma Jaya Jakarta.

Selain itu, ia juga mengikuti berbagai pelatihan internasional, antara lain di United Nations Centre for Regional Development (UNCRD) Nagoya, Institute

for Housing Studies Rotterdam, serta program urbanisasi di Universitas Harvard.

Pengalaman tersebut turut memengaruhi pendekatan pembangunan yang diusungnya saat memimpin daerah. Karier Politik Alex Noerdin Karier politik Alex



Noerdin dimulai dari tingkat kabupaten. Ia menjabat sebagai Bupati Musi Banyuasin (Muba) selama dua periode, yakni 2001–2006 dan 2007–2012.

Di masa inilah kepiawaian terlihat, Kabupaten Muba yang sempat tertinggal dari daerah lain di Sumatera Selatan menjadi daerah maju dan terdepan. Bahkan Kabupaten Muba menjadi salah satunya daerah yang menjadi tuan Pekan Olahraga Nasional XI bersama Kota Palembang.

Berbagai pembangunan infrastruktur terus dibangun, penataan daerah terlihat tertata rapi dan teratur. Bahkan menjadikan Kabupaten Muba menjadi salah satu daerah di Indonesia yang paling banyak dibicarakan.

Di sisi lain, masyarakat Muba juga merasakan langsung manfaat program Berobat dan Sekolah Gratis hingga mencapai sarjana.

Di tengah masa jabatan keduanya, ia mengundurkan diri pada 14 Juni 2008 untuk maju dalam Pemilihan Gubernur Sumatera Selatan.

Ia terpilih sebagai Gubernur Sumatera Selatan periode 2008–2013. Pada Pilgub 2013, ia kembali maju dan memenangkan kontestasi untuk periode kedua hingga 2018. Selama satu dekade kepemimpinannya, Sumsel mengalami percepatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan citra daerah di tingkat nasional.

Sejumlah proyek strategis dan agenda berskala nasional terlaksana pada masa pemerintahannya, memperkuat posisi Sumsel sebagai salah satu provinsi yang berkembang pesat di kawasan Sumatera.

Proyek tersebut seperti pembangunan kawasan kompleks olahraga Jakabaring Sport City (JSC) dan berhasil mendapatkan proyek pembangunan Light Rail Transit (LRT). Sea Games 2011 Hasilnya, event olahraga berskala internasional digelar di ibu kota Sumatera Selatan.

Seperti SEA Games 2011, Asian University Games (AUG) 2012, Islamic

Solidarity Games (ISG) 2013 dan Asian Games 2018 berhasil digelar sehingga mata dunia tertuju ke Palembang.

Atas pengabdianya, Alex Noerdin menerima sejumlah tanda kehormatan dari pemerintah pusat maupun lembaga lainnya. Di antaranya Bintang Mahaputera Utama yang dianugerahkan pada 11 Agustus 2014, serta Satyalan-

la kemudian divonis 12 tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palembang. Pada 2025, ia kembali didakwa dalam perkara revitalisasi Pasar Cinde.

Terlepas dari dinamika hukum yang pernah menjeratnya, Alex Noerdin tetap tercatat sebagai salah satu figur penting dalam sejarah politik Sumatera Selatan.



cana Pembangunan dan Satyalancana Wira Karya.

Ia juga aktif dalam berbagai organisasi politik dan kemasyarakatan, termasuk Partai Golkar. Dalam perjalanan karirnya, Alex Noerdin juga menghadapi persoalan hukum. Pada 2021, ia ditetapkan sebagai tersangka dalam dua perkara korupsi, yakni kasus pembelian gas bumi oleh Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PDPDE) Sumatera Selatan serta kasus hibah pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang.

Sebagai bukti cinta pada sosok Alex Noerdin, puluhan ribu masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin dan Sumsel lainnya sempat meminta kepada Presiden Prabowo Subianto agar Bapak Pembangunan Sumsel itu mendapat grasi dan amnesti.

Kini salah satu tokoh yang paling banyak dikagumi masyarakat Sumsel itu wafat pada usia 75 tahun. Sumsel berduka, dan ribuan masyarakat ikut mengantar-kannya ke pemakaman. Selamat Jalan Pak Alex Noerdin! •



MEMBACA PETA JALAN KETAHANAN PANGAN

Swasembada pangan saja belum cukup. Urusan penyimpanan cadangan (stok) pangan dan distribusi yang efisien menjadi konsekuensinya. Itu sebab peta jalan ketahanan pangan menjadi penting.

Awal 2026, ketahanan pangan nasional, memasuki babak baru swasembada pangan. Penanda pentingnya adalah kehadiran Presiden Prabowo Subianto di kawasan persawahan desa Kertamukti, Cilebar, Karawang, Jawa Barat. "Terima kasih atas kehormatan yang diberikan kepada saya. , saya diundang panen raya dan pengumuman resmi bahwa Indonesia berhasil kembali menjadi bangsa yang swasembada pangan," kata Presiden Prabowo saat Panen Raya dan Pengumuman Swasembada Pangan di Kabupaten Karawang, Rabu, 7 Januari 2026.

Presiden Prabowo menyaksikan panen di Desa Kertamukti, Kecamatan Cilebar, Kabupaten Karawang, yang merupakan bagian dari sentra produksi nasional. Panen dilakukan menggunakan teknologi combine harvester yang memungkinkan proses panen dilakukan lebih cepat, me-

nekan kehilangan hasil, serta mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja manual.

Selain itu, teknologi yang telah disebarluaskan dan diadopsi oleh petani juga terlihat dari varietas unggul padi Inpari 32. Benih padi yang dikembangkan Kementerian Pertanian ini memiliki potensi hasil 8,42 ton per hektare, sebuah teknologi pengungkit produksi padi nasional. Presiden Prabowo mendorong agar ke depan varietas unggul padi terus dikembangkan untuk menghasilkan produktivitas hingga 15 ton per hektare.

Tidak hanya panen, Presiden Prabowo juga menyaksikan demo alat dan mesin pertanian (alsintan), di antaranya drone, dan pompa air, serta hilirisasi pertanian. Berbagai teknologi tersebut merupakan faktor pendorong peningkatan produksi untuk swasembada pangan berkelanjutan.

"Saya melihat produk hilirisasi



pertanian luar biasa. Nanti dengan swasembada pangan di mana-mana, saya dijanjikan Pak Menteri Amran dan Wakil Menteri Pertanian didukung TNI/Polri, jagung pun dalam waktu dekat akan swasembada, pakab akan murah untuk seluruh peternak dan petani. Kita akan turunkan harga pakan. Sudah kita turunkan harga pupuk kalau bisa turunkan lagi harganya,” tegasnya.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengemukakan bahwa modernisasi pertanian menjadi kunci dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Penguatan mekanisasi, penyediaan sarana produksi, serta pendampingan petani terus dilakukan untuk meningkatkan produktivitas sekaligus kesejahteraan petani. “Kita harus mendorong pertanian kita berbasis inovasi dan teknologi. Dengan teknolog, produktivitas meningkat, indeks pertanaman naik, biaya produksi turun, dan kesejahteraan petani berdampak,” ucapnya.

Di pembukaan panen raya itu pula Presiden Prabowo menganugerahkan bintang jasa utama kepada Menteri Pertanian Amran Sulaiman. “Hari ini Andi Amran Sulaiman saya beri Bintang Jasa Utama. Dia bersama

kalian semua telah mengamankan masa depan bangsa Indonesia, saya percaya setelah ini kita tidak akan bisa diberhentikan,” kata Prabowo.

Selain bintang jasa utama Presiden pun memberikan Bintang Jasa Pratama kepada petani Heri Sunarto dari kelompok Tani Ngudi Luhur, Kab Sukoharjo, Jawa Tengah; Bintang Jasa Nararya kepada Penyuluh Pertanian Kabupaten OKU Timur, Sumatera Se-

latan, Bobby Irfan Effendi, dan Winarto dari Poktan Sri Sedhono Ngawi, Jawa Timur; juga Satyalancana Wira Karya untuk Bupati dan sejumlah perwira TNI maupun Polri serta tokoh petani dari Kelompok Tani yang dapat menjadi teladan.

Beriringan dengan itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan), Zulkifli Hasan (Zulhas) mengungkapkan musim panen pada



2026 berlangsung sejak Februari dan berlanjut hingga Maret-April. "Tahun ini lebih cepat lagi panen raya-nya. Kalau dulu (tahun 2025) Maret, ini Februari sudah panen raya. Februari, Maret, April terus panen raya," ujar Zulhas saat di kantor Kemenko Pangan, pertengahan Januari 2026.

Zulhas menjelaskan, sejalan dengan percepatan waktu panen, pemerintah juga memperkirakan produksi padi nasional akan mengalami peningkatan. Produksi beras diprediksi

penurunan. Dari sebelumnya hampir 1.900 unit gudang, kini hanya tersisa sekitar 1.500 unit akibat alih fungsi sekitar 400 gudang.

Sebagai solusi mengatasi keterbatasan tersebut, pemerintah telah menyelesaikan substansi Instruksi Presiden (Inpres) terkait pembangunan gudang baru. Bulog akan ditugaskan membangun sekitar 100 gudang tambahan untuk menampung hasil panen raya yang meningkat.

Selain itu, Koperasi Desa (Kopdes)

pusat ekonomi yang representatif, juga pergudangan modern dengan membangun infrastruktur pasca-panen untuk menjaga stabilitas harga pangan dan kelengkapan teknis dengan mengintegrasikan sistem pergudangan berstandar enjiner tinggi.

Inpres No 17 Tahun 2025 berfokus pada Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Peran PT Agrinas Pangan Nusantara dalam kebijakan tersebut



naik sekitar 5 hingga 10% dibandingkan periode sebelumnya. Menurut dia, kenaikan ini menjadi dasar pemerintah untuk memperkuat cadangan beras nasional.

Menko Pangan juga menegaskan bahwa target cadangan beras sebesar 4 juta ton akan dijaga secara konsisten setiap tahun hingga 2029. Kebijakan ini dinilai penting untuk menjaga stabilitas pangan nasional, hingga mengantisipasi fluktuasi produksi.

Konsekuensinya, Zulhas mengungkapkan perlunya kesiapan infrastruktur penyimpanan sementara jumlah gudang Bulog mengalami

juga akan dilibatkan sebagai alternatif tempat penyimpanan beras. Mengingat waktu panen yang semakin cepat, pembangunan gudang ditargetkan rampung pada Februari hingga Maret. Agar prosesnya berjalan cepat dan efisien, pemerintah akan bekerja sama dengan TNI dalam pembangunan infrastruktur tersebut.

Sebagai payung kebijakannya adalah Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 yang mengamanatkan PT Agrinas Pangan Nusantara mengembangkan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih. Tugas utamanya meliputi percepatan fisik gerai dengan memastikan setiap desa memiliki

antara lain bertugas sebagai pelaksana utama dalam membangun infrastruktur fisik (gerai dan gudang) serta menyediakan perlengkapan operasional untuk Koperasi Merah Putih di seluruh desa/kelurahan.

Selain itu, sebagai bagian dari pemenuhan kelengkapan koperasi, Agrinas melakukan pengadaan sekitar 105.000 unit kendaraan komersial (termasuk pickup Mahindra dan Tata) yang diimpor dari India. Tujuannya mempercepat distribusi dan ketersediaan pangan di tingkat desa melalui penguatan jaringan logistik koperasi guna mendukung ketahanan pangan nasional. Sedangkan skema pendanaannya adalah dana pinjaman dari Himpunan Bank Negara (Himbara) dengan jaminan yang salah satunya bersumber dari alokasi Dana Desa. ●

“Kita harus mendorong pertanian kita berbasis inovasi dan teknologi. Dengan teknolog, produktivitas meningkat, indeks pertanaman naik, biaya produksi turun, dan kesejahteraan petani berdampak”

MOBIL DARI INDIA MULAI DATANG

Berangsur-angsur kendaraan impor dari India pesanan PT Agrinas Pangan Nusantara sudah berlabuh di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. "Iya, sudah sampai 1.000 unit di Tanjung Priok," ungkap Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota kepada wartawan dikutip pada Selasa, 24 Februari 2026.

Toh Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota mengaku pasrah jika memang mobil yang sudah datang dilarang untuk dipakai sebagai mobil operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). "Tindak lanjut dari unit yang sudah sampai, tetap kami manut dan taat kepada pemerintah dan DPR di mana mereka mewakili rakyat. Jadi, kalau memang disuruh bahwa tidak boleh dipakai, kami tidak akan pakai," sambung Joao Angelo.

Joao pun memastikan siap bertanggung jawab terkait keputusan impor mobil dari India ini. Namun begitu, dirinya mengatakan hingga kini belum ada arahan langsung dari pemerintah terkait penundaan impor mobil pick up itu.

Terkait kemungkinan denda, Agrinas

siap mencari solusi jika impor dibatalkan. Menurut dia, hal ini bagian dari etika berbisnis untuk menekan kerugian yang ada. "Orang berbisnis ini kan mau mencari untung, bukan mencari masalah. Jadi kalau memang ada masalah, saya pasti akan duduk bersama-sama dengan pihak supplier untuk mencarikan solusinya," ungkapnya.

Belakangan beredar kabar Agrinas Pangan juga memesan kendaraan dari dalam negeri. Sebagaimana informasi yang dikemukakan mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan dan media JPNN, ternyata Agrinas tidak hanya memesan kendaraan dari India. "Yang 105.000 dari India, yang 45.000 dari dalam negeri (Toyota, Daihatsu, Suzuki, dan Mitsubishi)." ungkap Dahlan Iskan.

Sedangkan Joao Angelo mengemukakan, sejauh ini Agrinas Pangan Nusantara telah menyerap anggaran sekitar Rp 90 triliun dari total plafon pendanaan yang disediakan untuk pembangunan aset fisik Kopdes Merah Putih. Ia mengakui pendanaan tersebut bersumber dari kucuran kredit Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

"Kita mundur ke bulan Oktober (2025) di mana itu ada kesepakatan empat

Menteri menunjuk Agrinas sebagai pelaksana. Kemudian kami mendapatkan kucuran dana sebesar Rp 200 triliun dari bank Himbara untuk melakukan pengadaan tersebut. Kemudian sampai hari ini mungkin kami sudah menghabiskan sekitar Rp 90 triliun," ujarnya.

Alokasi Rp 90 triliun tersebut antara lain untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur dasar di tingkat desa. Dia memerinci bahwa anggaran itu terserap untuk pengadaan unit kendaraan operasional hingga pembangunan fisik gerai di lapangan. "Untuk pengadaan sarana prasarana termasuk mobil maupun pembangunan fisik gerai-gerai operasi tersebut," tandasnya.

Pada gilirannya, Agrinas Pangan Nusantara akan menjadi perintis pengelolaan Kopdes Merah Putih. Setidaknya peta jalan sudah terbentang. Tinggal pelaksanaan, dan perbaikan demi perbaikan untuk mewujudkan ketahanan pangan. Lebih dari itu, mengingat skala dan cakupannya yang luas, dan ketidakpastian ekonomi politik di tingkat global, banyak yang berharap berbagai tantangan dan hambatan dapat bertransformasi menuju Indonesia yang lebih baik lagi. ●





DARI BINTANG DUA KE KURSI UTAMA:

MENEPIS KERAGUAN DI BALIK SERAGAM MILITER DIRUT BARU BPJS KESEHATAN

Penunjukan Mayjen TNI (Purn) Dr. dr. Prihati Pujowaskito sebagai Direktur Utama BPJS Kesehatan periode 2026-2031 melalui Keputusan Presiden Nomor 17/P Tahun 2026 sempat memicu tanda tanya di sebagian kalangan masyarakat.



Publik bertanya-tanya, mengapa posisi strategis di sektor jaminan kesehatan publik justru diserahkan kepada sosok perwira tinggi militer? Kesannya, pemerintah seolah menempatkan sosok yang bukan ahli di bidangnya.

Namun, menilik lebih dalam rekam jejak Prihati, keraguan tersebut perlahan memudar. Kepemimpinan BPJS Kesehatan di era baru ini nyatanya berada di tangan seorang praktisi medis

Rekam Jejak Manajerial di Fasilitas Kesehatan Rujukan

Karier militer Prihati sangat difokuskan pada pengelolaan fasilitas kesehatan berskala besar. Beberapa posisi strategis yang pernah diemban antara lain:

Direktur Pengawasan Medik (Dirjangmed) RSPAD Gatot Soebroto (2021-2023): Memimpin tata kelola operasional di salah satu rumah sakit rujukan tertinggi di Indonesia. Pengalaman ini menjadi bekal krusial un-

intahan di Indonesia, mempercayakan posisi strategis sektor kesehatan kepada dokter militer bukanlah hal baru. Mengelola institusi raksasa seperti BPJS Kesehatan—yang melayani ratusan juta jiwa dengan kompleksitas birokrasi yang tinggi—membutuhkan lebih dari sekadar pemahaman medis.

Pemerintah mengandalkan kombinasi antara kedisiplinan, ketegasan, dan kepemimpinan khas militer, yang



berpengalaman yang kebetulan berseragam loreng.

Bukan Prajurit Tempur, Melainkan Pakar Medis

Prihati bukanlah tentara tempur konvensional. Lulusan Sepamilsuk ABRI III tahun 1990 ini adalah seorang dokter spesialis jantung (Sp.JP). Secara keilmuan klinis, beliau sangat memahami seluk-beluk dunia kedokteran, kebutuhan riil pasien di lapangan, serta standar pelayanan kesehatan yang ideal. Latar belakang ini memastikan bahwa kebijakan yang akan diambil nantinya tetap berakar pada prinsip keselamatan dan kesejahteraan pasien.

tuk memahami ekosistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari sisi penyedia layanan medis.

Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Pertahanan (2023-2025): Menunjukkan kapasitas kepemimpinan di ranah akademis dalam mencetak sumber daya manusia (SDM) kesehatan yang berkualitas dan siap pakai.

Sinergi Kedisiplinan Militer dan Birokrasi Kesehatan

Dalam konteks tata kelola pemer-

Kepemimpinan BPJS Kesehatan di era baru ini nyatanya berada di tangan seorang praktisi medis berpengalaman yang kebetulan berseragam loreng.

dipadukan dengan keahlian manajerial medis. Sinergi ini diharapkan mampu mengurai berbagai tantangan struktural, memperkuat tata kelola, dan memastikan keberlanjutan penyelenggaraan program JKN secara jangka panjang.

Kini, tongkat estafet dari Prof. dr. Ali Ghufuron Mukti telah resmi berpindah. Di bawah komando sang Jenderal Bintang Dua yang juga seorang dokter jantung, publik menanti detak pembaruan layanan kesehatan yang lebih sehat,

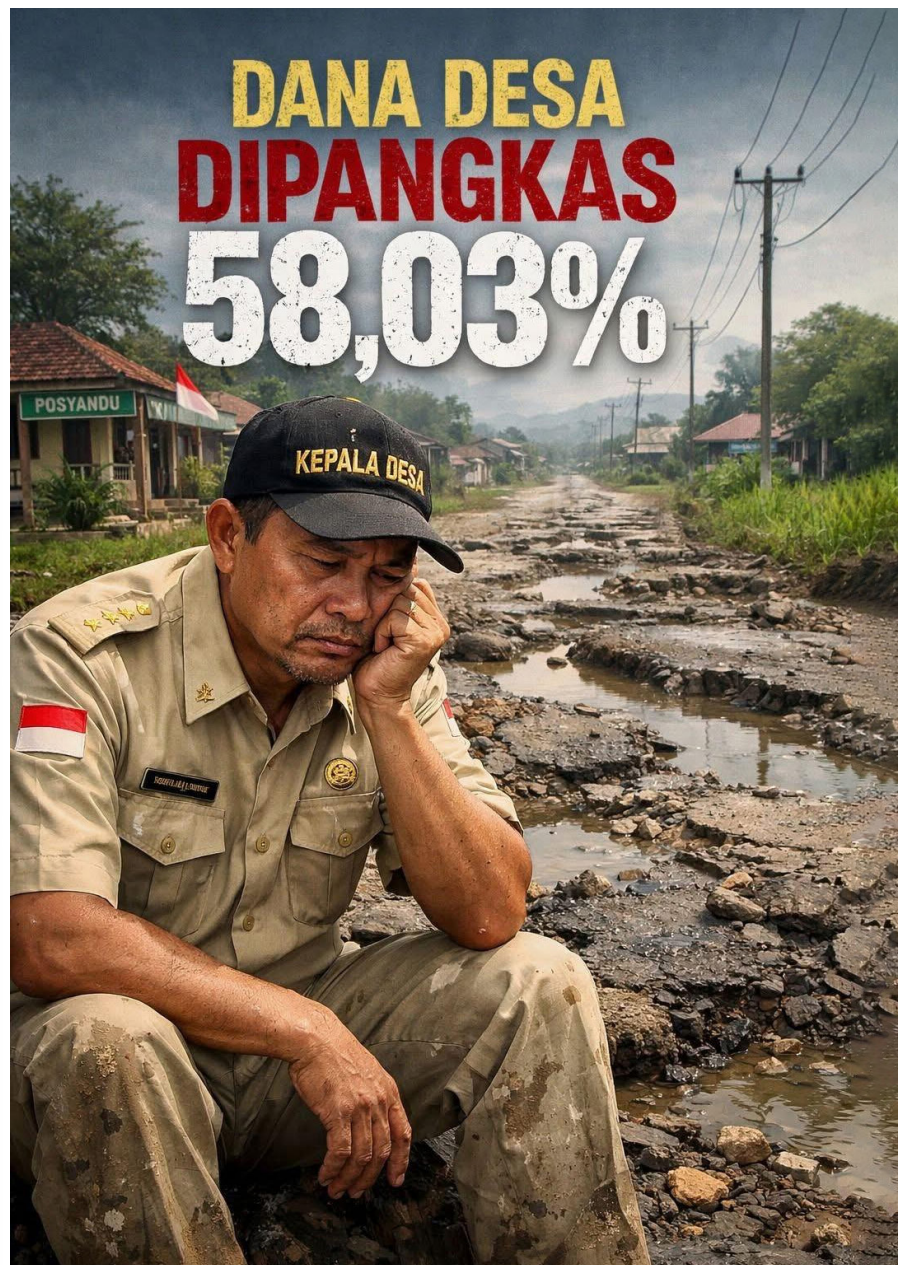
efisien, dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia. ●

SETELAH DITAKUT-TAKUTI KADES DITANGKAP, DANA DESA DIPANGKAS 58,03%

Kasih kepala desa. Suasannya tidak seperti dulu diguyur dana satu miliar lebih. Sekarang, hanya ratusan juta. Mereka dibuat seperti tak berdaya demi Koperas Merah Putih. Simak narasinya, seruput Koptagul nanti malam aja, wak!

Selama satu dekade penuh, ratusan triliun rupiah dana desa digelontorkan pemerintah ke pelosok negeri. Angkanya bukan recehan warung kopi. Tahun 2026 saja, pagu dana desa awalnya ditetapkan Rp60,57 triliun. Duit sebesar itu selama ini dipakai untuk jalan desa, irigasi, posyandu, jembatan kecil, sampai bantuan langsung ke warga miskin.

Tidak sempurna, iya. Ada masalah, jelas. Bahkan Presiden Prabowo Subianto di forum Indonesia Economic Outlook 2026 pada 13 Februari dengan nada serius mengakui, dalam 10 tahun pelaksanaan, banyak dana desa tidak sampai ke rakyat dan banyak kepala desa berhadapan dengan hu-



kum karena tidak bisa mempertanggungjawabkan penggunaannya.

Kalimat itu seperti genderang perang. Publik langsung disugui narasi besar. Banyak kades bermasalah. Banyak yang tersandung hukum. Banyak yang tak becus mengelola angga-

ran. Ketakutan mulai merambat pelan-pelan. Sebuah atmosfer bahwa desa adalah titik rawan kebocoran.

Lalu, setelah rasa waswas itu tertanam, muncullah langkah kebijakan yang tegas. Pemotongan dana desa 58,03 persen. Angkanya presisi, tidak

main-main. Dari total pagu Rp60,57 triliun, dipangkas Rp34,57 triliun. Artinya, dana yang tersisa untuk seluruh desa di Indonesia tinggal sekitar Rp26 triliun saja.

Ke mana Rp34,57 triliun itu dialihkan? Ke program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Sebuah program unggulan yang digadang-gadang akan membangun gerai koperasi desa, gudang cold storage, memperbaiki distribusi subsidi beras dan pupuk agar “langsung ke rakyat tanpa bocor”. Bahkan sejak Oktober 2025, aparat disebut ikut turun membantu percepatan pembangunan fasilitasnya.

Di atas kertas, ini terlihat sebagai langkah strategis. Kurangi potensi pe-

hingga pemberdayaan warga. Jalan berlubang tetap harus diperbaiki. Irigasi tetap harus dirawat. Posyandu tetap harus jalan.

Tanggal 16 Februari, ribuan kepala desa dari Apdesi, AKSI, dan Apkasi menggelar rapat darurat. Ada yang menyampaikan keluhan ke media, ada aksi kecil di Kediri memblokir lahan rencana gerai koperasi, warga Tempurejo pun menyuarakan protes. Mereka bukan menolak koperasi. Mereka mempertanyakan prioritas dan skema pemotongan yang drastis.

Namun pada 18 Februari, Mensesneg Prasetyo Hadi menyatakan, “Tidak ada yang menolak, di mana yang menolak?” Sementara Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyebut

Kalau sebelumnya desa punya fleksibilitas menentukan prioritas sesuai kebutuhan lokal, membangun jembatan kecil, memperbaiki drainase, membantu warga sakit, kini ruang itu mengecil. Prioritas diarahkan pada koperasi. Dana menyusut. Risiko tetap besar. Tuntutan pelayanan publik tidak berkurang.

Secara fiskal, ini tercatat sebagai realokasi dan efisiensi. Secara politik, ini dibingkai sebagai penertiban kebobrokan. Tapi secara sosiologis, ini adalah perubahan besar dalam relasi pusat dan desa. Ketika ancaman hukum diperlihatkan di depan, lalu anggaran dipangkas lebih dari separuh, kepala desa berada dalam posisi yang sangat defensif.

Apakah ada kades yang ber-



nyimpangan dengan mengurangi ruang fiskal desa. Lalu, pusatkan prioritas pada satu program besar yang dikontrol lebih ketat. Tapi di lapangan, efeknya terasa sangat konkret.

Contohnya di NTB. Seorang kepala desa di Lombok Barat mengaku sebelumnya menerima sekitar Rp1,3 miliar. Setelah kebijakan pemotongan, yang tersisa hanya Rp360 juta. Turunnya bukan sedikit, hampir tiga perempat hilang. Dengan Rp360 juta, desa tetap dituntut menjalankan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan,

Kalimat itu seperti genderang perang. Publik langsung disuguhkan narasi besar. Banyak kades bermasalah. Banyak yang tersandung hukum.

hitungannya bisa lebih besar dari 58 persen. Narasinya jelas, efisiensi bisa diperluas.

Di sinilah polanya terasa. Setelah publik diyakinkan, banyak kades tersangkut hukum dan dana desa tidak sepenuhnya sampai ke rakyat, solusi yang diambil adalah pemotongan 58,03 persen, Rp34,57 triliun, dan pengalihan ke satu program prioritas. Cara yang sangat efektif membuat kepala desa kehilangan daya tawar fiskal.

Mereka tetap menjabat, tetap bertanggung jawab, tapi dengan anggaran menyusut drastis.

masalah? Ada. Data penegakan hukum membuktikan itu. Tapi apakah jawabannya adalah memangkas Rp34,57 triliun dari Rp60,57 triliun, 58,03 persen, untuk seluruh desa tanpa kecuali? Di situlah debatnya.

Angka-angka ini bukan sekadar statistik APBN. Di banyak tempat, ia berarti berapa meter jalan yang gagal diperbaiki, berapa saluran irigasi yang tertunda direhabilitasi, berapa program pemberdayaan yang harus ditunda. Di balik angka 58,03 persen itu, ada ribuan kepala desa yang kini bekerja dengan ruang gerak jauh lebih sempit, di bawah bayang-bayang narasi besar, kalau salah langkah, hukum menunggu. ●

Catatan Politik Bamsoet

PRABOWO SOSOK PENDENGAR, JANGAN BIARKAN OKNUM CORENG KEPEMIMPINANNYA

Para petinggi dan orang-orang dekat Presiden Prabowo Subianto patut mewaspadaai upaya nyata di ruang publik yang bertujuan merusak atau menghancurkan karakter dan kredibilitas Presiden serta Kabinet Merah Putih.

Presiden serta Kabinet Merah Putih. Upaya nyata itu berwujud ancaman, teror, serta respons intimidatif kepada pemerhati maupun individu yang menyuarakan kritik. Teror dan ancaman itu ingin membangun kesan dan membentuk persepsi publik bahwa Presiden Prabowo dan anggota kabinet antikritik.

Sejumlah figur, termasuk influencer, yang mengenal dekat dan memahami karakter serta kepribadian Presiden Prabowo sangat yakin kalau pelaku ancaman, teror serta respons intimidatif kepada pemerhati maupun individu yang menyuarakan kritik, berada di luar kendali Presiden. Sebab, sejatinya, Presiden Prabowo dikenal sebagai pribadi yang tidak segan bertanya, mendengarkan penjelasan, dan kemudian berdebat.

Selain itu, sudah menjadi fakta yang bisa ditelusuri dan disaksikan bahwa Prabowo adalah sosok yang sangat terbuka dan tak segan menanggapi kritik yang dianggapnya perlu untuk direspons. Contoh kasusnya adalah pengakuan terbuka Presiden bahwa dia tahu kalau sejumlah penggiat media

sosial sering mengkritik dan mengancamnya dengan beberapa ungkapan. Hingga hari-hari ini, walau ada indikasi mobilisasi kritik dan kecaman kepada Presiden melalui platform media sosial terus mengalir di ruang publik, namun tidak ada upaya pembatasan atau larangan. Semua dibiarkan mengalir di ruang publik sejauh kritik tersebut masih dalam koridor adab.

Fakta ini menjadi bukti kalau Presiden tak pernah berupaya membungkam pandangan, pendapat dan aspirasi bernada kritis dari masyarakat, karena presiden sejatinya terbuka menerima kritik. Bahkan, belum lama ini, Presiden mengundang sejumlah tokoh atau figur yang secara terbuka sering menyuarakan kecaman dan kritik, baik kepada Presiden sendiri maupun kritik kepada anggota kabinet. Dalam suasana dialogis, presiden mendengarkan aspirasi para tamunya, dan sebaliknya presiden juga menjelaskan arah kebijakan pemerintahannya.

Maka, ketika akhir-akhir ini sejumlah kalangan mendiskusikan kasus

teror dan ancaman kepada mereka yang menyuarakan kritik, pertanyaan utamanya adalah siapa dalang di balik aktivitas teror dan ancaman itu? Siapa yang bermain dan mencoba mengail di air keruh? Para pembantu terdekat atau sosok-sosok kepercayaan Presiden Prabowo patut mewaspadaai kasus ini. Sebelum muncul anggapan atau asumsi-asumsi liar yang berdampak pada citra Presiden dan pemerintahannya, kasus ini hendaknya ditanggapi dengan bijaksana.

Bagaimana pun, ancaman dan teror itu dilakukan oknum tertentu yang nyata-nyata bertujuan menghancurkan



kan atau membunuh karakter Prabowo dalam peran dan fungsinya sebagai Presiden dan kepala pemerintahan. Dengan teror dan ancaman kepada para pengkritik pemerintah, dalang dan oknum pelaku ingin membangun kesan dan membentuk persepsi publik bahwa Presiden Prabowo dan pemerintahannya anti kritik.

Masalah ini perlu dikedepankan agar diwaspadai dan juga untuk memastikan terjaganya stabilitas nasional. Sebab, target ancaman dan teror terbaru yang sedang dibahas berbagai kalangan adalah pengalaman buruk Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Gadjah Mada (UGM), Tiyo Ardianto. Pemuda ini diancam dan diteror setelah dia menyuarakan kritiknya dengan menyatakan pemerintah gagal menjamin hak dasar anak, menyusul tragedi bunuh diri seorang siswa SD di Nusa Tenggara Timur (NTT). Tak berhenti pada Tiyo, teror juga dialamatkan kepada ibunya.

Ketika cerita tentang pengalaman buruk Tiyo bertebaran di ruang publik, akan terbentuk beragam anggapan atau asumsi. Salah satunya adalah anggapan bahwa oknum pelaku teror dan ancaman itu adalah orang suruhan penguasa atau pemerintah. Anggapan seperti ini harus segera bisa dicegah agar citra pemerintah tidak tercoreng. Melalui berbagai kebijakan dan pendekatan, setiap presiden atau kepala pemerintahan sejatinya selalu berupaya membangun citra positif. Karena itu, merespons setiap kritik dengan teror tak pernah menjadi pilihan.

Maka, para pembantu terdekat Presiden perlu memberikan respons terukur sebagai kontra terhadap aksi-aksi tak terpuji seperti itu. Sebab, membiarkan aksi teror dan ancaman seperti itu terus menjadi pembicaraan publik berpotensi mengganggu kondusivitas. Aktor intelektual dan pelaku teror ingin memosisikan Pemerintah dan komunitas yang kritis saling berhadap-hadapan. Sekali lagi, sudah menjadi bukti bahwa Presiden tak pernah berupaya membungkam pandangan, pendapat dan aspirasi bernada kritis dari masyarakat, karena presiden sejatinya terbuka menerima kritik.

Maka, tindakan meneror dan mengancam para pengkritik sekali-kali tak

boleh dibiarkan. Sekadar saran, para staf di kantor kepresidenan hendaknya sigap memberi tanggapan resmi setiap kali pemberitaan tentang teror dan ancaman kepada para pengkritik pemerintah mengemuka di ruang publik.

Para menteri pun patut disarankan agar merealisasikan program-program prioritas Presiden dengan penuh kebijaksanaan agar Presiden tidak menjadi sasaran kritik. Kesalahan dalam realisasi program prioritas hendaknya diminimalisir. Kecerobohan – apalagi disengaja – tidak boleh ditoleransi. Karena itu, pengawasan pada tahap realisasi program layak diperketat. Aspek ini perlu digaris-



bawahi karena program-program prioritas Presiden Prabowo bersentuhan langsung dengan masyarakat. Karena menyentuh langsung dinamika kehidupan masyarakat, wajar jika program-program prioritas itu menjadi perhatian banyak komunitas.

Misalnya, tidak ada yang salah dengan program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG). Akan muncul masalah ketika realisasi program atau pelaksanaannya tidak mencapai standar minimal untuk aspek pemenuhan gizi. Hingga hari-hari ini, realisasi program MBG masih dan terus menjadi sasaran kritik masyarakat. Semua pihak yang terlibat langsung maupun tak langsung dalam realisasi Program MBG didorong untuk terus melakukan pembenahan dan perbaikan. Kesalahan dan kecerobohan tidak boleh dibiarkan berulang dan diberikan toleransi. Sebab, kritik dan keca-

man masyarakat berdampak pada citra Presiden selaku penggagas program. Tujuan mulia presiden melalui gagasan MBG tidak boleh ditunggangi untuk kepentingan lain.

Selain program MBG, upaya merealisasikan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih pun menyulut kebisingan di ruang publik. Ada pemikiran atau gagasan untuk menutup jaringan minimarket yang sudah eksis yang dikelola jutaan pekerja. Kemudian muncul pula gagasan untuk impor 105.000 unit kendaraan niaga ringan (pick up) dari India. Padahal, beragam merek dari industri otomotif dalam negeri sudah memproduksi

kendaraan sejenis dan diyakini mampu memenuhi kebutuhan Kopdes.

Dua gagasan atau pemikiran dalam konteks merealisasikan program Kopdes itu tentu saja dinilai aneh oleh masyarakat. Karena aneh, sudah barang tentu menyulut kebisingan di ruang publik. Hadirkan saja Kopdes dengan segala kelebihanannya dan biarkan dia tumbuh alami. Tentang kebutuhan Kopdes akan kendaraan pick up, produksi dalam negeri sudah terbukti andal dan digunakan dalam berbagai kegiatan distribusi dan perdagangan. Kalau impor direalisasikan, pemerintah akan dituduh tidak cinta produksi dalam negeri. ●

Bambang Soesatyo Anggota DPR/Ketua MPR ke-15/Ketua DPR ke-20/Ketua Komisi III DPR ke-7/Dosen Pascasarjana (S3) Ilmu Hukum Universitas Borobudur, Universitas Jayabaya, dan Universitas Pertahanan (Unhan)

KERATON SOLO DORONG AUDIT KEUANGAN 2018–2025

Pelaksana Pelind-
dungan Keraton
Surakarta, KGPH
Panembahan Agung
Tedjowulan secara
resmi mengajukan
permohonan audit
keuangan Keraton
Surakarta kepada
Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK) un-
tuk periode 2018–
2025.

Langkah ini disebut sebagai bagian dari upaya membangun tata kelola baru yang transparan dan akuntabel di lingkungan Keraton Kasunanan Surakarta.

Juru bicara Tedjowulan, Kanjeng Pakoenegoro menjelaskan bahwa permohonan audit tersebut telah dikirim langsung ke BPK.

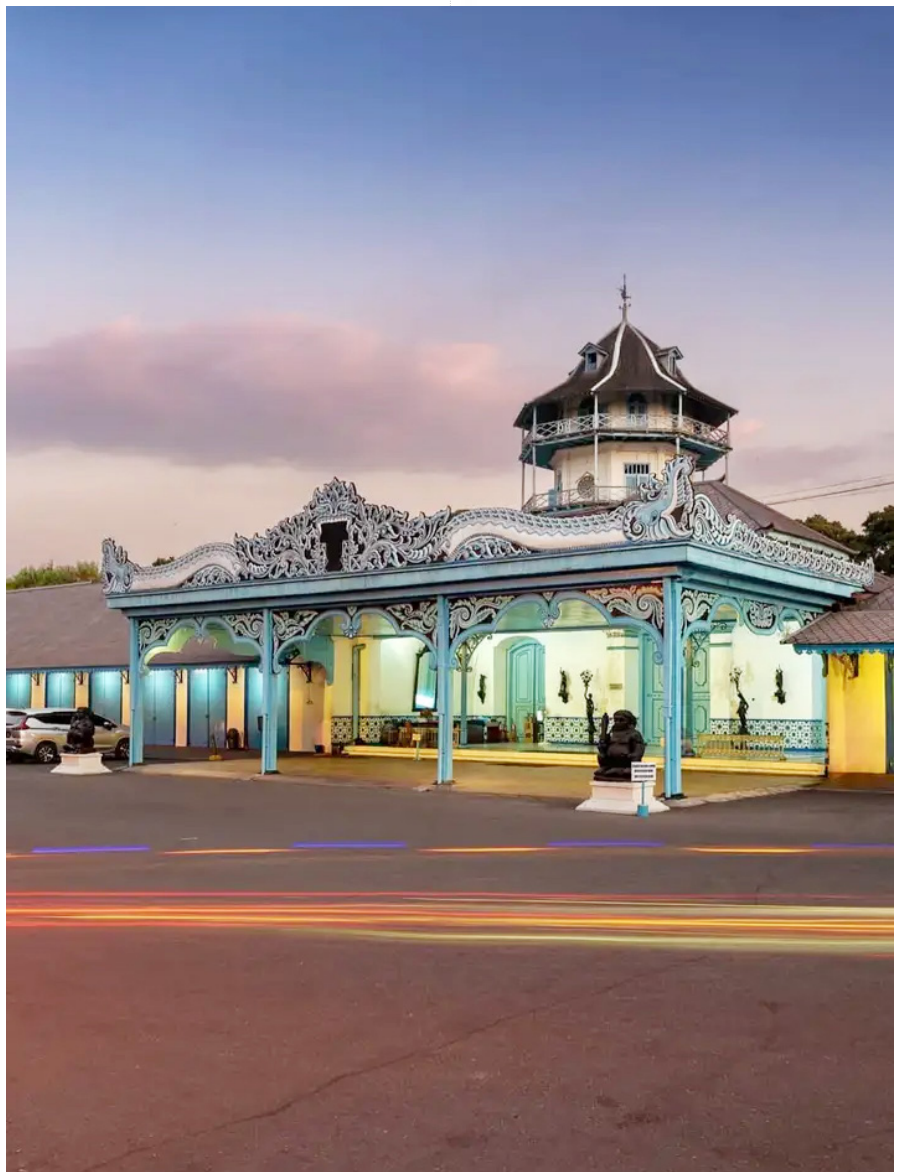
“Benar Kangjeng Gusti Pangeran Haryo Panembahan Agung Tedjowulan telah mengajukan permohonan audit keuangan Keraton Surakarta kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Saya ditugaskan un-

tuk mengantar surat tersebut langsung,” kata Pakoenegoro dalam keterangan tertulis, Senin 23 Februari 2026.

Ia menegaskan, audit diminta untuk pengelolaan keuangan Keraton pada masa kepemimpinan Paku Buwono XIII selama 2018–2025.

“Permohonan audit keuangan pada era kepemimpinan Paku Buwono XIII itu untuk periode 2018–2025. Info dan data sedang dikumpulkan,” ujarnya.

Permohonan tersebut tercantum dalam surat bernomor 02/SKMK.8.2026/PAKKSH/2026 tertanggal 21 Januari 2026 yang ditujukan kepada Ketua BPK



RI. Dalam surat itu, Tedjowulan juga menegaskan posisinya sebagai Pelaksana Keraton Surakarta berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2026.

"Dalam pembukaan surat itu, Gusti Tedjowulan menegaskan penunjukan dirinya sebagai Pelaksana Keraton Surakarta menandai masuknya era kepemimpinan baru dalam pengelolaan keraton," ujar Pakoenegoro.

Ia menambahkan, meskipun terdapat dua pihak yang mengklaim sebagai Paku Buwono XIV, hingga kini belum ada raja yang definitif dan diakui pemerintah.

Menurut Pakoenegoro, audit menjadi prasyarat penting bagi kepemimpinan baru.

"Audit keuangan sangat krusial untuk memulai pengelolaan Keraton Surakarta agar kepemimpinan Gusti Tedjowulan bebas dari pertanggungjawaban pengelolaan keuangan era kepemimpinan sebelumnya," tegasnya.

Pihak Tedjowulan juga meminta agar tidak ada pihak yang menghambat proses audit, serta mengingatkan agar seluruh data dan informasi disampaikan secara terbuka.

"Jangan pula menyembunyikan informasi dan data. Pasti ketahuan. Gusti Tedjowulan menghendaki hukum ditegakkan dengan tegas. Siapa yang bersalah, dan merugikan keraton, harus dihukum," ujar Pakoenegoro.

Ia menegaskan, ke depan tidak boleh lagi ada penyaluran dana yang bersumber dari APBN, APBD, maupun hibah lainnya ke rekening pribadi.

"Tidak boleh lagi terjadi bantuan yang berasal dari APBN/APBD dan dana hibah lainnya disalurkan ke rekening pribadi. Harus melalui badan hukum. Semua prosesnya harus bersih, transparan, dan akuntabel," katanya.

Pemerintah Kota Surakarta menyatakan terbuka terhadap rencana audit tersebut. Wali Kota Surakarta Respati Ardi menilai, permohonan audit merupakan hak setiap pihak sepanjang mengikuti prosedur.

"Intinya semua pihak, semua orang berhak menyampaikan audit BPK. Silakan saja, kami mengikuti prosedur yang berlaku. Pastinya akan menjadi lebih baik," ujar Respati saat ditemui di Balai

Kota.

Menurut Respati, Pemerintah Kota Surakarta terbuka terhadap pengawasan dari lembaga berwenang.

"Semakin banyak yang melakukan pengawasan dan mengkritisi, kami tentunya terbuka. BPK sebagai lembaga pengawasan pasti memberikan masukan yang baik," ucapnya.

Ia menambahkan, seluruh proses yang berkaitan dengan dana hibah akan dijalankan sesuai mekanisme pemeriksaan pengelolaan keuangan negara dan daerah.

kita tinjau," kata Respati, menegaskan bahwa Pemkot akan tetap berpedoman pada aturan yang berlaku.

Sementara itu, pihak Paku Buwono XIV melalui juru bicara KPA, Singonagoro menyatakan bahwa Tedjowulan juga termasuk salah satu penerima dana hibah yang dicairkan melalui rekening pribadi Paku Buwono XIII.

"Jadi kalau Gusti Tedjo meminta audit tahun 2018 sampai 2025, Gusti Tedjo itu juga salah satu penerima dana hibah itu. Makanya kalau nanti mungkin lupa bisa hubungi saya, saya kirim foto dan juga



Terkait mekanisme hibah, Respati menyebut penyaluran dana mengikuti regulasi pengelolaan keuangan daerah, yang memungkinkan hibah diberikan dalam bentuk uang, barang, atau jasa, sepanjang memenuhi persyaratan administratif.

Di sisi lain, pihak Keraton disebut tengah mempersiapkan pembentukan yayasan yang direncanakan menjadi pengelola dana hibah pada tahun mendatang.

"Sesuai ketentuan yang berlaku nanti

kuitansi waktu beliau menerima dana tersebut," ujar Singonagoro.

Ia menjelaskan, dana hibah sekitar Rp1,6 miliar per tahun sebagian besar digunakan untuk kebutuhan penggajian, sementara sebagian kecil dialokasikan untuk administrasi perkantoran. Menurutnya, selama era kepemimpinan Paku Buwono XIII, penerimaan serta pertanggungjawaban dana hibah telah dijalankan secara profesional, termasuk melalui empat kali audit sampling oleh BPK. ●

BANSOS RP17,5 TRILIUN DIPASTIKAN CAIR SEBELUM IDUL FITRI 2026

Pemerintah memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) senilai Rp17,5 triliun akan dirampungkan sebelum Hari Raya Idul Fitri 2026.

Kebijakan ini menjadi bagian dari strategi nasional untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah tren kenaikan harga kebutuhan pokok menjelang Lebaran di Indonesia.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan, anggaran tersebut difokuskan untuk melindungi keluarga penerima manfaat (KPM) dari tekanan inflasi pangan.

"Bansos ini diarahkan agar keluarga penerima manfaat tetap bisa memenuhi kebutuhan dasar, terutama menjelang Lebaran, di saat harga pangan cenderung meningkat," ujar pria yang akrab disapa Gus Ipul.

Penyaluran bansos Rp17,5 triliun dibagi dalam sejumlah klaster agar lebih tepat sasaran dan berdampak langsung

bagi kelompok rentan.

1. Penerima bansos reguler

Sebanyak sekitar 18 juta KPM menjadi prioritas utama. Mereka merupakan penerima bantuan sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH), yang mencakup ibu hamil, anak usia sekolah, hingga lanjut usia (lansia) yang terdaftar dalam basis data kesejahteraan nasional.

2. Warga di wilayah terdampak bencana

Pemerintah juga menyiapkan bansos adaptif dengan alokasi sekitar Rp2,3 triliun bagi masyarakat di daerah terdampak bencana, termasuk sejumlah wilayah di Sumatera. Bantuan ini ditujukan untuk menjaga keberlangsungan kebutuhan pokok masyarakat dalam kondisi darurat.

3. Penerima program atensi sosial

Kelompok penyandang disabilitas serta kelompok rentan lainnya memperoleh bantuan rehabilitasi sosial berupa pemenuhan kebutuhan dasar dan pendampingan sesuai kondisi masing-masing penerima.

Secara keseluruhan, pemerintah menyiapkan anggaran perlindungan sosial pada kuartal awal 2026 dengan nilai mendekati Rp20 triliun. Hingga awal Maret 2026, realisasi penyaluran telah melampaui Rp17 triliun.

Pemerintah optimistis sisa anggaran akan tersalurkan sepenuhnya sebelum Idul Fitri, sehingga bantuan dapat dimanfaatkan tepat waktu oleh masyarakat.

Kementerian Sosial Republik Indonesia memastikan sedikitnya tujuh program bansos akan disalurkan bertahap sepanjang Maret 2026 hingga menjelang Lebaran.

Berikut daftar bantuan yang dijadwalkan cair:

1. Program Keluarga Harapan (PKH)



- tahap I susulan
- * Sasaran: keluarga desil 1-4
 - * Prioritas: penerima yang belum menerima pencairan awal
 - * Waktu pencairan: sepanjang Maret 2026
2. Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) susulan
- * Sasaran: pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)
 - * Fokus: penerima baru yang masih proses administrasi
 - * Target pencairan: sebelum Idul Fitri 2026
3. Atensi Yatim Piatu (YAPI)
- * Penerima: anak yatim dan piatu dari keluarga tidak mampu
 - * Skema: bantuan triwulanan
 - * Periode pencairan: Maret 2026
4. Program Indonesia Pintar (PIP)
- * Sasaran: siswa SD, SMP, hingga SMA
 - * Syarat: memiliki surat keputusan nominasi/pemberian
 - * Waktu pencairan: pertengahan hingga akhir Maret 2026
5. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD)
- * Sasaran: warga miskin yang belum menerima bansos reguler
 - * Mekanisme: sesuai kebijakan pemerintah desa
 - * Periode: Maret 2026
6. PKH dan BPNT untuk wilayah 3T
- Penyaluran bagi masyarakat di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal dilakukan melalui PT Pos Indonesia. Penerima akan mendapatkan undangan resmi berbarcode sebagai syarat pencairan di kantor pos.

7. Bantuan paket pangan (beras dan minyak goreng)
- Pemerintah menyalurkan paket pangan berupa 20 kilogram beras dan 4 liter minyak goreng. Sejumlah daerah di kawasan Indonesia Timur, termasuk Papua dan Nusa Tenggara Timur, dilaporkan telah mulai membagikan undangan pengambilan bantuan.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, mendesak Badan Pangan Nasional (Bapanas) agar tidak menunda

penyaluran bantuan pangan beras dan minyak goreng untuk periode Februari-Maret 2026.

Menurut Alex, bantuan tersebut sangat dinantikan sekitar 33,2 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), terutama saat Ramadan dan jelang Idul Fitri 1447 H/2026 M.

Adapun setiap KPM akan menerima 10 kilogram beras dan 2 liter minyak goreng per bulan, yang disalurkan sekaligus untuk dua bulan.

"Stok beras dan minyak tidak ada kendala. Persediaannya sangat memadai. Kita minta pemerintah dalam hal ini Bapanas untuk tidak lagi menunda penyaluran Bapang periode Februari dan Maret

kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan).

3. Masukkan nama lengkap sesuai KTP.

4. Ketik kode captcha.

5. Klik tombol pencarian data.

Selain melalui laman resmi, masyarakat juga dapat mengonfirmasi melalui kantor desa atau kelurahan, pendamping sosial PKH, serta undangan resmi bagi penerima yang pencairannya dilakukan melalui kantor pos.

Pemerintah menegaskan seluruh bansos akan dicairkan bertahap hingga akhir Maret 2026. "Masyarakat diimbau memastikan data kependudukan dan data penerima bantuan telah tercatat



2026 ini," kata Alex dalam keterangan tertulisnya, dikutip dari laman resmi DPR RI, Jumat 27 Februari 2026.

Masyarakat dapat memeriksa status penerima bansos secara mandiri melalui laman resmi Kementerian Sosial. Langkahnya sebagai berikut:

1. Masuk ke situs cek bansos Kemensos.
2. Pilih wilayah sesuai KTP (provinsi,

dalam sistem resmi agar tidak mengalami kendala saat pencairan," lanjut Gus Ipul.

Dengan percepatan penyaluran tujuh program bansos tersebut, pemerintah berharap masyarakat dapat menjalankan ibadah Ramadan dengan lebih tenang serta merayakan Idul Fitri 2026 tanpa tekanan ekonomi yang berlebihan. ●



DAGING SAPI DAN TINGGI BADAN ALA MBG

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto sejatinya sangat baik. Tujuan utamanya agar anak-anak sekolah mendapat gizi yang cukup, sehat serta punya IQ yang tinggi.

Untuk mewujudkan program mulia ini, Prabowo Subianto menunjuk Dadan Hindayana, seorang ahli serangga sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mengelola BGN.

Dengan menghabiskan ratusan triliun rupiah Program MBG menjadi proyek raksasa yang membuat anggaran pendidikan, anggaran kesehatan, dan kesejahteraan rakyat lainnya ikut tergesur.

Program MBG dianggap lebih mulai dari pendidikan, kesehatan serta lapangan kerja. Sehingga narasi yang disampaikan juga sangat wow. Bayangkan dengan nilai sebesar Rp 6.000 hingga Rp 8.000, anak-anak sekolah mendapat porsi daging sapi, ikan lele, susu, sayur sehat, nasi serta buah-buahan segar.

Bahkan Kepala BGN Dadan Hindayana dengan berani melapor ke Prabowo soal menu MBG yang bisa menghabis

MBG 19 ribu sapi untuk dipotong dalam sehari

Dalam pengakuan Dadan, dapur MBG (SPPG) akan memotong satu ekor sapi untuk kebutuhan menu setiap harinya. Jika target sekitar 19.000 SPPG, berarti ada 19.000 sapi yang dipotong per hari jika semua SPPG menyajikan menu daging sapi.

Penjelasan ini disampaikan dalam konteks perkembangan program MBG, yang juga mencakup rincian penggunaan bahan pangan lain seperti beras, sayur, pisang, dan lele untuk menu yang disajikan.

Dadan Hindayana juga meyakini kalau program makan bergizi gratis (MBG) juga dapat memperbaiki kualitas fisik anak-anak Indonesia jadi tumbuh lebu tinggi.

Dia mengklaim kalau anak-anak penerima manfaat MBG berpotensi tumbuh tinggi minimal hingga 180 cm saat dewasa.

Dia menyebutkan bahwa anak usia 12 hingga 16 tahun merupakan second peak atau puncak kedua pertumbuhan fisik anak yang sangat menentukan tinggi badan dan kesehatan masa dewasa. Pada rentang usia itu pula MBG dibagikan kepada anak-anak di sekolah dan pesantren.

"Inilah saatnya kita harus intervensi dengan gizi seimbang. Kalau kita tidak intervensi sekarang, maka tubuhnya saya perkirakan rata-rata hanya 160-165 (cm). Tapi ketika ada makan bergizi, nanti tubuhnya minimal 180 cm," kata Dadan saat peluncuran 1.000 dapur MBG di pesantren secara virtual.

la menjelaskan bahwa ada dua masa puncak pertumbuhan anak yang sangat penting. Pertama ketika seribu hari pertama kehidupan, sejak dalam kandungan hingga anak berusia dua tahun. Masa ini sangat krusial untuk perkembangan otak dan kecerdasan.

Di hadapan para santri, Dadan menyampaikan kalau mereka saat ini tengah berada dalam fase second peak tersebut. Itu sebabnya para santri turut menjadi sasaran MBG agar asupan gizinya bisa lebih baik.

Dadan juga memperkenalkan MBG sebagai pola makan harian yang terdiri dari karbohidrat, protein hewani dan nabati, sayur, buah, serta susu.

"Kami tahu bahwa 60 persen anak Indonesia itu tidak pernah punya akses terhadap makan dengan gizi seimbang. Jadi kalau makan itu, ada nasi, ada bakwan atau bala-bala, ada mie, ada bihun, ada kerupuk. Sebagian besar makannya seperti itu," kata Dadan.

Dia menceritakan pengalamannya sendiri terhadap dua anaknya yang memiliki tinggi lebih dari 180 cm.

"Ini sudah terbukti di rumah. Anak saya ada dua orang laki-laki, itu anak yang pertama tingginya 181, anak yang kedua tingginya 185. Kenapa? Karena minum susu diwajibkan sama ibunya dari kecil sampai SMA kelas 2, wajib," tuturnya.

Fakta di Lapangan Berbeda

Namun hingga kini menu daging sapi, ikan lele atau susu yang dijanjikan tidak sepenuhnya terbukti ada. Di bulan Ramadan ini, anak sekolah mendapat paket makanan MBG tiga hari sekali. Setiap menu hanya diberikan paket minuman kotak kecil rasa susu, roti dan satu atau butir kurma.

Narasi daging sapi dan tinggi badan bisa mencapai 180 sentimeter yang digaungkan Dadan dijawab masyarakat dengan fakta paket anak yang diterima. Seakan mempertanyakan apakah dengan minuman kotak rasa susu, roti dan kurma bisa meningkatkan per-

trauma saya karena ini sudah kejadian yang kedua," ucap Kepala Sekolahnya.

Demikian juga SMA Negeri 1 Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya, dilaporkan tidak menerima distribusi menu MBG karena pihak sekolah memilih mengembalikan menu yang telah dikirim karena dinilai belum memenuhi kebutuhan gizi siswa.

Langkah tersebut disebut sebagai bentuk perhatian sekolah terhadap kualitas asupan makanan yang diterima peserta didik. Menurut pihak sekolah, standar gizi dalam menu MBG perlu disesuaikan dengan kebutuhan nutrisi siswa tingkat sekolah menengah



tumbuhan anak hingga mencapai 180 cm.

Beberapa sekolah berani memutuskan untuk menolak paket MBG yang mereka terima karena tidak sesuai dengan narasi pemerintah.

Seperti SD Muhammadiyah 1 Temanggung yang memutuskan berhenti menjadi penerima makan bergizi gratis (MBG) buntut adanya makanan basi yang didistribusikan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Giyanti. Kejadian ini merupakan kali kedua sekolah tersebut menerima pasokan makanan yang tidak layak dikonsumsi.

"Saya tetap akan menolak. Sudah

gah atas agar program benar-benar berdampak positif bagi kesehatan dan konsentrasi belajar.

Sedangkan di Probolinggo, pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SDN 1 Semampir, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, kini tengah menjadi sorotan tajam.

Kekecewaan wali murid berakar pada butir-butir pernyataan dalam formulir yang dikeluarkan melalui link SPPG (Satuan Pelayanan Pangan Gizi). Ada dua poin utama yang dianggap janggal dan merugikan siswa yakni larangan dokumentasi dan klausul anti lapor. Terdapat instruksi agar wali murid tidak melakukan protes atau menggunggah informasi ke media sosial jika terjadi kendala termasuk keracunan makanan. ●

DADAN HINDAYANA : JANGAN MENGAMBIL KEUNTUNGAN SESAAT

Integritas dan loyalitas dalam menjalankan amanah merupakan hal yang harus dipegang teguh oleh setiap pelaksana Program MBG. Dua poin penting ini menjadi pegangan bagi seluruh pegawai di Badan Gizi Nasional.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana mengungkapkan bahwa sebelum bergabung membantu pemerintahan Prabowo Subianto, dirinya hanya menerima dua pesan utama yang hingga kini terus dipegang teguh.

Menurutnya, dua prinsip tersebut bukan sekadar pesan personal, melainkan nilai dasar yang harus diinternalisasi oleh seluruh jajaran BGN, khususnya para pimpinan KPPG di daerah yang memiliki kewenangan besar dalam pelaksanaan program.

"Sebelum saya bergabung dengan Pak Presiden Subianto, saya hanya diberi pesan dua dan saya kira ini relevan untuk Anda semua, yang membantu saya itu adalah Pak Presiden. Saya

hanya menitiptkan dua hal, satu merah putih di dada dua tidak boleh korupsi," pesan Dadan kepada Kepala KPPG dan Kepala Sub Bagian TU serta seluruh pegawai BGN pada Sosialisasi Regulasi Kepegawaian di lingkungan BGN

Dadan mengingatkan agar kewenangan yang dimiliki tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau keuntungan sesaat.

"Jadi mohon Anda semua, karena menjadi KPPG memiliki kewenangan di daerah, jangan gunakan kewenangan itu untuk mengambil keuntungan sesaat, kita harus berpikir jangka panjang," tegas Dadan melalui siaran persnya.

Skema Rp6 Juta/Hari Lebih Efisien dan Minim Resiko

Dadan juga menanggapi isu yang beredar bahwa kebijakan pemberian insentif fasilitas SPPG merupakan kebijakan pemborosan, Badan Gizi Nasional (BGN) tegaskan bahwa skema tersebut merupakan strategi yang efisien dan minim resiko negara bukan sebuah pemborosan.

Ia menjelaskan bahwa terdapat sejumlah prinsip mendasar dalam skema kemitraan tersebut. Pertama, Rp6 juta per hari bukanlah dana pembangunan dari APBN, melainkan bagian dari mekanisme pembayaran layanan atas SPPG yang telah berjalan. Seluruh proses pembangunan fisik dilakukan dengan investasi mandiri oleh mitra.

Kedua, seluruh risiko ditanggung sepenuhnya oleh mitra, mulai dari risiko pembangunan, pelaksanaan operasional, evaluasi, hingga risiko bencana alam.

Ketiga, pembangunan oleh mitra dipastikan berlangsung lebih efisien karena tidak mungkin melakukan mark up untuk dirinya sendiri. Mitra akan membangun fasilitas seoptimal mungkin sesuai kebutuhan. Salah satu contoh adalah pembangunan SPPG oleh Persatuan Islam (Persis) yang dinilai



sangat baik dengan nilai investasi sekitar Rp3 miliar.

“Saya lihat kemarin SPPG yang dibangun Pondok Pesantren Perseatuan Islam (Persis) itu sangat bagus sekali, itu dibangun dengan dana tiga miliar. Saya yakin kalau itu dibangun oleh dana APBN itu nilainya 6 miliar, jadi kita sudah 50 persen lebih efisien,” ungkap Dadan.

Keempat, aspek yang dinilai paling strategis adalah keunggulan dalam kecepatan waktu (the winning of time). Melalui skema kemitraan, bangunan representatif dapat diselesaikan dalam waktu sekitar dua bulan.

Untuk itu, BGN menegaskan bahwa kebijakan insentif fasilitas SPPG Rp6 juta per hari bukanlah pemborosan, melainkan strategi untuk memastikan layanan pemenuhan gizi berjalan cepat, efisien, serta meminimalkan risiko fiskal negara, dengan tetap menjunjung prinsip tata kelola yang baik.

Insentif SPPG Terintegrasi dalam Pagu Rp15.000

Menanggapi informasi yang beredar di ruang publik mengenai adanya insentif Rp6 juta di luar pagu Rp15.000 per menu Program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta narasi yang menyebutkan mitra memperoleh laba bersih Rp1,8 miliar per tahun, BGN menegaskan bahwa informasi tersebut tidak tepat dan berpotensi menyesatkan.

“Angka Rp1,8 miliar yang beredar merupakan pendapatan kotor maksimal sebelum dikurangi investasi, penyusutan aset, serta biaya operasional lainnya. Program MBG dirancang untuk menjamin kesiapsiagaan fasilitas dan mutu layanan, bukan untuk memberikan keuntungan berlebih kepada mitra. Standar yang ditetapkan justru mencerminkan komitmen pada kualitas, keamanan pangan, dan keberlanjutan program,” tegas Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya.

Program MBG dilaksanakan berdasarkan Keputusan Kepala BGN Nomor 401.1 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG.

Dalam petunjuk teknis tersebut ditegaskan alokasi rata-rata Rp15.000



per hari per penerima manfaat telah mencakup komponen bahan baku, biaya operasional riil (at cost), serta insentif fasilitas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Insentif fasilitas SPPG ditetapkan sebesar Rp6.000.000 per hari operasional dan diberikan berbasis ketersediaan layanan, bukan berbasis jumlah porsi yang diproduksi.

Dengan asumsi kapasitas layanan maksimal 3.000 penerima manfaat per hari, insentif Rp6.000.000 tersebut ekuivalen dengan Rp2.000 per porsi. Artinya, insentif merupakan bagian terintegrasi dalam struktur pembiayaan Rp15.000 per menu dan bukan tambahan di luar pagu anggaran.

Adapun narasi mengenai “laba bersih Rp1,8 miliar per tahun” merupakan interpretasi keliru. Angka tersebut adalah estimasi pendapatan kotor maksimal dari komponen insentif dalam

satu tahun operasional penuh, yang dihitung dari Rp 6 juta dikalikan 313 hari operasional (365 hari dikurangi 52 hari Minggu), sehingga menghasilkan Rp1.878.000.000 per tahun.

Untuk memperoleh insentif tersebut, mitra wajib membangun dan mengoperasikan SPPG sesuai standar ketat yang ditetapkan BGN. Investasi awal dikeluarkan mitra dari dana pribadi berkisar antara Rp2,5 miliar hingga Rp6 miliar, bergantung lokasi dan harga lahan.

Investasi ini mencakup pengadaan lahan 500–800 m, pembangunan dapur industri ±400 m, instalasi listrik tiga fase, sistem filtrasi air standar air minum, instalasi pengolahan air limbah (IPAL), lantai antibakteri, sistem pendingin ruangan, minimal 16 titik CCTV, mess karyawan, ruang kantor, peralatan masak industri, serta pemenuhan sertifikasi seperti SLHS dan halal. ●

KASUS KERACUNAN MBG MASIH TERUS TERJADI

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan bagian dari strategi nasional pemenuhan gizi untuk menjangkau sekitar 82,9 juta penerima manfaat secara bertahap di 38 provinsi. Namun program ini masih terus menuai kontroversi dan kritikan tajam.

Sementara Badan Gizi Nasional (BGN) selaku lembaga yang bertanggung jawab terhadap program MBG hingga kini belum bisa mengatasi persoalan penting di lapangan yakni keracunan makanan.

Hingga akhir Februari, kasus keracunan masih terjadi di berbagai daerah. Di Januari ini saja jumlah mencapai 2000 lebih dan hingga kini terus berlanjut di saat Ramadan.

Seperti terjadi Kabupaten Tulang Bawang, Lampung, sebanyak 33 warga dilarikan ke RSUD Menggala karena mual, pusing, dan muntah-muntah usai menyantap menu Makan Bergizi Gratis (MBG). Korban kebanyakan balita, anak-anak, hingga lansia.

Kepala Dinas Kesehatan Tulang Bawang Fatoni mengatakan, total ada 33 warga yang dirawat. "Selain 14 anak, ada lima balita, satu lansia, dan 13 orang dewasa," kata Fatoni.

Kasubag Tata Usaha Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Bandar Lampung Fitra Alfari mengatakan, sudah menelusuri kasus ini. Hasilnya, menu telur asin, roti, wafer, dan jeruk itu dibagikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Menggala Tengah.

Demikian juga ratusan siswa di

Kecamatan Simpang Mamplam, Kabupaten Bireuen Aceh, diduga keracunan MBG. Mereka harus dilarikan ke klinik kesehatan terdekat, setelah tumbang satu-persatu sesuai berbuka puasa.

Keracunan terjadi pada Kamis malam, 26 Februari 2026, satu persatu orangtua murid di Kecamatan Simpang Mamplam dilanda kepanikan. Tiba-tiba anak mereka muntah beberapa saat setelah berbuka puasa.

Kepanikan tingkat keluarga, kemudian berubah menjadi kepanikan massal. Satu persatu, kemudian menjadi sangat banyak murid TK dan siswa SD di Simpang Mamplam, harus dilarikan ke Puskesmas Simpang Mamplam, karena diduga keracunan MBG (Makan Bergizi Gratis).

dibawa ke Rumah Sakit Dustira dan sebagian besar dibawa ke Rumah Sakit Umum Cibabat.

Keracunan tersebut diduga akibat mengonsumsi makanan berupa telur busuk, nasi basi berwarna kuning, susu kotak, dan roti berjamur yang keburu mereka santap sebelum orang tua memeriksanya.

Nana Suyatna, Kepala Dinas Pendidikan Kota Cimahi, membenarkan adanya informasi tersebut.

"Total korban ada 53, Masuk RS Cibabat 15, Mitra Kasih 2, RS Dustira 1," tambahnya.

Sementara dari hasil studi internal yang dilakukan Center of Economic and Law Studies (CELIOS) mengungkap potensi kerugian negara akibat makanan terbuang dalam program Makan Ber-



Menurut informasi, sumber keracunan MBG di Simpang Mamplam, diduga dari empat butir bakso yang dibagikan kepada tiap-tiap siswa.

Menu MBG yang dibagikan diperuntukkan untuk tiga hari ke depan, yaitu empat butir bakso kering yang dibungkus plastik bening, kerupuk tempe, dua butir telur, tiga butir kurma, satu butir jeruk, tiga potong roti, satu bungkus jeli, dan satu kotak susu UHT berperisa ukuran 250 gram.

Sedangkan sejumlah siswa mengalami gejala keracunan setelah menyantap MBG di Cimahi, di antaranya siswa SDN Cimahi Mandiri 1, SDN Karang Mekar Mandiri 1, PAUD Kartika, SMPN 6, TK Kartika, TK PGRI 1 Cimahi. Mereka ada yang

gizi Gratis (MBG) bisa mencapai Rp 1,27 triliun setiap pekan. Temuan ini memunculkan dorongan agar pemerintah melakukan moratorium sementara program tersebut guna melakukan reformasi tata kelola secara menyeluruh.

Peneliti CELIOS, Isnawati Hidayah, menyampaikan bahwa persoalan MBG terus memunculkan keresahan, terutama dari kalangan orang tua siswa.

"Kalau kita membicarakan MBG memang tidak ada habisnya. Banyak sekali keresahan terutama dari para orang tua. Makanannya itu banyak yang dibuang dan belum ada yang bisa meng-capture sebenarnya loss-nya itu seberapa," ujar Isnawati Hidayah dalam konferensi pers. ●

info indonesia

iNOVASI UNTUK NEGERI



**INFO
PASANG
IKLAN
NUR AISAH
0815-1157-6312**

IKLAN BACK COVER

RP 75.000.000

IKLAN DISPLAY/HAL

RP 50.000.000

IKLAN ADVERTORIAL/HAL

RP 65.000.000

CENTER SPREAD

RP 80.000.000

*Kami Hadir
Memberikan
info Tersebut*

▶ **BEBERAPA MANFAAT DAN KEUNTUNGAN PASANG IKLAN DI MAJALAH INFO INDONESIA**

▶ **IKLAN LEBIH AKURAT DAN TERTARGET SESUAI DENGAN TOPIK PEMBAHASAN YANG ADA.**

▶ **LOKASI IKLAN YANG PRODUKTIF SEHINGGA MUDAH DI LIHAT PARA PEMBACA INFO INDONESIA.**

▶ **HARGA YANG TERJANGKAU DAN BANYAK DISKON UNTUK PARA PELANGGAN**



iNOVASI UNTUK NEGERI
nfo indonesia

EDISI # 65 MARET 2026

<https://www.infoindonesia.id>



CIK UJANG CALON GUBERNUR INCUMBENT 2029